



2020 RENCANA KERJA

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR



**RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
ISBN :

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Penyunting : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama

Penulis : Kriswoyo, S.E

Desain Grafis : Kriswoyo, S.E.

Ilustrasi Cover : Kriswoyo, S.E.

Diterbitkan oleh:

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jalan SK. Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang

Tlp: 0380832211 Fax: 0380825318

Email: bbksdantt@gmail.com; bbksda_ntt@yahoo.co.id





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : SK. /K.5/TU/REN/12/2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal KSDAE dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Besar KSDA NTT Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Balai Besar **KSDA NTT**.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

/ 7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amendemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;

/ 28. Peraturan ...

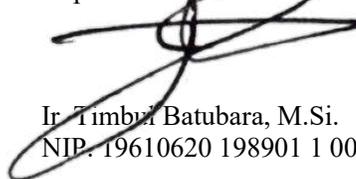
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
33. Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor SK. 101/BBKSDA-16.1/2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KSDA NTT TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahun 2020 pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada tanggal : Desember 2019

Kepala Balai Besar KSDA NTT,



Ir. Timbul Batubara, M.Si.
 NIP. 19610620 198901 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Para Direktur lingkup Ditjen KSDAE;
6. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian LHK;
7. Pejabat Struktural Lingkup Balai Besar KSDA NTT.

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Nomor: P.6/KSDAE/SET/REN.0/12/2019

TENTANG

**RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peyusunan Dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang lebih berdaya guna dan berhasil serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai target/ sasaran dan indikator kinerja pembangunan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Penetapan Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 mengacu pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 dan Renstra Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Besar harapan kami dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 yang masih dalam pembahasan. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Kupang, Desember 2019
Kepala Balai Besar,

I. Timbul Batubara, M.Si.
NIP. 19610620 198901 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XII
RINGKASAN EKSEKUTIF	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
1. Kawasan Hutan Konservasi.....	19
2. Sarana Pendukung Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi	65
3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	67
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019	76
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	76
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja.....	83
3.1.2. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2019.....	84
3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 DAN REALISASI TAHUN 2019.....	85
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020	88
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	88
B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	91
1. OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.950) TAHUN ANGGARAN 2020	96
2. OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.951) TAHUN ANGGARAN 2020.....	105
3. OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.994) TAHUN ANGGARAN 2020	108

4. OUTPUT LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DIDALAM KAWASAN KONSERVASI (5420.002) DAN OUTPUT DOKUMEN PEMOLAAN KAWASAN KONSERVASI ALAM (5420.003) TAHUN ANGGARAN 2020	120
5. OUTPUT LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI PERMASALAHANNYA (5421.001) TAHUN ANGGARAN 2020	133
6. OUTPUT JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (5421.002) TAHUN ANGGARAN 2020	137
7. OUTPUT JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA (5421.003) TAHUN ANGGARAN 2020	147
8. OUTPUT LUAS KAWASAN YANG DIVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL (5422.001) TAHUN ANGGARAN 2020	172
9. OUTPUT JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM YANG DISIAPKAN SEBAGAI LOKASI KUNJUNGAN (5423.001) TAHUN ANGGARAN 2020	191
10. OUTPUT LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DI LUAR KAWASAN KONSERVASI (5424.001) TAHUN ANGGARAN 2020	198
BAB IV	202
PENUTUP	202

Daftar Tabel

Tabel III. 1 Rekapitulasi Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya	20
Tabel III. 2 Daftar Hutan Konservasi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	22
Tabel III. 3 Daftar KPHK pada Hutan Konservasi	25
Tabel III. 4 Daftar Kawasan yang ditetapkan sebagai Target Peningkatan Nilai METT	26
Tabel III. 5 Hasil Penilaian METT Hutan Konservasi Prioritas Lingkup Balai Besar KSDA NTT.....	27
Tabel III. 6 Rencana Pengelolaan Kawasan.....	28
Tabel III. 7 Rencana Penataan Blok.....	30
Tabel III. 8 Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam	32
Tabel III. 9 Dokumen DED pada Taman Wisata Alam	33
Tabel III. 10 Perambahan Kawasan	34
Tabel III. 11 Daerah Penyangga Hutan Konservasi.....	37
Tabel III. 12 Sebaran Tenaga Polisi Kehutanan BBKSDA NTT Tahun 2019	47
Tabel III. 13 Kondisi Sarana Prasarana Pengamanan	49
Tabel III. 14 Register kasus tindak pidana kehutanan Balai Besar KSDA NTT Tahun 2019	50
Tabel III. 15 Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan.....	55
Tabel III. 16 Kebakaran Hutan pada Kawasan Hutan Konservasi Periode Tahun 2015-2019	56
Tabel III. 17 Kelompok Masyarakat Peduli Api.....	58
Tabel III. 18 Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP).....	60
Tabel III. 19 Kelompok Tani Hutan (KTH).....	62
Tabel III. 20 Kelompok Kemitraan Konservasi BBKSDA NTT	63
Tabel III. 21 Kondisi sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan s/d 31 Desember 2019.....	65
Tabel III. 22 Kondisi Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan s/d 31 Desember 2019.....	66
Tabel III. 23 Kondisi sebaran pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Januari 2020.....	73
Tabel III. 24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019.....	77
Tabel III. 25 Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2019	84
Tabel III. 26 Efisiensi pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2019.....	85
Tabel III. 27 Realisasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan.....	85
Tabel III. 28 Realisasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur TA. 2019 per Kegiatan.....	86
Tabel III. 29 Prioritas Nasional 2020 yang didukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	89
Tabel III. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020-2024	92
Tabel III. 31 Rincian Pagu Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020 per Kegiatan (x Rp.1.000,-)	93
Tabel III. 32 Pagu Alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 per Jenis Belanja & Sumber Dana(x Rp.1.000,-).....	94
Tabel III. 33 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.950).....	98
Tabel III. 34 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.951).....	106
Tabel III. 35 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TEA OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.994).....	111

Tabel III. 36 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TEA OF REFERENCE.....	119
Tabel III. 37 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE.....	123
Tabel III. 38 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LUAS AREA KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI PERMASALAHNNYA (5421.001)	135
Tabel III. 39 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF I (5421.002)	142
Tabel III. 40 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAANNYA (5421.003).....	149
Tabel III. 41 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LUAS KAWASAN YANG DIVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL (5422.001).....	184
Tabel III. 42 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM YANG DISIAPKAN SEBAGAI LOKASI KUNJUNGAN (5423.001).....	194
Tabel III. 43 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DI LUAR KAWASAN KONSERVASI (5424.001).....	200



Daftar Gambar

Gambar III. 1 Luas Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya.....	21
Gambar III. 2 Kondisi Perambahan Kawasan Periode 2015 s/d 2019.....	36
Gambar III. 3 Komposisi Tenaga Pengamanan Hutan.....	47
Gambar III. 4 Jumlah Kasus tindak pidana kehutanan Balai Besar KSDA NTT 5 tahun terakhir	54
Gambar III. 5 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sesuai Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007.....	68
Gambar III. 6 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan RKW, sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur No. SK. K.5/TU/PEG/1/2020	69
Gambar III. 7 Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020.....	70
Gambar III. 8 Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan golongan s/d 31 Desember 2020.....	71
Gambar III. 9 Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020.....	72
Gambar III. 10 Peta Rencana Patroli CA Kimang Boleng.....	157
Gambar III. 11 Peta Rencana Patroli CA Maubesi	158
Gambar III. 12 Peta Rencana Patroli CA Mutis Timau	158
Gambar III. 13 Peta Rencana Patroli CA Riung	159
Gambar III. 14 Peta Rencana Patroli CA Wae Wuul.....	159
Gambar III. 15 Peta Rencana Patroli CA Watu Ata.....	160
Gambar III. 16 Peta Rencana Patroli CA Wolo Tadho.....	160
Gambar III. 17 Peta Rencana Patroli SM Ale Aisio	161
Gambar III. 18 Peta Rencana Patroli SM Ale Aisio	161
Gambar III. 19 Peta Rencana Patroli SM Egon Ilimedo	162
Gambar III. 20 Peta Rencana Patroli SM Harlu.....	162
Gambar III. 21 Peta Rencana Patroli SM Kateri.....	162
Gambar III. 22 Peta Rencana Patroli SM Perhatu.....	163
Gambar III. 23 Peta Rencana Patroli TB Bena	163
Gambar III. 24 Peta Rencana Patroli TB Pulau Ndana.....	164
Gambar III. 25 Peta Rencana Patroli TWA Menipo	164
Gambar III. 26 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Batang	165
Gambar III. 27 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Lapang	166
Gambar III. 28 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Rusa	166
Gambar III. 29 Peta Rencana Patroli TWA Ruteng.....	167
Gambar III. 30 Peta Rencana Patroli TWA Tuti Adagae.....	167
Gambar III. 31 Peta Rencana Patroli TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere.....	168
Gambar III. 32 Peta Rencana Patroli TWA 17 Pulau	168
Gambar III. 33 Peta Rencana Patroli TWA Baumata	169
Gambar III. 34 Peta Rencana Patroli CA Ndeta Kelikima.....	169
Gambar III. 35 Peta Rencana Patroli TWA Camplong.....	170
Gambar III. 36 Peta Rencana Patroli TWA Bipolo.....	170
Gambar III. 37 Peta Rencana Patroli TWAL Teluk Kupang	171



| **KAKA TUA
JAMBUL
KUNING/*Cacatua
Sulphurea***
Lokasi : SM Harlu
Rani Fatma Sari

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan **Rencana Strategis** Balai Besar Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Timur **2020-2024**. Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2020 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL

3. Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan enam indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

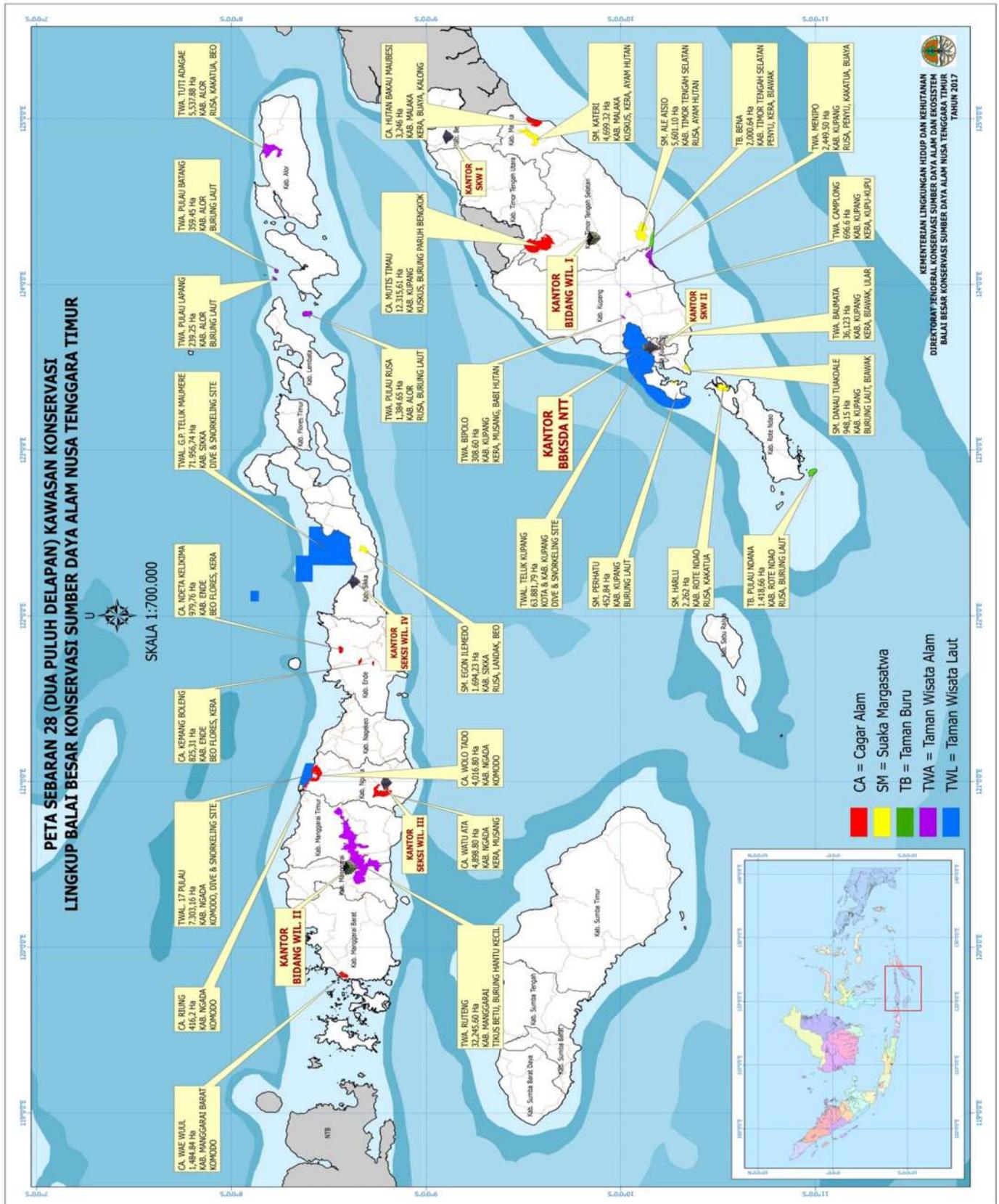
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, sebagaimana pagu alokasi anggaran tahun 2020, direncanakan sebesar Rp. 32.213.973.000,- (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.



| **Koloni Kalong**

**Lokasi : TWA
Menipo**

Apdon Amfoni





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2020 di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tahun awal Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJM sebelumnya.

Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur juga disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Disamping itu, Rencana Kerja Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau refocusing. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk menyinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu

pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

1. Kawasan Hutan Konservasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° - 12° LS dan 118° - 125° BT. Luas wilayah daratan NTT sekitar 47.350,00 km² atau 2,48 % luas daratan Indonesia, dan luas wilayah perairan sekitar 200.000 km² di luar perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (BPS NTT, 2015)

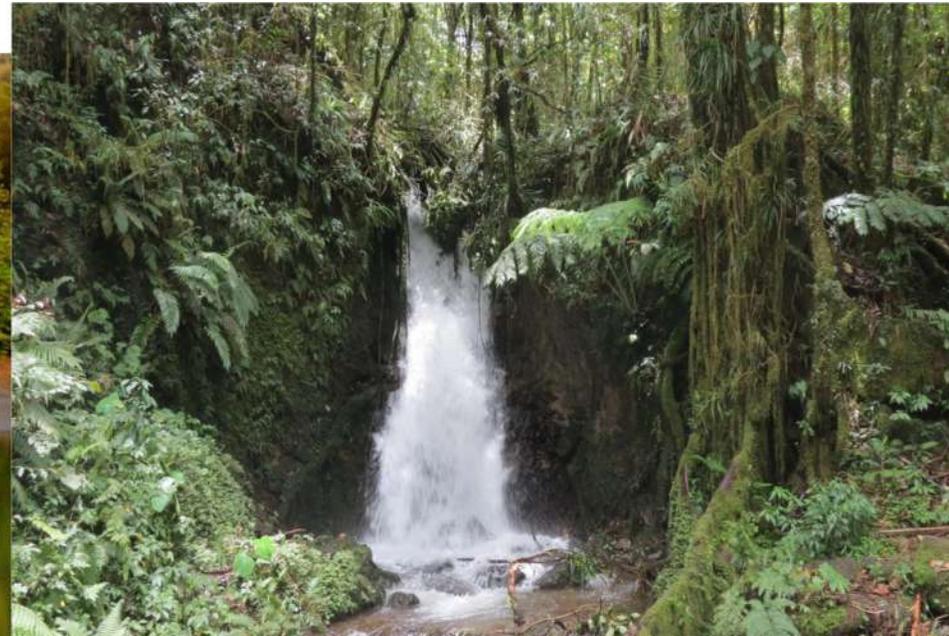
Jumlah pulau besar dan kecil di NTT sebanyak 1192 pulau, namun hanya 432 pulau yang sudah mempunyai nama dan memiliki koordinat jelas sehingga diketahui letaknya. Dari ribuan pulau tersebut, hanya 43 pulau yang berpenghuni tetap dan sisanya masih kosong. Berdasarkan luas wilayahnya, terdiri dari 5 (lima) pulau besar yakni pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata. Diantara pulau-pulau besar tersebut tersebar pulau-pulau kecil seperti pulau Adonara, Palue, Bidadari, Raijua, Rote, Sawu, Semau, Komodo, Rinca, dan Salura. Nusa Tenggara Timur memiliki 5 (lima) pulau terdepan yakni pulau Alor, Manggudu, Batek, Ndana Rote dan Ndana Sabu. Kelima pulau tersebut merupakan beranda selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara tetangga yakni Republik Demokrasi Timor Leste dan Australia

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan luas kawasan hutan di Nusa Tenggara Timur berturut-turut didominasi Hutan Lindung 38,35%, KSA/KPA/TB daratan dan perairan 28,95%, Hutan Produksi 16,59%, Hutan Produksi Terbatas 9,75% serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 6,37%.

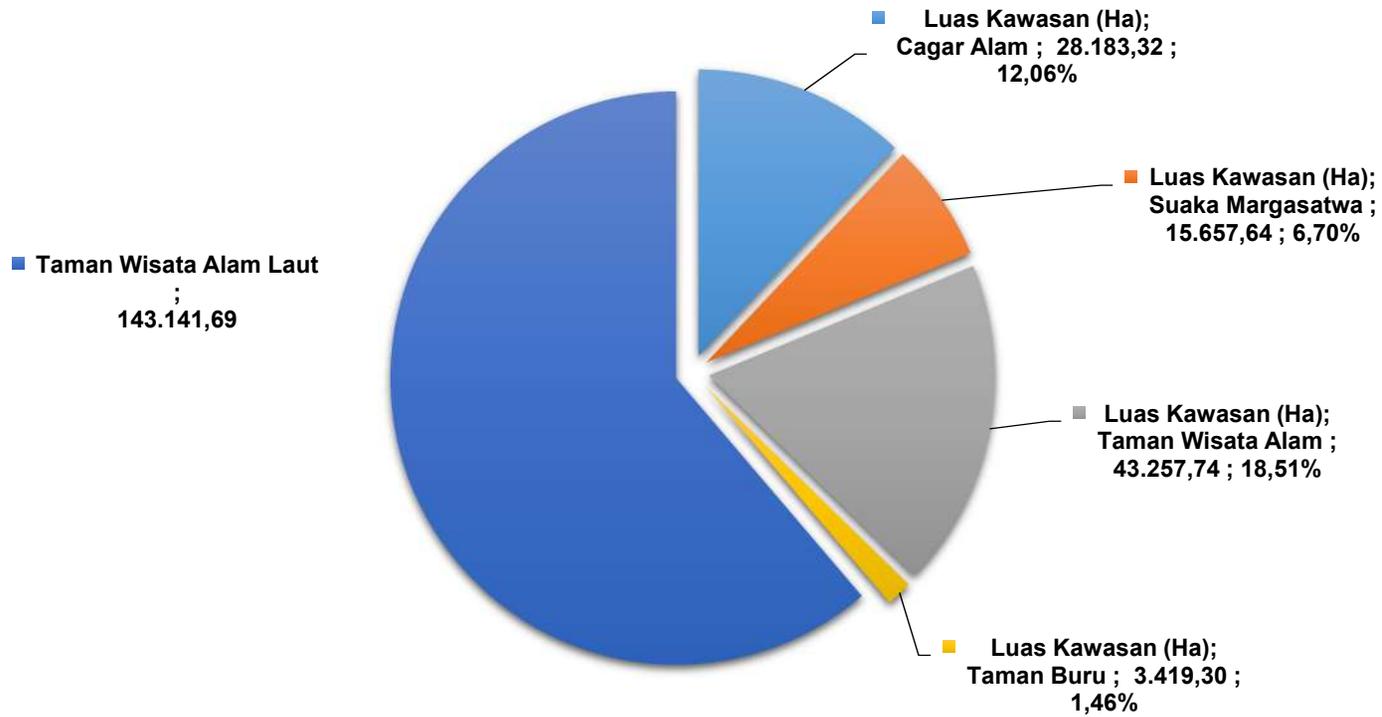


Tabel III. 1 Rekapitulasi Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya

URAIAN	JUMLAH KAWASAN	LUAS KAWASAN (HA)
1	2	3
Luas Hutan Konservasi Cagar Alam	8	28,183.32
Luas Hutan Konservasi Suaka Margasatwa	6	15,657.64
Luas Hutan Konservasi Taman Wisata Alam	9	43,257.74
Luas Hutan Konservasi Taman Buru	2	3,419.30
Luas Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Laut	3	143,141.69
Total	28	233,659.69



Gambar III. 1 Luas Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya



Tabel III. 2 Daftar Hutan Konservasi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
CAGAR ALAM							
1	CA	Watu Ata	Penetapan	Menhut No. 432/Kpts-II/1992	05 Mei 1992	4,898.80	Sesuai dengan SK penetapan
2	CA	Wolo Tadho	Penetapan	Menhut No. 429/Kpts-II/1992	05 Mei 1992	4,016.80	Sesuai dengan SK penetapan
3	CA	Wae Wuul	Penetapan	Menhut No. 427/Kpts-II/1996	09 Agt 1996	1,484.84	Sesuai dengan SK penetapan
4	CA	Hutan Bakau Maubesi	Penetapan	Menhut No.SK.687/Menhut-II/2009	16 Okt 2009	3,246.00	Sesuai dengan SK penetapan
5	CA	Mutis Timau	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	12,315.61	Tata batas fungsi tahun 2013, dokumen dalam proses pengesahan
6	CA	Ndeta Kelikima	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	979.76	
7	CA	Kemang Boleng	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	825.31	Tata batas fungsi tahun 2013, dokumen dalam proses pengesahan
8	CA	Riung	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	416.20	
TOTAL LUAS CAGAR ALAM						28,183.32	
SUAKA MARGASATWA							
9	SM	Kateri	Penetapan	Menhut No. SK.688/Menhut-II/2009	16 Okt 2009	4,699.32	Sesuai dengan SK penetapan
10	SM	Ale Aisio	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	5,601.10	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	SM	Danau Tuakdale	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	948.15	Tata batas tahun 2009 belum temu gelang
12	SM	Egon Ilimedo	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	1,694.23	Tata batas fungsi tahun 2012, dokumen dalam proses pengesahan
13	SM	Harlu	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	2,262	Tata batas fungsi tahun 2011 dan 2013, dokumen dalam proses pengesahan
14	SM	Perhatu	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	452.84	
TOTAL LUAS SUAKA MARGASATWA						15,657.64	
TAMAN WISATA ALAM							
15	TWA	Pulau Rusa	Penetapan	Menhut No. 8820/Kpts-II/2002	24 Sept 2002	1,384.65	Sesuai dengan SK penetapan
16	TWA	Camplong	Penetapan	Menhut No.SK.347/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	696.60	Sesuai dengan SK penetapan
17	TWA	Menipo	Penetapan	Menhut No.SK.348/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	2,449.50	Sesuai dengan SK penetapan
18	TWA	Ruteng	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	32,245.60	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
19	TWA	Tuti Adagae	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	5,537.88	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
20	TWA	Pulau Lapang	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	239.25	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	TWA	Pulau Batang	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	359.45	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
22	TWA	Baumata	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	36.21	Tata batas sementara tahun 2009, dijadikan acuan tata batas definitive
23	TWA	Bipolo	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	308.60	Tata batas fungsi tahun 2013, dokumen dalam proses pengesahan
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM						43,257.74	
TAMAN WISATA ALAM LAUT							
24	TWAL	Tujuh Belas Pulau	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	7303.16	
25	TWAL	Teluk Kupang	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	63,881.79	
26	TWAL	Gugus Pulau Teluk Maumere	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	71,956.74	Tata batas belum tuntas, wilayah darat tahun 2012, wilayah laut belum.
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM LAUT						143,141.69	
TAMAN BURU							
27	TB	Bena	Penetapan	Menhut No. 74/Kpts-II/1996	27 Feb 1996	2,000.64	Sesuai dengan SK penetapan
28	TB	Pulau Ndana	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	1,418.66	Tata batas fungsi tahun 2011, dokumen dalam proses pengesahan
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM LAUT						3,419.30	
TOTAL LUAS KAWASAN BALAI BESAR KSDA NTT						233,659.69	

Tabel III. 3 Daftar KPHK pada Hutan Konservasi

NO	Nama KPHK	Wilayah Kerja
1	2	3
1	Gunung Mutis	CA Mutis
2	Ndeta Kelikima	CA Ndeta Kelikima, CA Kimang Boleng
3	Tuti Adagae	TWA Tuti Adagae, TWA Pulau Lapang, TWA Pulau Batang, TWA Pulau Rusa
4	Teluk Kupang	TWAL Teluk Kupang, SM Danau Tuadale, TWA Baumata, SM Perhatu
5	Wae Wuul	CA Wae Wuul
6	Harlu	SM Harlu, TB Pulau Ndana
7	Teluk Maumere	TWAL GPT Maumere, SM Egon Ilimedo
8	Watu Ata	CA Watu Ata
9	Camplong	TWA Camplong , TWA Bipolo
10	Ale Aisio	SM Ale Aisio, TB Bena, TWA Menipo
11	Ruteng	TWA Ruteng
12	Kateri	SM Kateri, CA Hutan Bakau Maubesi
13	Riung	CA Wolo Tadho, CA Riung, TWAL 17 Pulau



Tabel III. 4 Daftar Kawasan yang ditetapkan sebagai Target Peningkatan Nilai METT

No.	Kawasan	Keterangan
1	2	3
1	CA Mutis	
2	CA Watu Ata	
3	CA Wolo Tadho	
4	CA Riung	
5	CA Wae Wuul	
6	CA Maubesi	
7	SM Harlu	
8	SM Ale Aisio	
9	SM Kateri	
10	SM Egon Ilimeddo	
11	TWAL Tujuh Belas Pulau	
12	TWA Ruteng	
13	TWA Baumata	
14	TWA Camplong	
15	TWA Menipo	
16	TWAL GPT Maumere	



Tabel III. 5 Hasil Penilaian METT Hutan Konservasi Prioritas Lingkup Balai Besar KSDA NTT

No	Kawasan	Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Keterangan
		Nilai	Skor METT							
1	2	3	4	5	6					7
1	CA Maubesi	42	44%	51	52%	-		79	78%	Nilai Meningkatkan
2	CA Mutis	37	41%	37	41%	-		-	-	Nilai Tetap
3	CA Riung	26	35%	22	28%	-		-	-	Nilai Menurun
4	CA Wae Wuul	36	47%	39	51%	-		56	53%	Nilai Meningkatkan
5	CA Watu Ata	31	33%	28	35%	-		-	-	Nilai Menurun
6	CA Wolo Tadho	34	44%	30	38%	-		38	53%	Nilai Meningkatkan
7	SM Ale Aisio	34	44%	44	51%	-		56	62%	Nilai Meningkatkan
8	SM Egon Ilimedo	32	42%	38	48%	-		50	63%	Nilai Meningkatkan
9	SM Harlu	35	44%	45	55%	-		56	66%	Nilai Meningkatkan
10	SM Kateri	36	46%	34	45%	-		-	-	Nilai Menurun
11	TWA Ruteng	51	55%	63	66%	72	76%	72	76%	Nilai Meningkatkan
12	TWAL Tujuh Belas Pulau	34	53%	34	53%	-		-	-	Nilai Tetap
13	TWA Baumata	-	-	44	48%	-		-	-	Usulan Penilaian Pertama
14	TWA Camplong	-	-	55	60%	64	69%	67	72%	Nilai Meningkatkan
15	TWA Menipo	-	-	51	55%	62	67%	67	72%	Nilai Meningkatkan
16	TWAL GPT Maumere	-	-	36	38%	-		-	-	Usulan Penilaian Pertama
	Rata-Rata	35,67	43,83%	40,69	47,75%	66,00	70,67%	60,11	66,11%	

Tabel III. 6 Rencana Pengelolaan Kawasan

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Periode Rencana	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	CA Gunung Mutis	-	-	-	
2	CA Kimang Boleng	-	-	-	
3	CA Maubesi	2018	2019-2029	27 Mei 2019	SK.214/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019
4	CA Wae Wuul	-	-	-	
5	CA Watu Ata	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
6	CA Wolo Tado	-	-	-	
7	CA Ndeta Kelikima	-	-	-	
8	CAL Riung	-	-	-	
9	SM Ale Asio	2018	2019-2028	27 Mei 2019	SK.212/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019
10	SM Danau Tuadale	-	-	-	
11	SM Harlu	2016	2017-2026	22 Desember 2017	SK.473/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 Disahkan ditahun berikutnya
12	SM Kateri	-	-	-	
13	SM Perhatu	-	-	-	
14	SM Egon Ilimedo	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
15	TB Dataran Bena	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
16	TB Pulau Ndana	-	-	-	
17	TWA Baumata	2016	2017-2026	20 Oktober 2017	SK.365/KSDAE/SET/KUM.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
18	TWA Bipolo	-	-	-	
19	TWA Camplong	2016	2017-2026	20 Oktober 2017	SK.350/KSDAE/SET/KUM.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
20	TWA Pulau Batang	-	-	-	

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Periode Rencana	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21	TWA Pulau Lapang	-	-	-	
22	TWA Menipo	2016	2017-2026	29 November 2017	SK.350/KSDAE/SET/KSA.1/9/2017 Disahkan ditahun berikutnya
23	TWA Pulau Rusa	-	-	-	
24	TWA Ruteng	2015	2015-2024	29 Agustus 2016	SK.239/KSDAE/SET/KSA.1/8/2016 Disahkan ditahun berikutnya
25	TWA Tuti Adagae	-	-	-	
26	TWAL 17 Pulau Riung	2016	2017-2026	29 November 2017	SK.351/KSDAE/SET/KSA.1/11/2017 Disahkan ditahun berikutnya
27	TWAL GPT Maumere	2016	2017-2026	24 Oktober 2017	SK.372/KSDAE/SET/KSA.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
28	TWAL Teluk Kupang	2017	2018-2027	6 April 2018	SK.178/KSDAE/SET/KSA.1/4/2018 Disahkan 16 April 2018



Tabel III. 7 Rencana Penataan Blok

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	CA Gunung Mutis	-	-	-
2	CA Kimang Boleng	2019	Dalam Proses	S.1481/K.5/BIDTEK/KSA/12/2019
3	CA Maubesi	2017	22 Januari 2018	SK.38/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018
4	CA Wae Wuul	2017	17 Januari 2018	SK.29/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018
5	CA Ndeti Kelikima	-	-	-
6	CA Watu Ata	2018	-	Dalam proses pengesahan
7	CA Wolo Tadho	2018	-	Dalam proses pengesahan
8	CAL Riung	-	-	-
9	SM Ale Asio	2016	17 November 2017	SK.405/KSDAE/SET/KSA.0/11/2017
10	SM Danau Tuadale	-	-	-
11	SM Harlu	2016	22 November 2017	SK.400/KSDAE/SET/KSA.0/11/2017
12	SM Perhatu	-	-	-
13	SM Egon Ilimedo	2017	16 Januari 2018	SK.11/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018
14	SM Kateri	2018	-	Dalam proses pengesahan
15	TB Dataran Bena	2017	16 Januari 2018	SK.3/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018
16	TB Pulau Ndana	2019	Dalam Proses	Dalam proses pengesahan
17	TWA Baumata	2015	22 Maret 2016	SK.94/ KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016
18	TWA Camplong	2015	14 Maret 2016	SK.78/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016
19	TWA Bipolo	2018	-	Dalam proses pengesahan

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
20	TWA Pulau Batang	2019	Dalam Proses	Dalam proses pengesahan
21	TWA Pulau Lapang	2019	Dalam Proses	Dalam proses pengesahan
22	TWA Pulau Menipo	2015	14 Maret 2016	SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016
23	TWA Pulau Rusa	2019	Dalam Proses	Dalam proses pengesahan
24	TWA Ruteng	2015	20 Juli 2016	SK.208/KSDAE/SET/KSA.0/7/2016
25	TWA Tuti Adagae	2019	Dalam Proses	Dalam proses pengesahan
26	TWAL 17 Pulau Riung	2015	22 Maret 2016	SK.96/ KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016
27	TWAL GPT Maumere	2015	22 Maret 2016	SK.95/ KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2016
28	TWAL Teluk Kupang	2017	22 November 2017	SK.424/ KSDAE/SET/KSDAE.0/3/2017



Tabel III. 8 Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TWA Baumata	2019	Dalam Proses	S.1483/K.5/BIDTEK/KSA/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019
2	TWA Bipolo	-	-	-
3	TWA Egon Ilimedo	-	-	-
4	TWA Pulau Batang	-	-	-
5	TWA Pulau Lapang	-	-	-
6	TWA Pulau Menipo	2017	-	Dalam proses Dit PJLHK
7	TWA Pulau Rusa	-	-	-
8	TWA Ruteng	2014	13 Oktober 2015	SK.71/PJLHK/PJLWA/KSA.3/10/2016
9	TWA Tuti Adagae	-	-	-
10	TWAL 17 Pulau Riung	2014	25 Juli 2015	SK.50/PJLHK/PJLWA/KSA.3/7/2016
11	TWAL GPT Maumere	2017	-	Dalam proses Dit PJLHK
12	TWAL Teluk Kupang	2017	-	Dalam proses Dit PJLHK
13	TWA Camplong	2018	-	Dalam proses Dit PJLHK

Tabel III. 9 Dokumen DED pada Taman Wisata Alam

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TWA Menipo	2017	17 Oktober 2017	-
2	TWA Camplong	2017	17 Oktober 2017	-
3	TWA Ruteng	2017	28 September 2017	-
4	TWA 17 Pulau	2017	28 September 2017	-



Tabel III. 10 Perambahan Kawasan

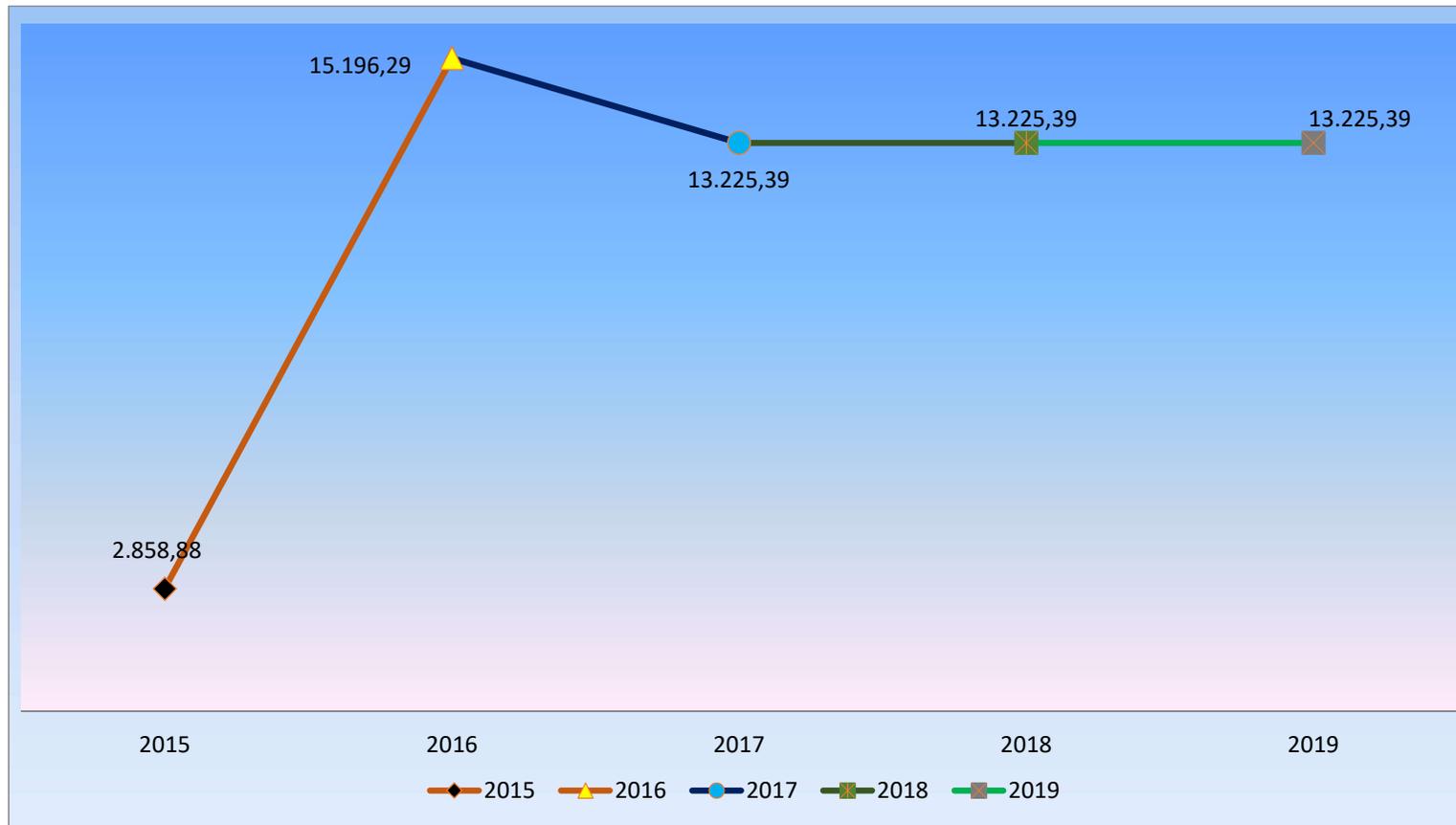
No	Kawasan	Luas Perambahan (Ha)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CA Gunung Mutis	46	46.00	46.00	46.00	46.00	
2	CA Watu Ata	27,6	1,793.21	1.793.21	1.793.21	1.793.21	
3	CA Wolo Tado	0,52	83.00	83.00	83.00	83.00	
4	CA Kimang Boleng	838,51	133.00	133.00	133.00	133.00	
5	CA. Ndeta Keiikima	379,50	379.50	379.00	379.00	379.00	
6	CA. Waewuul	-	14.10	14.10	14.10	14.10	
7	CA. Riung	-	53.00	53.00	53.00	53.00	
8	SM Kateri	1557,18	2,426.00	455,10	455,10	455,10	
9	SM Egon Ilimedo	-	0	0	0	0	
10	SM Harlu	-	30.00	30.00	30.00	30.00	
11	TWA Camplong	-	0.1	0.1	0.1	0.1	
12	TWA Ruteng	5,72	3,976.16	3,976.16	3,976.16	3,976.16	
13	TWA Tuti Adegae	3,85	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	
14	TWA Pulau Lapang	-	5.00	5.00	5.00	5.00	

No	Kawasan	Luas Perambahan (Ha)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	TWA GPT Maumere	-	4,949.72	4,949.72	4,949.72	4,949.72	
16	TWA 17 Pulau	-	0.50	0.50	0.50	0.50	
Jumlah		2,858.88	15,196.29	13,225.39	13,225.39	13,225.39	

Sesuai surat Kepala BBKSDA NTT Nomor : S.1075/K.5/BIDTEK/KSA/11/2016 Tanggal 18 November 2016 Hal Rekapitulasi keterlanjuran Penggunaan Kawasan Konservasi



Gambar III. 2 Kondisi Perambahan Kawasan Periode 2015 s/d 2019



Tabel III. 11 Daerah Penyangga Hutan Konservasi

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
I	Bidang KSDA Wil I				
1	TWAL Teluk Kupang	Kab Kupang	Kupang Barat	Tablong	35ds
				Tesabela	
				Lifuleo	
				Bolok	
			Semau	Uiasa	
				Hansisi	
				Bokonusan	
			Kupang Tengah	Tarus	
				Noelbaki	
				Oebelo	
			Kupang Timur	Oesao	
				Baubau	
				Naibonat	
				Nunkurus	
				Merdeka	
				Tuapukan	
			Sulamu	Pariti	
				Sulamu	
		Oeteta			
		Pit'ai			
Bipolo					
Kota Kupang	Alak	Namosain			
		Alak			
		Nunhila			

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Fatufeto	
				Nunbaun Sabu	
				Nunbau Delha	
			Kelapa Lima	Oesapa	
				Kelapa Lima	
				Pasir Panjang	
				Lasiana	
				Oeba	
				Solor	
				Todekiser	
				Lailai Besi Koepan	
2	TWA Baumata	Kupang	Taibenu	Oelnasi	5 ds
				Neketuka	
				Oeltua	
				Kuaklalo	
				Bokong	
3	TWA Camplong	Kupang	Fatuleu	Camplong I	5 ds
				Camplong II	
				Naunu	
				Silu	
				Oebola Dalam	Enclave
4	TWA Bipolo	Kupang	Sulamu	Pariti	4 ds
				Nunkurus	
				Bipolo	
				Oeteta	
5	TWA Pulau Menipo	Kupang	Amarasi Timur	Enoraen	1 ds
6	CA Hutan Bakau	Belu	Malaka Tengah	Kletek	16 ds

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Maubesi			Fahiluka	
				Harakakae	
			Kobalima	Lakekun Barat	
				Lakekun	
				Lakekun Utara	
				Litamali	
				Sisi	
				Rai Nawe	
				Alas Selatan	
				Babulu Selatan	
				Babulu	
				Alar	
				Kotabiru	
				Alas Utara	
				Kobalima timur	
7	CA Mutis Timau	TTS	Fatumnasi	Fatumnasi	12 ds
				Nenas	
				Mutis	
				Nuapin	
			Tobu	Tutem	
				Pubasu	
				Tune	Enclave
				Saubalan	
		TTU	Miomaffo Barat	Fatuneno	
				Saenam	
				Noepesu	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				manusasi	
8	SM Kateri	Kab. Malaka	Malaka Tengah	Kateri	9 ds
				Umakatahan	
				Wehali	
				Kamanasa	
				Bakiruk	
				Barada	
				Umanen Lawalu	
			Kobalima	Lakekun Barat	
Sasi Tamean	Kereana				
9	SM Perhatu	Kupang	Semau	Semau	2 ds
				Hansisi	
10	SM Danau Tuadale	Kupang	Kupang Barat	Lifuleo	4 ds
				Tablolong	
				Sumlili	
				Tesabela	
11	SM Ale Aisio	TTS	Amanuban Selatan	Bena	8 ds
				Oebelo	
				Oekiu	
				Noemuke	
			Kualin	Batnun	
				Kiufatu	
				Toineke	
				Nunusunu	
12	SM Harlu	Rote Ndao	Landu Leko	Daiama	4 ds
				Daeurendale	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Pukuafu	
				Tenalai	
13	TB Bena	TTS	Amanuban Selatan	Bena	2 ds
				Oebelo	
14	TB Ndana	Rote Ndao	Rote Barat Daya	Oenggauk	8 ds
				Nemberala	
				Sedeoen	
				Bo'a	
				Oeseli	
				Oebou	
				Batutua	
				Oetefu	
II	Bidang KSDA Wil II				
15	TWA Tuti Adagae	Alor	Alor Timur Laut	Taramana	7 ds
				Air Mancur	Enclave
				Kamot	Enclave
				Waisika	Enclave
				Nailang	
				Pido	
				Kenarimbala	Enclave
16	TWA Pulau Rusa	Alor	Pantar Barat Laut	Marica	4 ds
				Alumang	
				Kayang	
				Beang Onong	
17	TWA Pulau Batang	Alor	Pantar Barat	Bilang Merang	2 ds
				Baraler	
18	TWA Pulau Lapang	Alor	Pantar Barat	Baranusa	2 ds

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Leer / Baraleer	
19	TWA Ruteng	Manggarai	Langke Rembong	Carep	73 ds / kelurahan
				Tenda	
				Waso	
				Golo Dukal	
				Pau	
				Watu	
			Wae Ri'i	Wae Ri'i	
				Longko	
				Ranaka	
			Ruteng	Poco Likang	
				Cumbi	
				Bangka Lao	
			Satar Mese	Jaong	
				Golo Lambo	
				Ngkaer	
				Pongkor	
				Ulu Belang	
				Umung	
				Lungar	
				Mocok	
				Gara	
				Golo Muntas	
		Koak			
Tado					
Langgo					
Manggarai	Poco Ranaka	Golo lobos			

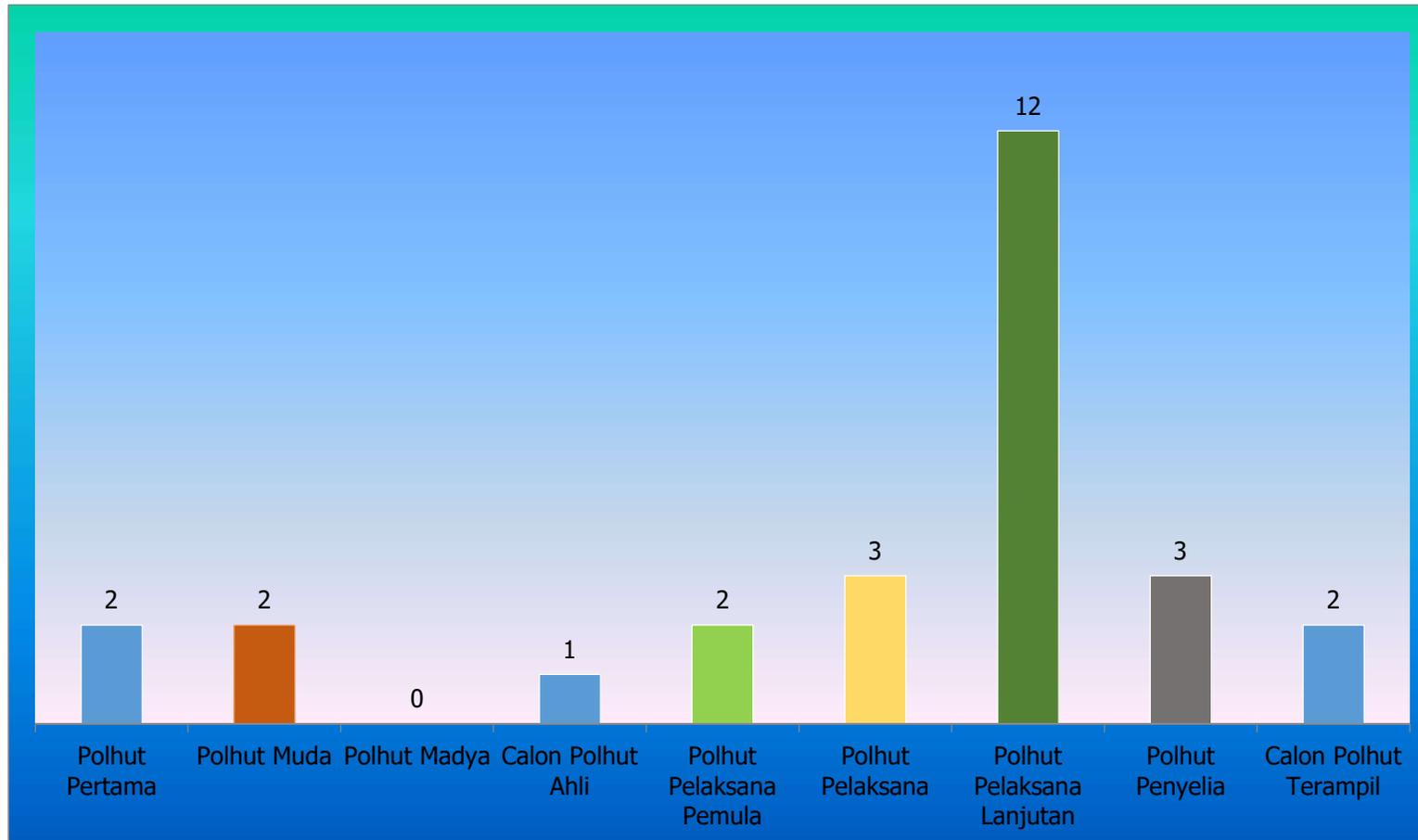
No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
		Timur		Kel. Mandosawu	
				Bangka Pau	
				Kel. Nggalak Ieleng	
				Golo Nderu	
				Ngkiong Dora	
				Urung Dora	
				Rende Nao	Enclave Tangkul
				Ulu Wae	
				Colol	
				Pocolia	
				Wejang Mawe	
				Wejang Mali	
			Borong	Benteng Riwu	
				Golo Lalong	
				Gurung Liwut	
				Golo Leda	
				Waling	
				Golo Meleng	
				Compang Teber	
				Golo Rutuk	
				Bangka Kempo	
				Compang Loni	
				Bangka Loni	Enclave Caring
				Golo Lani	
				Sita	
				Sano Lokom	
			Rana Mese		

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Rondo Woing	
				Golo Ros	Enclave Ros
				Torok Golo	
				Satar Lahing	
				Bea Ngencung	
			Sambi Rampas	Satar nawang	
				compang lawi	
				compang congkar	Enclave Rewas
			Kota Komba	Mokel	
				Golo Meni	
				Golo Nderu	
			Elar	Golo Wuas	
				Benteng Pau	
				Teno Mese	
				Golo Linus	
				Kel. Lempang Haji	
				Sangan Kalo	
				Golo Munde	
				Rana Gapang	
Haju Ngendong					
20	CA Wae Wuul	Manggarai Barat	Komodo	Warloka	2 ds
				Macang Tanggar	
21	SM Egon Ilimedo	Sikka	Waigete	Hoder	15 ds
				Egon	
			Mapitara	Egon Gahar	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Natakoli	
			Doreng	Kloangpopot	
				Wolomotong	
				Watumerak	
				Wogalirit	
22	TWAL GPT Maumere	Sikka	Alok	Pemana	17 ds
				Gunung Sari	
				Samparong	
			Alok Timur	Koja doi	
				Koja gete	
				Parumaan	
			Kewapante	Waiara	
			Waigete	Wairbleler	
				Egon	
				Hoder	
				Nangatobong	
				Wairterang	
			Talibura	Runut	
				Nangahale	
Talibura					
Darat Pantai					
23	CA Wolo Tadho	Ngada	Riung	Bangkoor	
				Rawang Kalo	7 ds
				Taen Torong	
				Nanga Mese	
				Benteng Tengah	
Tadho					

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Latung	
				Wangka	
24	CA Riung	Ngada	Riung	Latung	2 ds
				Sambinasi	
25	TWAL 17 Pulau Riung	Ngada	Riung	Nangamese	3 ds
				Lengko Sambu	
				Tadho	
26	CA Watu Ata	Ngada	Bajawa	Bajawa	8 ds
				Bomari	
				Naru	
				Susu	
				Beiwali	
				Wawowae	
			Aimere	Keligejo	
				Aimere Timur	
27	CA Kimang Boleng	Ende	Ende	Wologai Tengah	5 kec
			Detusoko	Mbotulaka	
			Nanga Panda		
			Maurole		
			Wolo Waru		
28	CA Ndeta Kelikima	Ende	Hangal Ade		2 ds
			Tiwusora		

Gambar III. 3 Komposisi Tenaga Pengamanan Hutan



Tabel III. 12 Sebaran Tenaga Polisi Kehutanan BBKSDA NTT Tahun 2019

	POLHUT									Jumlah
	Polhut Ahli				Polhut Terampil					
	Pertama	Muda	Madya	Calon Polhut	Pelaksana Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Calon Polhut	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kantor Balai	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
Bidang KSDA Wil I	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SKW I	-	-	-	-	1	1	2	1	1	6
SKW II	-	-	-	-	-	-	6	1	1	8
Bidang KSDA Wil II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SKW III	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4
SKW IV	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3
Jumlah	2	2	0	1	2	3	12	3	2	27



Tabel III. 13 Kondisi Sarana Prasarana Pengamanan

No	Jenis Sarana	Jumah	Kondisi
1	2	3	4
1	Senjata Genggam (Pistol)	4 buah	Baik
2	Senapan Semi Otomatis (PM1A1)	25 buah	Baik
3	Mobil Patroli	11 buah	Baik
4	Sepeda Motor Patroli	68 buah	Kondisi Baik 32 unit, kondisi rusak berat 36 buah
5	Speed boat / Motor Tempel	6 buah	Baik
6	Perahu Kayu	4 buah	Baik
6	Pos jaga	26 buah	Permanen 18 unit (kondisi baik), Semi Permanen 1 unit (kondisi baik 1 unit), Darurat 4 unit (kondisi baik), lainnya 3 unit (kondisi baik)
7	Menara pengintai	1 buah	Rusak Berat



Tabel III. 14 Register kasus tindak pidana kehutanan Balai Besar KSDA NTT Tahun 2019

No	Jenis Kasus/Pasal yg Dilanggar Pidana	Laporan Kejadian	Tim Penyidik	TAHAPAN PENANGANAN				Keterangan
				BAP			TKP	
				Saksi	Ahli	TRLPR/TS K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menangkap satwa yang dilindungi (Penyu Sisik) dalam keadaan hidup melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990	LP/12/II/2019 Ditpolair tanggal 21 Februari 2019	Penyidik Gakum Polair Polda NTT	Fernando P, Anggi Widhi	Agusthinus Djami Koreh	Wanda Jamadang	Desa Lewomada Kab. Sikka	Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Gakum Polair Polda NTT
2	Menangkap satwa yang dilindungi (Penyu Sisik) dalam keadaan hidup melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990	LP/13/II/2019 Ditpolair tanggal 21 Februari 2019	Penyidik Gakum Polair Polda NTT	Ira Sigit Pradikta, Mitra B. Rotikan	Agusthinus Djami Koreh	Sumaila	Desa Lewomada Kab. Sikka	Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Gakum Polair Polda NTT
3	Melakukan pembukaan lahan untuk tambak garam di SM Danau Tuadale melanggar pasal 19 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1990, pasal 50 ayat 3 huruf b jo	Maret 2019			Tim BPKH Wil. IX Kupang	Korem 161 Wirasakti Kupang	SM. Danau Tuadale	- BBKSDA NTT, SKW II dan BPKH Wil. XIV Kupang melakukan peninjauan lokasi dan berkoordinasi dengan pihak Korem. Dari hasil telaah oleh BPKH bahwa lokasi berada dalam kawasan SM Danau Tuadale. - Pihak Korem 161 Wirasakti Kupang menghormati hasil telaah yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XIV Kupang

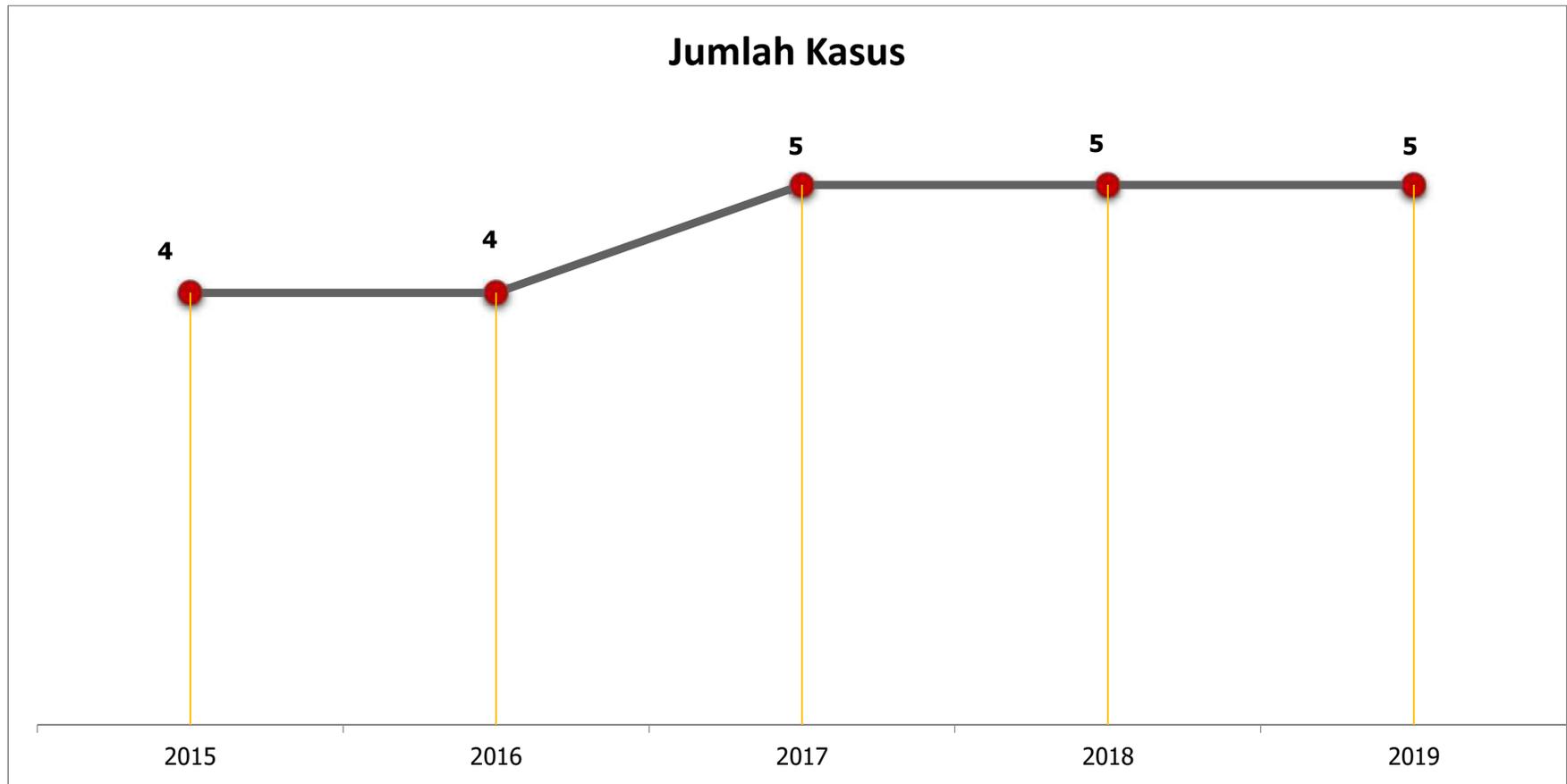
No	Jenis Kasus/Pasal yg Dilanggar Pidana	Laporan Kejadian	Tim Penyidik	TAHAPAN PENANGANAN				Keterangan	
				BAP			TKP		
				Saksi	Ahli	TRLPR/TS K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	pasal 78 ayat 2 dan 8 UU Nomor 41 Tahun 1999								- Namun pada lokasi tersebut terjadi fenomena alam dimana lokasi tambak garam tertutup seluruhnya oleh pasir yang berasal dari pesisir pantai akibat tiupan angin kencang dari arah selatan/laut. Tidak terdapat aktifitas lanjutan di lokasi tersebut
4	Melakukan pembukaan jalan di SM Danau Tuadale melanggar pasal 19 ayat 1 jo pasal 40 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1990, pasal 50 ayat 3 huruf b jo pasal 78 ayat 2 dan 8 UU Nomor 41 Tahun 1999	April 2019			Tim BPKH Wil. IX Kupang	Brimob Polda NTT	SM. Danau Tuadale		- Peninjauan dan Pengecekan Lokasi Hibah Tanah oleh petugas BPKH Wilayah XIV Kupang, Balai Besar KSDA NTT, Satbrimob Polda NTT dan BPN Kabupaten Kupang, disaksikan oleh Kasat Brimob Polda NTT, Balai Besar KSDA NTT/SKW II, Camat Kupang Barat, Sekretaris Desa Lifuleo dan keluarga Tuy selaku pemberi hibah - Hasil pengukuran dilapangan dengan luas 10,05 Ha, dimana 5,19 Ha berada dalam kawasan dan 4,86 Ha berada di luar kawasan. Berdasarkan pemaparan tersebut rapat memutuskan untuk melakukan hibah lokasi/lahan baru yang berada diluar kawasan SM Danau Tuadale oleh keluarga Tuy kepada Satbrimob Polda NTT
5	Menangkap dan membunuh satwa dilindungi (Rusa Timor) melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a	LK.01/K.5/BK W.I/SKW.I/K SA/04/2019	PPNS Gakum	Herry Selandkk	Mugi Kurniawan	Daud Sayuna dkk	Desa Bena		Proses Lidik dan sidik oleh PPNS Seksi Wilayah III Gakum Balinusra.

No	Jenis Kasus/Pasal yg Dilanggar Pidana	Laporan Kejadian	Tim Penyidik	TAHAPAN PENANGANAN				Keterangan
				BAP			TKP	
				Saksi	Ahli	TRLPR/TS K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UU Nomor 5 Tahun 1990							
6	Menangkap satwa yang dilindungi berupa Penyu Lekang (1 ekor) melanggar pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990	B/160/V/2019/ Ditpolairud tgl 25 Mei 2019	Penyidik Gakum Polair Polda NTT		Elisa Iswando no	Dominggus Vincente	Kelapa Tinggi Noelbaki	Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Gakum Polair Polda NTT
7	Penjualan tanah yang diduga berada dalam kawasan	Desember 2019			Tim BPKH Wil. IX Kupang	Johan Tuy dan Polda NTT	SM. Danau Tuadale	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan rapat dari Karo Logistik Polda NTT terkait pembahasan status hak/kepemilikan lahan yang berada di RT 011/ RW 005 Dusun Lifuleo yang akan dijual kepada anggota Polda NTT. - Rapat di pimpin oleh Karo Logistik Polda NTT, Peserta rapat antara lain BPN Propinsi NTT, BPN Kabupaten Kupang, Anggota Satuan Brimob Polda NTT, Anggota Dit.Intelkam Polda NTT, Irwasda Polda NTT, BPKH Wilayah XIV Kupang, Balai Besar KSDA NTT, Camat Kupang Barat, dan keluarga Tuy. Pada rapat tersebut pihak BPKH Wilayah XIV Kupang dan Balai Besar KSDA NTT menyampaikan informasi terkait keberadaan kawasan SM Tuadale

No	Jenis Kasus/Pasal yg Dilanggar Pidana	Laporan Kejadian	Tim Penyidik	TAHAPAN PENANGANAN				Keterangan
				BAP			TKP	
				Saksi	Ahli	TRLPR/TS K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								yang berada di desa Lifuleo, disarankan agar apabila ada rencana penjualan/hibah lahan milik masyarakat di Desa Lifuleo, sebaiknya dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan letak lokasi apakan berada di dalam atau diluar kawasan untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari. Pihak Irwasda Polda NTT dan Camat Kupang Barat juga menyarankan untuk dilakukan peninjauan lapangan pada lokasi dimaksud. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat, diputuskan untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi hibah/ lokasi lahan yang akan dijual oleh keluarga Tuy kepada Personil Polda NTT oleh tim terpadu



Gambar III. 4 Jumlah Kasus tindak pidana kehutanan Balai Besar KSDA NTT 5 tahun terakhir



Tabel III. 15 Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Pengangkut Alat Pemadam	2 Unit	
2	Skop	40 buah	
3	Garu	40 buah	
4	Gapyok	40 buah	
5	Golok	70 buah	
6	Sepatu boot	25 pasang	
7	Sarung tangan	160 pasang	
8	Pompa jinjing	3 buah	
9	Selang/hoze	100 meter	
10	Topi (Helmet)	30 buah	
11	Lampu Kepala (Headlamp)	30 buah	
12	Kacamata (Gogle)	30 buah	
13	Kain Penutup mulut & Leher	30 buah	
14	Sarung Tangan	30 buah	
15	Sabuk Perlengkapan (Kopel Rim)	30 buah	
16	Tempat air/Peples	36 buah	
17	Sepatu (Boot)	30 buah	
18	Pakaian Pelindung	30 buah	
19	Gepyok Pemukul api	60 buah	
20	Pompa Punggung	50 buah	

Catatan : hampir seluruh sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sudah ditempatkan di Resort Konservasi Wilayah

Tabel III. 16 Kebakaran Hutan pada Kawasan Hutan Konservasi Periode Tahun 2015-2019

No	Lokasi Kebakaran	Luas Kebakaran (ha)					Lokasi
		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CA Mutis Timau	38	5	5	3.620	260.1	
2	CA Wae Wuul	-	5.82 5.77	65.3	-	40.6	
3	CA Maubesi	-	-	-	0.0006	-	
4	CA Watu Ata	-	-	0.75	0.750	-	
5	CA Wolo Tado	-	5.14	24.08	1.500	-	
6	CA Riung	-	-	2.12	2	-	
7	TB Dataran Bena	19	-	35.79	1.520	-	
8	TWA Menipo	-	-	-	-	-	
9	TWA Baumata	2.5	-	0.2	0.020	1	
10	TWA Bipolo	0.02	-	-	0.001	1	
11	TWA Ruteng	-	-	-	1	6.7	
12	TWA Camplong	1	-	0.005	0.237	10.752	
13	TWAL Tujuh Belas Pulau	-	-	-	-	-	
14	SM Kateri	2.7	-	-	4.731	-	

No	Lokasi Kebakaran	Luas Kebakaran (ha)					Lokasi
		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	SM Perhatu	-	0.003	-	-	-	
16	SM Tuakdale	-	0.001	-	-	-	
17	SM HARLU	-	-	-	0.001	-	
18	TWA Pulau Rusa	-	-	-	-	8	
19	TWA Pulau Lapang	-	-	-	-	2	
20	TWA Tuti Adagae	-	-	-	-	10	
Total Luas		63.22	21.734	133.25	15.38	340.152	



Tabel III. 17 Kelompok Masyarakat Peduli Api

No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
I.	BIDANG KSDA WILAYAH I		
1	MPA “PANAT PAH” di Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang / RKW TWA Camplong Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	MPA di Desa Daiama, Kecamatan Landuleko, Kab Rote Ndao / RKW SM Harlu Jumlah : 30 orang	2013	Membantu upaya pengendalian kebakaran di sekitar kawasan
3	MPA di Desa Toineke, Kec. Kualin, Kab. TTS / RKW TB Benadan SM Ale Aisio Jumlah : 30 orang	2012	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4	MPA di Desa Lekun Barat, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu / RKW SM Kateri Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
5	MPA di Desa Fatumnasi, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS / RKW CA Mutis Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
II.	BIDANG KSDA WILAYAH II		
1	MPA Wae Wuul/CA Wae Wuul	2010	Melapor, mencegah dan memadamkan api
No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
2	MPA Riung / TWA Tujuh Belas Pulau, CA Riung, dan CA Wolo Tadho	2010	Melapor, mencegah dan memadamkan api

3	MPA Watu Ata / CA Watu Ata	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api
4	MPA Egon Lestari / SM Egon Ilemedo	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api
5	MPA Koja Doi / TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api



Tabel III. 18 Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
1	MMP RKW CA HUTAN BAKAU MAUBESI	12 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
2	MMP RKW SM KATERI	9 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
3	MMP RKW CA MUTIS TIMAU	8 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
4	MMP RKW SM ALE AISIO dan TB BENA	28 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
5	MMP RKW TWA MENIPO	19 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
6	MMP TWA BAUMATA, TWAL TELUK KUPANG, SM DANAU TUADALE, dan SM PERHATU	26 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
7	MMP RKW TWA CAMPLONG	19 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
8	MMP RKW TWA BIPOLO	26 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
9	MMP RKW SM HARLU	5 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
10	MMP RKW CA WAE WUUL	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
11	MMP RKW TWA RUTENG I	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
12	MMP RKW TWA RUTENG II	21 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
13	MMP RKW TWA RUTENG III	21 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT

14	MMP RKW TWA RUTENG IV	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
15	MMP RKW TWAL 17 PULAU, CA WOLO TADHO, dan CA RIUNG	14 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
16	MMP RKW CA WATU ATA	4 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
17	MMP RKW CA KIMANG BOLENG	11 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
18	MMP RKW NDETA KELIKIMA	28 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
19	MMP RKW TWAL TELUK MAUMERE	11 April 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
20	MMP RKW CA EGON ILE MEDO	3 April 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
21	MMP RKW TWA PULAU LAPANG dan PULAU BATANG	24 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
22	MMP RKW TWA PULAU RUSA	24 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
23	MMP RKW TWA TUTI ADAGAE	25 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT



Tabel III. 19 Kelompok Tani Hutan (KTH)

No	Nama Kelompok	Alamat KTH	JUmlah anggota	Tanggal Terbentuk	SK Pembentukan
1	2	3	4	5	6
1	MANGKENG HERBAL	Kel. Waso Kec. Langke Rembong. Manggarai	12	23 April 2018	SK.LURAH WASO No.KWS.470/304.1/IV/2018
2	SADAR LESTARI	Desa Wejang Mawe, Kec. Poco Ranaka Timur, Manggarai Timur	18	8 Januari 2018	SK Kades Wejang Mawe No.16 Tahun 2018
3	CUNCANG WEK ULUWAE	Desa Uluwae, Kec. Poco Ranaka Timur	15	9 April 2018	BA Pembentukan Kelompok No BA.56/K.5/BKW II/SKW III/KSA/4/2018
4	MAJU BERSAMA	Desa Kloangpopot, Kec. Doreng. Kab. Sikka	17	28 Maret 2018	BA : DKLP.005/242/IV/2018
5	SINAR MUTIS	Desa Fatumnasi	26	25 Juni 2016	SK Kades Fatumnasi No.10/KEP/DES.Ftm/2016
6	MONE FETO ETFE	Desa Oekie, Kec. Amanuban Selatan, TTS	20	22 Oktober 2018	SK Kades Oekiu No. 14 Tahun 2018
7	MAJU BERSAMA	Desa Daiama, Kec. Landu Leko, Rote Ndao	20	22 Oktober 2018	SK Kades Daiama No.SK.23/KEP/DD/2018

Tabel III. 20 Kelompok Kemitraan Konservasi BBKSDA NTT

No	Nama Kelompok	Dasar	Ketua	Lokasi Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok tani dan ekowisata "Nekabua Baumata", Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SK/DBM//2019 tanggal 28 Juni 2019	Johanes Ludji	TWA Baumata	Jasa Wisata
2	Kelompok tani dan ekowisata "Oenaek", Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 445/22/SKEP/DCII/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019	Zadrah Ferdinand Lunggu	TWA Camplong	Jasa Wisata
3	Kelompok tani dan ekowisata "Buaya Putih", Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 09/SKEP/ENR/6/2019 tanggal 29 Juni 2019	Sefron Takumau	TWA Menipo	Jasa Wisata
4	Kelompok tani rumput laut, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 06/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Abdul Rahman Melang	TWAL 17 Pulau	Budidaya Rumput Laut
5	Kelompok tani tripang, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 07/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Nurdin Saleng D. Malewa	TWAL 17 Pulau	Bidang pemanfaatan hasil laut teripang
6	Kelompok tani lebah madu, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 08/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Zainudin Melang	TWAL 17 Pulau	Bidang pemanfaatan madu alam
7	Kelompok tani mangrove Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 07/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Jidron Taopan	TWA Menipo	Pembibitan Mangrove

No	Nama Kelompok	Dasar	Ketua	Lokasi Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8	Kelompok tenun tradisional Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Yakomina Talan	TWA Menipo	Kreasi tenun tradisional
9	Kelompok seni tari tradisional Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Alex Taunay	TWA Menipo	Seni tari tradisional
10	Kelompok masyarakat kemitraan konservasi "Tahat Toen", Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : SK.53.96.55.09/145/539/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	Felipus Asbanu	TB Bena	Pemanfaatan sumberdaya perikanan Danau Kubai dan daun gebang
11	Kelompok masyarakat kemitraan konservasi "Taim Monit", Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : SK.53.96.55.09/145/540/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	Semi Boimau	TB Bena	Pemanfaatan sumberdaya perikanan Danau Kubai dan gebang
12	Kelompok masyarakat "Kita Sama", Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Lurah Sulamu Nomor : 35/421/KSL/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019	Halindun Usman K. Kiah	TWAL Teluk Kupang	Budidaya rumput laut dan pemanfaatan hasil laut



2. Sarana Pendukung Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi

Dalam rangka pengelolaan kawasan, diperlukan dukungan sarana-prasarana khususnya berupa gedung pengelola kawasan baik pada tingkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, Bidang KSDA Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah serta Resort Konservasi Wilayah yang merupakan garda terdepan pengelolaan KSA dan KPA pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini terkait sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan diuraikan pada tabel 3 berikut :

Tabel III. 21 Kondisi sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan s/d 31 Desember 2019

Nama Jabatan	Rumah Dinas	Gedung Kantor	Operasional roda 2	Operasional roda 4
1. Ka.BBKSDA,	√	√	√	√
2. KBTU	√		-	√
3. Subbag Umum	-		√	√
4. Subbag Evlap DH	-		-	√
5. Subbag PK	-		-	√
6. Bidang Teknis KSDA	√	√	-	√
7. Seksi P2	√		-	√
8. Seksi P3	-		√	√
9. Bidang KSDA Wil. I	√	√	√	√
10. SKW I	√	√	√	√
11. SKW II	-	√	√	√
12. Bidang KSDA Wil. II	√	√	√	√
13. SKW III	√	√	√	√
14. SKW IV	√	√	√	√
Jumlah kebutuhan	14	8	14	14
Kondisi	9	8	9	14
Kekurangan	5	0	5	0

Catatan :

√ Sudah tersedia
 - Belum tersedia
 Tidak dibutuhkan



Tabel III. 22 Kondisi Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan s/d 31 Desember 2019

Nama Jabatan	Pondok Jaga	Operasional Roda 2	Operasional Roda 4	Operasional Patroli KM	Papan Nama Kawasan
1. RKW SM Kateri	√	√	√		√
2. RKW CA Hutan Bakau Maubesi	√	√	-	√	√
3. RKW CA Mutis	√	√	-		√
4. RKW SM Ale Aisio dan TB Bena	√	√	-		√
5. RKW TWA Baumata, TWAL Teluk Kupang, SM Danau Tuadale, SM Perhatu & Pel. Laut Tenau & Bolok	√	√	-	√	√
6. RKW TWA Camplong dan TWA Bipolo	√	√	-		√
7. RKW TB Pulau Ndana	-	√	-	-	-
8. RKW TWA Manipo	√	√	-	√	√
9. RKW SM Harlu	√	√	-		√
10. RKW TWA Ruteng Wilayah I	√	√	-		√
11. RKW TWA Ruteng Wilayah II	√	√	-		√
12. RKW TWA Ruteng Wilayah III	√	√	-		√
13. RKW TWA Ruteng Wilayah IV	-	√	-		-
14. RKW CA Watu Ata	-	-	-		√
15. RKW CA Wae Wuul	√	-	-	√	√
16. RKW TWAL 17 Pulau, CA Wolo Tadho & CA Riung	√	√	-	√	√
17. RKW CA Kimang Boleng	√	√	-		-
18. RKW CA Ndeta Kelikima	-	√	-		√
19. RKW TWAL GPT Maumere	√	√	-		√
20. RKW CA Egon Ilimedo	-	√	-		√
21. RKW TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang	-	-	-	√	√
22. RKW TWA Pulau Rusa	-	√	-	√	√
23. RKW TWA Tuti Adagae	√	√	-		√
Jumlah kebutuhan	23	23	23	8	23
Kondisi eksisting	16	19	1	5	20
Kekurangan	7	4	22	3	3

Catatan :

Sudah tersedia
 - Belum tersedia
 Tidak dibutuhkan

3. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 yang telah diubah dengan P.51/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, BB KSDA NTT memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan CA, SM, TWA dan TB, koordinasi teknis pengelolaan tahura dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

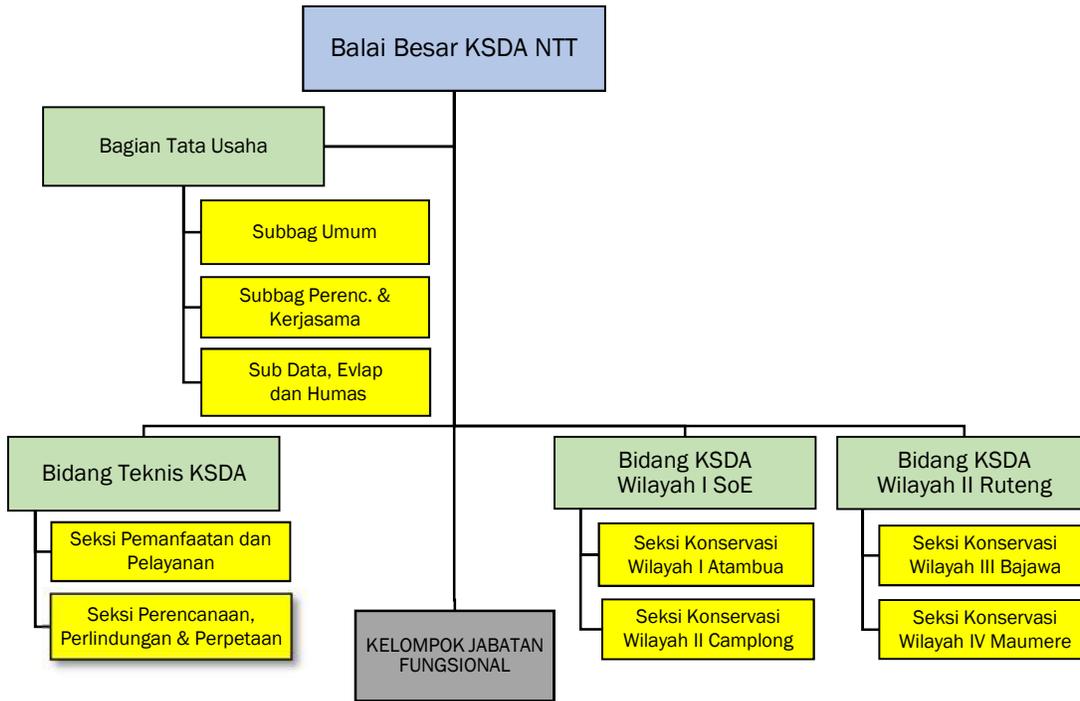
Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur diuraikan pada gambar 2 berikut :

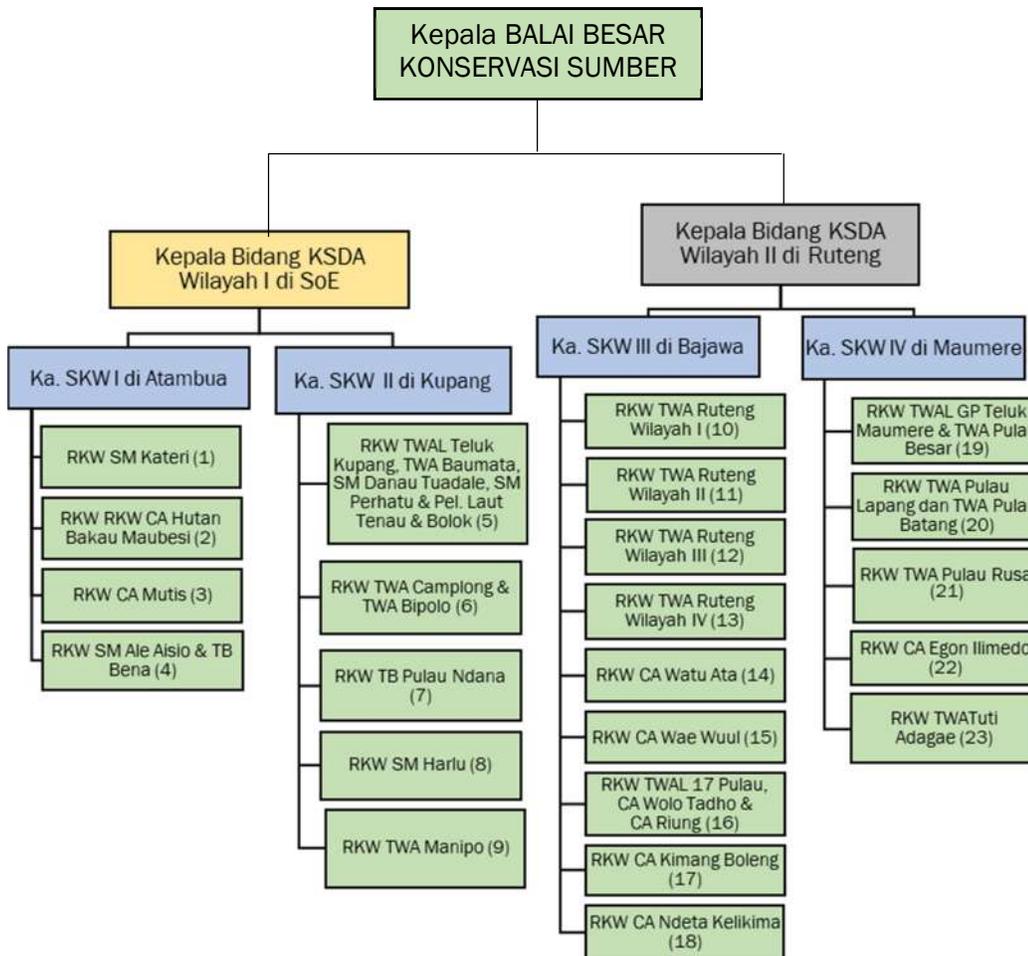
Gambar III. 5 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sesuai Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007



Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007, selanjutnya Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur membentuk 21 unit RKW. Kepala RKW merupakan jabatan non struktural yang dibina oleh Kepala SKW I sampai dengan IV. Pada umumnya wilayah tanggungjawab 1 RKW meliputi 1 unit kawasan hutan konservasi. Namun pada beberapa kawasan yang letaknya berdekatan, dalam pengelolaannya digabung dalam 1 wilayah RKW. Sedangkan pada kawasan yang wilayahnya cukup luas, dalam pengelolaannya justru dilakukan oleh beberapa RKW.

Gambar Struktur Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur yang meliputi 23 RKW, diuraikan pada gambar 3 berikut :

Gambar III. 6 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan RKW, sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur No. SK. K.5/TU/PEG/1/2020



Pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2019 berjumlah 211 orang, terdiri dari :

Berdasarkan status kepegawaiannya :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 142 orang;
- b. Tenaga kontrak : 69 orang.

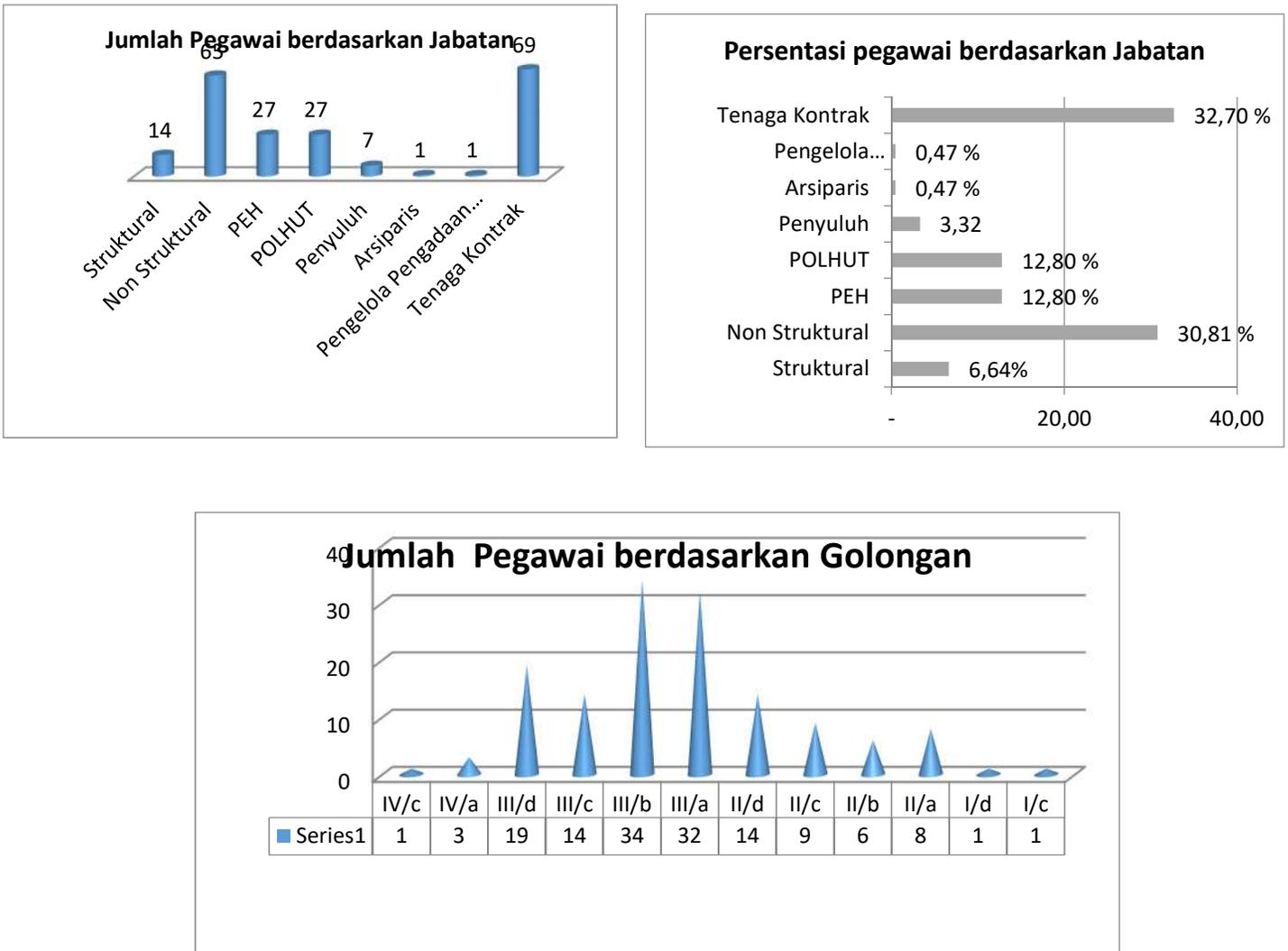
Berdasarkan jabatannya :

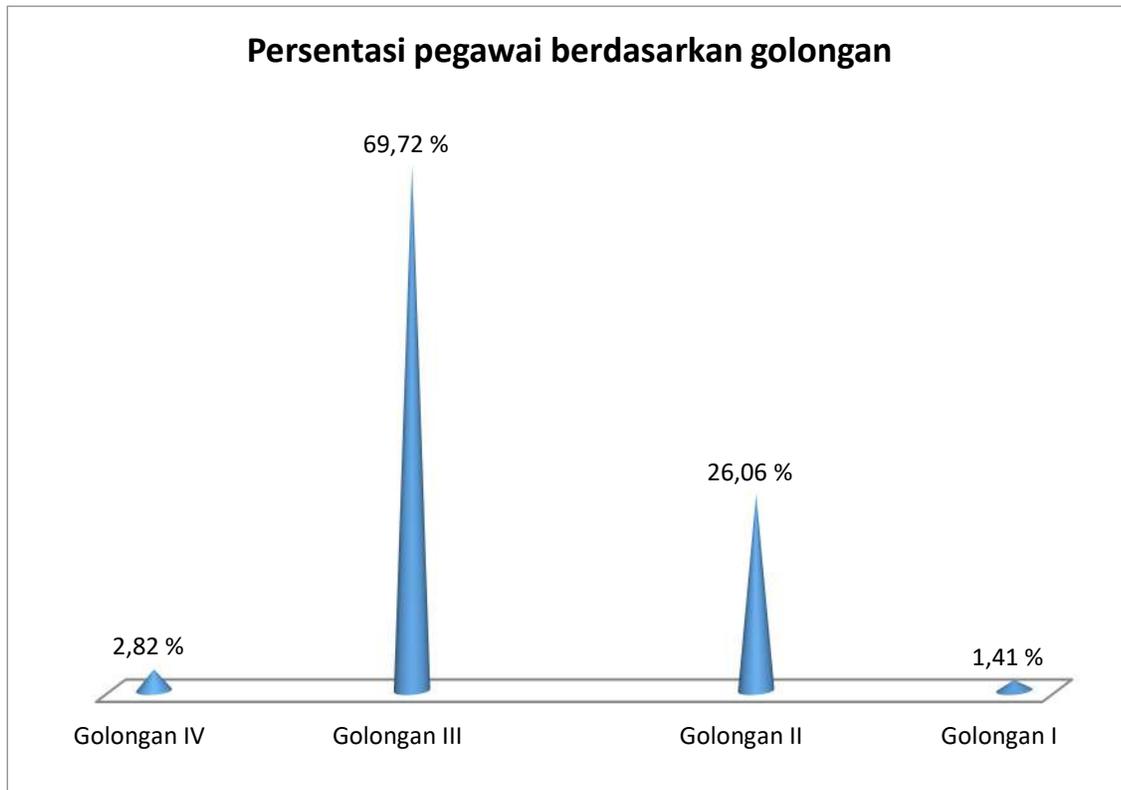
- a. Pejabat struktural : 14 orang;
- b. Pejabat fungsional terdiri dari : 63 orang;
 - 1). *Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)* : 27 orang;
 - 2). *Polhut* : 27 orang;
 - 3). *Penyuluh Kehutanan* : 7 orang;
 - 4). *Calon Arsiparis* : 1 orang;
 - 5). *Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa* : 1 orang.
- c. Pejabat Non Struktural : 65 orang.

d. Tenaga kontrak : 69 orang.

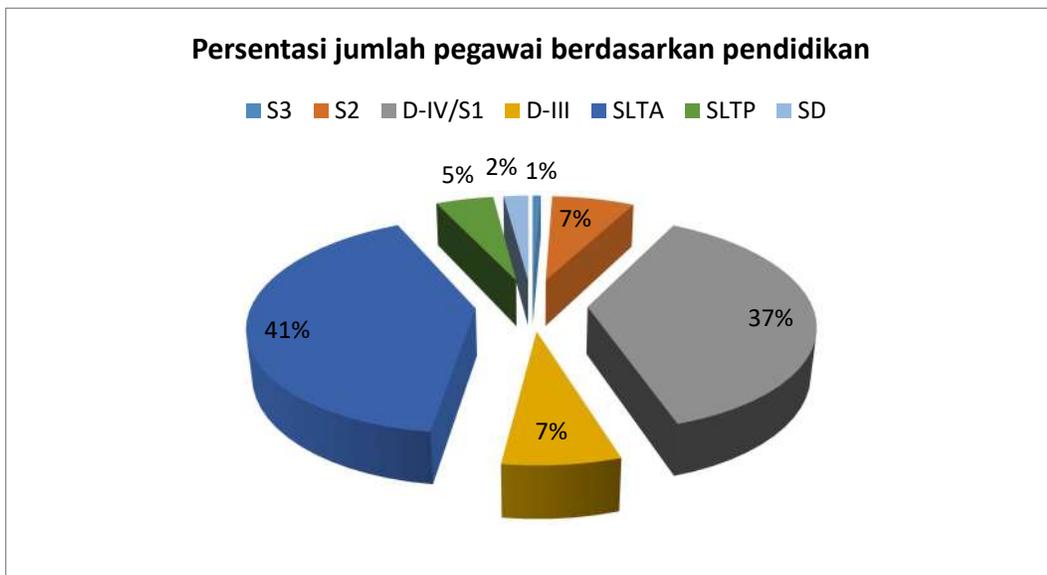
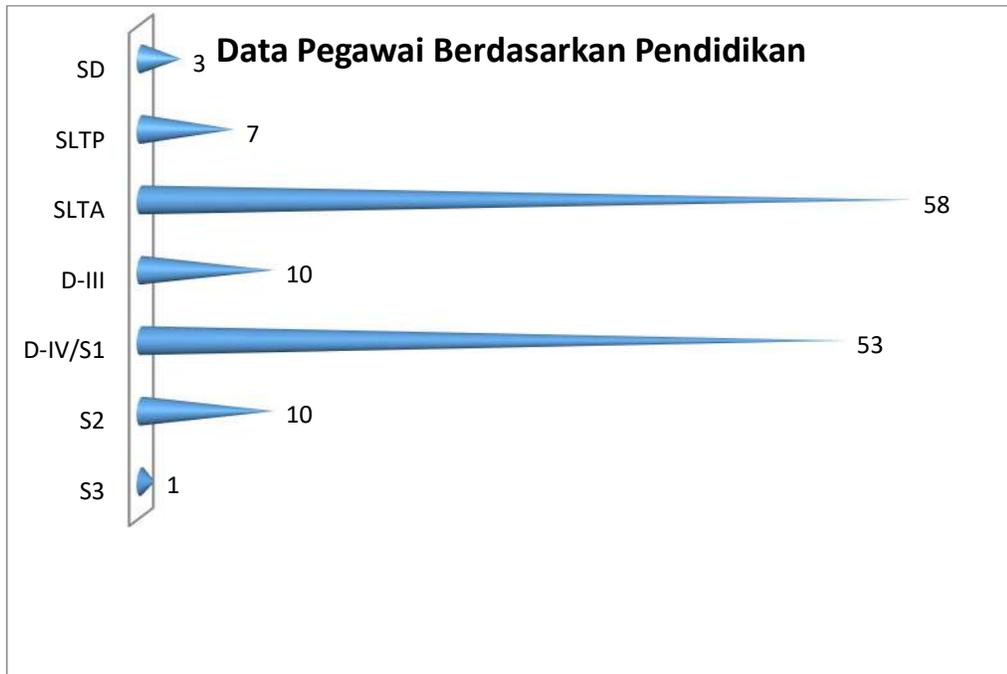
Kondisi pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan, pangkat serta distribusinya diuraikan pada gambar 4 s/d 6 dan tabel 4 berikut :

Gambar III. 7 Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020





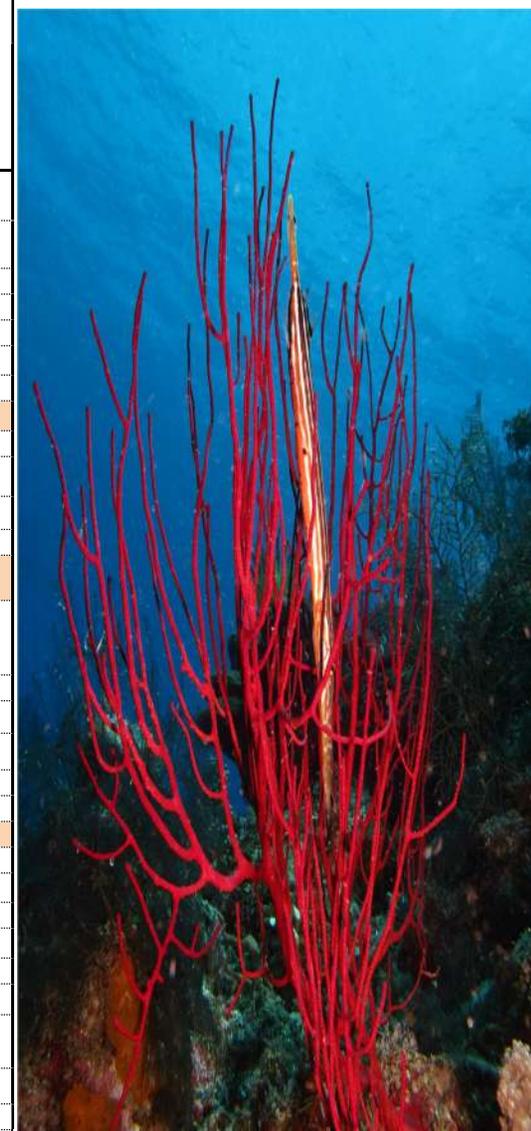
Gambar III. 8 Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan golongan s/d 31 Desember 2020



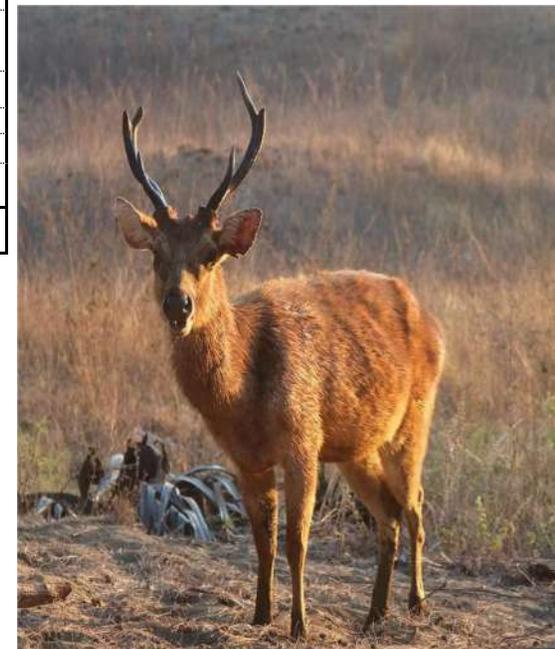
Gambar III. 9 Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020

Tabel III. 23 Kondisi sebaran pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Januari 2020

No./Nama Jabatan	Struktural	Non Struktural	Polhut	PEH	Penyuluh	Calon Arsiparis	Calon Pengelola Pengadaan barang & Jasa	Tenaga kontrak	Jumlah	Prosen
1. Ka.BBKSDA, KBTU, Kabid Teknis KSDA	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1,42
2. Subbag Umum	1	14	-	-	-	1	1	11	28	13,27
3. Subbag DEPK	1	2	-	2	1	-	-	-	6	2,84
4. Subbag PK	1	1	-	2	-	-	-	-	4	1,90
5. Seksi P2	1	2	1	2	-	-	-	1	7	3,32
6. Seksi P3	1	3	3	6	1	-	-	-	14	6,64
7. Bidang KSDA Wil. I	1	-	1	1	2	-	-	3	8	3,79
8. SKW I	1	1	1	2	-	-	-	2	7	3,32
9. RKW SM Kateri	-	1	1	1	-	-	-	2	5	2,37
10.RKW CA Hutan Bakau Maubesi	-	-	-	2	-	-	-	3	5	2,37
11.RKW CA Mutis	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1,90
12.RKW SM Ale Aisio dan TB Bena	-	-	2	-	-	-	-	3	5	2,37
13.SKW II	1	3	5	2	1	-	-	1	13	6,16
14.RKW TWAL Teluk Kupang, TWA Baumata SM Danau Tuadale, SM Perhatu & Pel. Laut Tenau & Bolok	-	1	2	-	-	-	-	3	6	2,84
15.RKW TWA Camplong dan TWA Bipolo	-	3	1	-	-	-	-	2	6	2,84
16.RKW TB Pulau Ndana	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1,42
17.RKW TWA Manipo	-	1	1	-	-	-	-	2	4	1,90
18.RKW SM Harlu	-	1	-	-	-	-	-	3	4	1,90
19.Bidang KSDA Wil. II	1	8	1	3	-	-	-	5	18	8,53
20.SKW III	1	-	-	-	-	-	-	3	4	1,90
21.RKW TWA Ruteng Wilayah I	-	2	1	-	-	-	-	1	4	1,90
22.RKW TWA Ruteng Wilayah II	-	3	1	-	-	-	-	2	6	2,84
23.RKW TWA Ruteng Wilayah III	-	4	-	-	-	-	-	2	6	2,84
24.RKW TWA Ruteng Wilayah IV	-	2	-	-	-	-	-	2	4	1,90
25.RKW CA Watu Ata	-	2	-	-	-	-	-	1	3	1,42
26.RKW CA Wae Wuul	-	1	1	2	-	-	-	1	5	2,37
27.RKW TWAL 17 Pulau, CA Wolo Tadho & CA Riung	-	3	-	-	-	-	-	3	6	2,84
28.RKW CA Kimang Boleng	-	-	1	-	-	-	-	1	2	0,95
29.RKW CA Ndeta Kelikima	-	2	-	-	-	-	-	-	2	0,95



30.SKW IV	1	-	-	2	2	-	-	3	8	3,79
31.RKW TWAL GPT Maumere	-	1	2	-	-	-	-	2	5	2,37
32.RKW TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.RKW TWA Pulau Rusa	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,47
34.RKW CA Egon Ilimedo	-	2	-	-	-	-	-	2	4	1,90
35.RKW TWA Tuti Adagae	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,47
Jumlah	14	65	27	27	7	1	1	69	211	100,00
TOTAL	PNS		142		Kontrak			69	211	



| **Patroli POLHUT
dengan MMP:**







BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tk. capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa

Tenggara Timur Tahun 2019. Terdapat dua sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator kinerja program Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2018 adalah pada tabel berikut.

Tabel III. 24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKK	Target Renstra		Capaian					
		Satuan	2015 - 2019	2018			2019		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem								
5420	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam								
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam</i>								
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	16	3	5	0,00	12	8	66,67
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	27	1	1	100,00	1	0	0,00
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	28	1	1	100,00	521	460	88,29
4	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	13	1	1	100,00	20	14	70,00
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi								
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru</i>								
1	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	17	2	0	0,00	50	32	64,00
2	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	0	200	200	100,00	62	200	150
3	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina	Desa	10	2	7	150,00	7	5	71,43

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKK	Target Renstra		Capaian					
		Satuan	2015 - 2019	2018			2019		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	sebanyak 77 Desa								
4	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	1	1	1	100,00	23	23	100
5422	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik								
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik</i>								
1	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	10	2	17,678	150,00	2	2	100
2	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan <i>reliable</i> pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	1	1	100,00	1 unit	1 unit	100
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi								
	<i>Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</i>								
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional	Orang	16.485	3297	3965	120,26	1 kawasan	1 kawasan	100
2	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	224.327.700	44.865.540 Juta Rupiah	25.677.174	50,85	30 juta	14.319.116	47,73
3	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	Unit	1510	60	80	133,33	15	0	0,00
5419	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE								100,36
	<i>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE</i>								
1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Poin	78	77,5	78	100,36	78	78,44	100,56

Jumlah Anggaran Kegiatan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 : Rp 31.881.817.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 : Rp 31.046.586.750,- (97,38 %). Capaian kinerja merupakan capaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan persentase rata-rata capaian IKK pada tiap program yang telah dijalankan. Dari informasi yang tersaji pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar 95,06%. Dari 15 IKK, terdapat empat IKK yang tidak tercapai yaitu:

1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan dari target 5 dokumen. Dokumen rancangan penataan blok TWA Bipolo, Dokumen rancangan blok CA Watu Ata, Dokumen Rancangan Blok CA Wolo Tadho, Dokumen Rancangan Blok SM Kateri, Dokumen Desain Tapak TWA Camplong, Dokumen Blok dan desain tapak tersebut telah disusun dan diusulkan, namun sampai dengan 31 desember 2018 belum mendapat pengesahan.
2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan dari target 2 dokumen. Dokumen 1. Dokumen Rencana Pengelolaan SM Aleaisio, 2. Dokumen Rencana Pengelolaan CA Maubesi Dokumen RPJP tersebut telah diusulkan, namun sampai dengan 31 desember 2018 belum mendapat pengesahan.
3. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dari target 50,5 Juta Rupiah hanya tercapai Rp.25.677.174,- atau setara 50,85%
4. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi non taman nasional dari target 12.556 Orang hanya tercapai 8.929 Orang dari 5 TWA yang telah dilakukan pungutan karcis atau setara 71,11 %

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
 Tahun Anggaran : 2019
 Sasarean Kegiatan : Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

No.	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Volume	Capaian	%
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Jumlah UPT yang melakukan pemolaan dan penataan pengelolaan di kawasan konservasi dalam rangka penyiapan prakondisi masyarakat dan kawasan (Unit KK)	12 Unit KK	8 Unit KK 1. <i>Penyusunan Rancangan Penataan Blok TWA Pulau Rusa, TWA Pulau Lapang, TWA Pulau Batang, TWA Tuti Adagae</i> 2. <i>Penyusunan Desain Tapak di TWA Baumata</i> 3. <i>Revisi) Evaluasi Blok Pengelolaan Kawasan TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere</i> 4. <i>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi</i>	66,67

No.	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Volume	Capaian	%
-----	-------------------	-----------------	--------	---------	---

di SM Egon Ilemedo dan TB Bena

Dokumen Blok, desain tapak dan Rencana Pengelolaan diatas telah disusun dan diusulkan

2	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat (Hektar)	200 Ha	Telah terbentuk 7 Kelompok kemitraan konservasi dengan total luasan yang dikerjasamakan seluas 610,3 Ha	150,00
---	---	---	--------	---	--------

3	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Jumlah UPT yang melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan (Resort)	1 Provinsi (23 Resort)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Pada SKW I (4 Resor) 2. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Pada SKW II (5 Resor) 3. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Pada SKW III (9 Resor) 4. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan Pada SKW IV (5 Resor) 5. Operasi Pemadaman Dini Kebakaran Hutan di RKW SM Kateri, RKW (KPHK) CA Mutis, 	100,00
---	---	--	------------------------	---	--------

No.	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Volume	Capaian	%
				RKW SM Ale Aisio dan TB Bena, RKW TWA Menipo, RKW TWA (KPHK) Ruteng Wil I s/d IV, RKW CA Wae Wuul	
				6. Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan bersama MMP pada 23 resor	
				7. Pengurusan Administrasi Penggunaan Senjata Api	
				8. Pengadaan sarana perlindungan dan pengamanan kawasan (7 Unit)	
4	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (Hektar)	62 Ha	Pemeliharaan Tanaman T1 di TWA Ruteng seluas 200 Ha	150,00
5	Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M	Besaran PNBPN dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M (Juta Rupiah)	30 Juta	Target tercapai Rp.14.319.116,-	47,73
6	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah (%)	2 %	1. Monitoring Populasi Komodo di TWAL 17 Pulau dan CA Wae Wuul 2. Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di	100,00

No.	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Volume	Capaian	%
	Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013			TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK) 3. Konservasi Penyu di TB Bena dan TWA Menipo	
7	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara dan 20 Juta orang wisatawan nusantara	Jumlah Satuan Kerja yang mengembangkan ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi (Kawasan Konservasi)	1 KK	1. Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Alam 2. Pameran Konservasi Tingkat Provinsi 3. Pameran Konservasi Tingkat Kabupaten 4. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Karcis Masuk Kawasan dan E-Tiketing	100,00
8	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya (KEE)	2 KEE	Realiasi saat ini telah terbit SK Penetapan KEE Rote Ndao sesuai Surat keputusan Gubernur Nomor: 204/KEP/HK/2019 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah sebagai habitat kura kura leher ular rote di Kabupaten Rote Ndao	50,00
9	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	Jumlah Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU) di UPT KSDA (Unit	1 Unit	realisasi pengadaan 1 paket bahan/peralatan lapangan penanggulangan konflik dalam rangka penguatan kapasitas Unit Penanganan Satwa	100,00

No.	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Volume	Capaian	%
10	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 Tahun	Jumlah kelompok pada desa di daerah penyangga yang dibina oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE (Kelompok)	7 Kelompok	Realisasi 5 Kelompok Evaluasi Daerah Penyangga semula 7 Kelompok menjadi 5 Kelompok, perubahan terjadi pada RKAKL revisi 7	71,43
11	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	78 Poin	78,44 <i>Sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor S.113/ITJEN/ITWIL.1/W AS.3/04/2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 tanggal 30 April 2019</i>	100,56
Rata Rata Capaian IKK (%)					94,22

Jumlah Anggaran Kegiatan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2019 : Rp 29.365.685.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2019 : Rp 28.738.898.763,- (97,87%)

Capaian kinerja merupakan capaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan persentase rata-rata capaian IKK pada tiap program yang telah dijalankan. Dari informasi yang tersaji pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebesar 94,22%. Dari 11(sebelas) IKK, terdapat 4(empat) IKK yang tidak tercapai.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Perdirjen Konservasi Sumber Daya Alam Nomor P.8/KSDAE-SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja perlu disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - h. Keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari capaian kinerja.
- Perbandingan Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada pencapaian kinerja BBKSDA NTT tahun 2019 dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap program dilakukan dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja.

3.1.2. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dilakukan melalui perbandingan nilai capaian kinerja Tahun 2018 dan capaian tahun 2019. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2019. Kriteria efektivitas yang digunakan, yaitu:

- a. Rasio > 1 , menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya.
- b. Rasio $= 1$, menunjukkan peningkatan efektivitas pencapaian kinerja Tahun 2019 adalah tetap atau sama dengan kinerja tahun sebelumnya.
- c. Rasio < 1 , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun artinya efektivitas kinerja Tahun 2019 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun sebelumnya.

Tabel III. 25 Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2019

Program	Capaian Kinerja (%)		Rasio	Keterangan
	2018	2019		
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	95,06	94,22	0,99	Efektivitas menurun

Tabel diatas menunjukkan rasio pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 0,99 artinya pencapaian target-target kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 mengalami penurunan efektivitas dibanding 2018.

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja atau realisasi fisik (*output*) dengan realisasi masukan (*input*) yang dapat berupa anggaran yang digunakan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja (penggunaan sumber daya) dan juga efisiensi Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019. Kriteria efisiensi yang digunakan, yaitu :

- a. Rasio > 1 atau $= 1$, menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien.

- b. Rasio < 1, menunjukkan penggunaan sumber daya kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2019 sumber daya (Anggaran) yang digunakan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja Tahun 2019.

Tabel III. 26 Efisiensi pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2019

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rasio	Keterangan
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	94,22	97,87	0,96	Tidak Efisien

Dari tabel dapat diketahui rasio efisiensi pencapaian kinerja sebesar 0,96. Kondisi ini diartikan bahwa pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satker Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 tidak efisien. Untuk mengetahui permasalahan dan capaian kinerja secara mendalam maka dilakukan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran kinerja dengan indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2019. Analisis juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dan dijelaskan secara deskriptif pada uraian berikut ini.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 DAN REALISASI TAHUN 2019

Dari pagu anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sebesar **Rp.31.881.817.000,-**, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar **Rp.31.046.586.750,-** atau **97.38%**. Rincian pagu dan realisasi anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2018 berdasarkan kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 27 Realisasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Berdasarkan Kegiatan

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	17.735.000.000	17.567.312.575	99.05%
2	5425 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	14.146.817.000	13.479.274.175	95.28%
	Jumlah	31.881.817.000	31.046.586.750	97.38%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tertinggi adalah untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (99,05%) dan realisasi terendah pada kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (95,28%).

Sementara itu, untuk tahun 2019, pagu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur adalah sebesar **Rp.29.838.181.000,-** dengan penyerapan hingga tanggal 12 Desember 2019, yaitu

Rp.28.738.898.763,- atau 97,87% (Sumber: Online Monitoring SPAN). Realisasi anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur hingga akhir tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 28 Realisasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur TA. 2019 per Kegiatan

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	20.785.776.000	20.466.076.203	98,46%
2	5425	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	8.579.909.000	8.272.822.560	96,42%
Total			29.365.685.000	28.738.898.763	97.8744%







BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. STRATEGI DALAM Mendukung PRIORITY NASIONAL

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 disusun Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang di dalamnya memuat Proyek Priority Nasional. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Di tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tahun 2020, KLHK terdapat didalam PN yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mensinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. KLHK mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 priority nasional :

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
- 2) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan
- 3) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

Dari 5 (lima) Priority Nasional yang direncanakan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) Priority Nasional, yaitu: 1) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 2) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Dalam mendukung prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, strategi Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan peningkatan populasi spesies terancam punah dan operasionalisasi *Wildlife Rescue Unit* (WRU) bersama masyarakat, serta pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada KK, baik yang termasuk dalam 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata maupun tidak melalui mekanisme pendanaan APBN dan SBSN.

Sedangkan untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, strategi Ditjen KSDAE adalah dengan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial, serta pengelolaan kawasan konservasi di daerah penyangga atau *buffer zone*, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan energi air dari mini/mikro hidro.

Tabel III. 29 Prioritas Nasional 2020 yang didukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran	%
						x Rp.1.000,-	
1. PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja						3.774.670	11,8%
Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	Optimalisasi Hasil Hutan	Luas Kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12	Hektar	1.419.670	4,4%
	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru	Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1	Destinasi	2.355.000	7,4%
2. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup						5.592.073	17,4%
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan konservasi	21.707	Hektar	181.500	0,6%
			Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di luar	333.203	Hektar	170.800	0,6%

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran	%
						x Rp.1.000,-	
			Kawasan konservasi				
			Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	35	Desa	877.000	2.8%
			Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1	Unit KK	1.862.000	5.8%
	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	Luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	130	Hektar	1.081.103	3.4%
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12	Hektar	1.419.670	4.4%
Total Alokasi Anggaran Prioritas Nasional						9.366.743	100%

Pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.774.670,- atau 40,74% dari seluruh anggaran Prioritas Nasional Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Program prioritas yang didukung yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi melalui output: Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik dan Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan. Kegiatan tersebut dibuat sebagai penyiapan kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata prioritas yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia, antara lain DWP Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Sementara itu 57.53% anggaran atau sebesar Rp.5.592.073,- dialokasikan untuk Prioritas Nasional ke-4 yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur melaksanakan 2 program prioritas, yaitu Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air melalui output Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam dan di luar Kawasan konservasi, Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif, Jumlah ijin pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam, Jumlah kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya, dan Luas area kawasan konservasi yang ditangani

permasalahannya; serta program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui output Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL.



**KAKA TUA JAMBUL
KUNING**

Lokasi:

Taman Wisata Alam
Menipo

Dokumentasi oleh:

Abdon Amfoni

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pagu alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) sebesar **Rp.32.213.973.000,-**. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; dan (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;



Tabel III. 30 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	65 Juta Hektar	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	21.707 Hektar
					Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	12 Hektar
						Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya
2	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Hektar
3		Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan		700 Milyar Rupiah	

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan
		Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	Konservasi dan TSL		lokasi kunjungan	
4	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4.500 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	130 Hektar
5	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang adaptif	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	552 Unit KK	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Unit KK

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2020, pagu alokasi anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp.32.213.973.000,-** dengan rincian per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel III. 31 Rincian Pagu Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020 per Kegiatan (x Rp.1.000,-)

	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL	TOTAL	%
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	-	-	809.400	-	809.400	2,6%
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	-	3.820.103	-	3.820.103	11,9%
3	Konservasi Spesies dan Genetik	-	-	1.412.270	7.400	1.419.670	4,4%
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	-	-	383.000	1.972.000	2.355.000	7,4%
5	Pembinaan Konservasi	-	-	170.800	-	170.800	0,6%

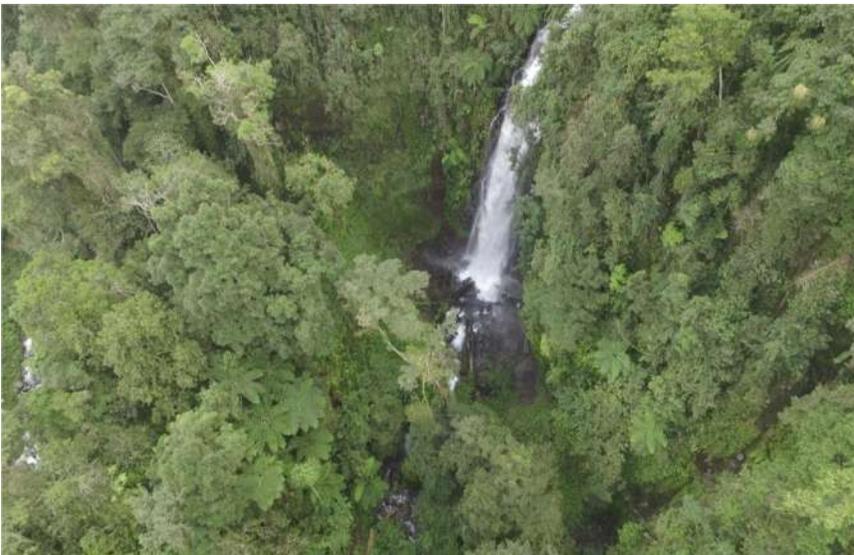
	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL	TOTAL	%
Ekosistem Esensial							
6	Dukungan Manajemen	17.179.000	4.660.000	1.347.000	453.000	23.639.000	73,4%
Total		17.179.000	4.660.000	7.942.573	3.432.400	32.213.973	100%
%		53,4%	14,5%	24,7%	10,7%	100%	

Dari Pagu Alokasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tersebut, pada tahun anggaran 2020 ini seluruh Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) dikumpulkan di satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sehingga anggaran yang ada di satuan kerja adalah Anggaran Belanja Non Operasional. Hal ini turut mendukung arahan Presiden RI tentang proses penganggaran *money follow program* (prioritas nasional) pada RKP tahun 2020.

Tabel III. 32 Pagu Alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 per Jenis Belanja & Sumber Dana(x Rp.1.000,-)

Sumber Dana	Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal		Jumlah	%
		Operasional	Non Operasional	Operasional	Non Operasional		
a RM (Rupiah Murni)	17.179.000	6.007.000	5.088.073	-	2.432.400	30.706.473	95,4%
b RMP (Rupiah Murni Pendamping)	-	-	1.507.500	-	-	1.507.500	4,6%
c PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	-	-	-	-	-	-	-
d HLN (Hibah Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	-
e SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	17.179.000	6.007.000	6.595.573	0	2.432.400	32.213.973	100%
%	53,4%	18,7%	20,5%	0,00%	7,6%	100%	

Belanja Non Operasional senilai Rp. 6.595.573,- atau sebesar 20.5% dari total pagu alokasi digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR

1. OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.950) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.347.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu :

- a. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format *I-account (unified budget)*.
- b. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium term expenditure framework*).
- c. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Pembaharuan sistem penganggaran diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan PP Nomor: 90 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Bahan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan serta bahan perencanaan dan evaluasi kinerja dapat bersumber pada Statistik Ditjen dan Statistik Setditjen KSDAE. Untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sebab mutu data sangat dipengaruhi oleh prosedur/tatacara pengumpulan data, kelengkapan dokumen, konsistensi dalam pelaporan serta jadwal pelaporan yang tepat.

Saat ini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas, akibat ketiadaan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu output dalam melaksanakan evaluasi kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan dokumen perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana termuat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan informasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan :

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Ditjen KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker adalah reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya seluruh pegawai Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.
2. Masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE.
3. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan pada umumnya dan konservasi pada khususnya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan output Nilai SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) Ditjen KSDAE 78 Poin dilaksanakan pada Bagian Tata Usaha Sub Bagian Program dan Kerjasama, Sub Bagian Data, Evlap dan Humas dan Sub Bagian Umum. Kegiatan yang direncanakan yaitu :

- a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran terdiri dari :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2021
 - Koordinasi, konsultasi dalam rangka program dan kerja sama
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terdiri dari :
 - Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran
 - Penyelenggaraan SPIP
 - Penyusunan laporan kinerja
 - Penyusunan laporan capaian renja

- Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan
- c. Pengelolaan keuangan terdiri dari :
- Pengelolaan PNBPN wisata alam
 - Penyusunan laporan keuangan
- d. Pengelolaan kepegawaian terdiri dari :
- Peningkatan Kapasitas SDM
 - Pengelolaan data kepegawaian
 - Supervisi dan uji petik DUPAK
 - Workshop peningkatan kapasitas SDM
- e. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari :
- Penatausahaan BMN
 - Perjalanan pimpinan

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu sebagai berikut :

Kode	Aktivitas	Bulan pada tahun 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran												
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi												
053	Pengelolaan Keuangan												
054	Pengelolaan Kepegawaian												
055	Pelayanan umum dan Perlengkapan												

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada berikut :

Tabel III. 33 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.950)

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	1	Layanan	-	1.347.000.000	
5419.950.007	Satker KSDA	-		-	1.347.000.000	
051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	-		-	74.500.000	
A	Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2021	-		-	74.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	74.500.000	A
	- Pengumpulan data bahan di	3	OT	3.000.000	9.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
	BKW I					
	- Pengumpulan data bahan di BKW II	3	OT	5.500.000	16.500.000	
	- Perjalanan kegiatan pembahasan program, anggaran dan kerja sama	7	OT	7.000.000	49.000.000	
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	-		-	232.400.000	
A	Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran	-		-	100.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	100.000.000	A
	>> Balai Besar	-		-	20.000.000	
	- Perjalananan ke Bidang KSDA Wilayah I	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan ke Bidang KSDA Wilayah II	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Perjalananan ke Seksi Konservasi Wilayah I/ Resort	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan ke Seksi Konservasi Wilayah II/ Resort	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalananan ke Seksi Konservasi Wilayah III/ Resort	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Perjalananan ke Seksi Konservasi Wilayah IV/ Resort	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	>> Bidang KSDA Wilayah I	-		-	25.000.000	
	- Perjalananan BKW I ke balai	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan BKW I ke Seksi/kawasan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	- Perjalananan SKW I ke balai	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	- Perjalananan SKW I ke Resort/kawasan	1	OT	2.500.000	2.000.000	
	- Perjalananan SKW II ke resort/kawasan	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalananan SKW I, II ke bidang	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalalan koordinasi RKW ke Polsek/Babinsa/Tokoh Adat	22	OT	500.000	11.000.000	
	>> Bidang KSDA Wilayah II	-		-	39.500.000	
	- Perjalananan BKW II ke balai	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Perjalananan BKW II ke Seksi/kawasan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	- Perjalananan SKW III ke balai	1	OT	5.000.000	5.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
	- Perjalananan SKW III ke Resort/kawasan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	- Perjalananan SKW IV ke Balai	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan SKW IV ke bidang	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan SKW IV ke resort/kawasan	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Perjalananan SKW IV ke resort/kawasan	1	OT	1.500.000	1.500.000	
	- Perjalalan koordinasi RKW ke Polsek/Babinsa/Tokoh Adat	24	OT	500.000	12.000.000	
	- Perjalananan ke Wilayah Kerja Pulau Timor	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalananan ke Wilayah Kerja Pulau Flores dan Alor	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Perjalananan dalam rangka rapat evaluasi kinerja	1	OT	7.500.000	7.500.000	
B	Penyelenggaraan SPIP	-		-	4.300.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	4.300.000	A
	- Rapat koordinasi pelaksanaan SPIP [15 ORANG x 1 KEG]	15	OH	20.000	300.000	
	- Penggandaan laporan triwulan [5 EKSPL x 4 TRWLN]	20	BUKU	200.000	4.000.000	
C	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019	-		-	3.200.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.200.000	A
	- Rapat pembahasan [10 ORANG x 2 KEG]	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Penggandaan final	10	BUKU	200.000	2.000.000	
D	Penyusunan Laporan Capaian Renja tahun 2019	-		-	3.200.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.200.00	A
	- Rapat pembahasan [10 ORANG x 2 KEG]	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Penggandaan final	10	BUKU	200.000	2.000.000	
E	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan	-		-	23.700.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	13.200.000	A
	- Rapat pembahasan penyusunan statistik 2019 [10 ORANG x 2 KEG]	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Penggandaan final statistik 2019	10	BUKU	200.000	2.000.000	
	- Penyelenggaraan publikasi dan	1	KALI	10.000.000	10.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
	kehumasan					
522141	Belanja Sewa	-		-	10.500.000	A
	- Sewa hosting aplikasi Siomanise	1	TAHUN	10.500.000	10.500.000	
F	Perjalanan Koordinasi/ Ketatausahaan				98.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				98.000.000	A
	- Perjalanan koordinasi ke UPT	8	OT	5.000.000	40.000.000	
	- Perjalanan ketatausahaan	5	OT	8.000.000	40.000.000	
	- Perjalanan duta konservasi di dalam Kabupaten	4	OT	500.000	2.000.000	
	- Perjalanan duta konservasi antar Kabupaten	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan duta konservasi ke Provinsi	2	OT	6.000.000	12.000.000	
054	Pengelolaan keuangan	-		-	62.650.000	
A	Pengelolaan PNBPNBP	-		-	16.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	16.000.000	A
	- Pembinaan pengelolaan PNBPNBP di TWA Ruteng	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Pembinaan pengelolaan PNBPNBP di TWAL 17 Pulau	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Pembinaan pengelolaan PNBPNBP di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Pembinaan pengelolaan PNBPNBP di TWA Camplong dan TWA Menipo	1	OT	3.000.000	3.000.000	
B	Penyusunan Laporan Keuangan	-		-	46.650.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	46.650.000	A
	- Perjalanan ke BKW I	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan ke BKW II	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	- Perjalanan ke SKW I	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan ke SKW II	1	OT	650.000	650.000	
	- Perjalanan ke SKW III	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	- Perjalanan ke SKW IV	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	- Perjalanan rekonsiliasi ke pusat/provinsi lain	4	OT	7.000.000	28.000.000	
057	Pengelolaan kepegawaian	-		-	337.100.000	
A	Peningkatan Kapasitas SDM	-		-	113.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-		-	8.000.000	A

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
	- Kegiatan kesamaptaan/olahraga mingguan	1	TAHUN	8.000.000	8.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-		-	2.000.000	D
	- Kegiatan kesamaptaan/olahraga mingguan	1	TAHUN	2.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	105.000.000	D
	- Perjalanan pegawai dalam rangka mengikuti pelatihan/workshop/seminar/rapat/sosialisasi di pusat/provinsi lain	15	OT	7.000.000	105.000.000	
B	Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	19.000.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-		-	7.000.000	A
	- Pengiriman berkas/dokumen kepegawaian	1	TAHUN	7.000.000	7.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	5.000.000	A
	- Penggandaan berkas kepegawaian	1	TAHUN	5.000.000	5.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	7.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka pengurusan berkas kepegawaian	1	OT	7.000.000	7.000.000	
C	Pendampingan administrasi kepegawaian	-		-	14.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	14.000.000	A
	- Perjalanan ke SKW I dalam rangka pendampingan administrasi kepegawaian	2	OT	2.500.000	5.000.000	
	- Perjalanan ke SKW III dalam rangka pendampingan administrasi kepegawaian	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalan ke SKW IV dalam rangka pendampingan administrasi kepegawaian	1	OT	3.000.000	3.000.000	
D	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM	-		-	191.100.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	14.380.000	A
	- Alat dan bahan	1	KEG	3.380.000	3.880.000	
	- Pesonal use	65	UNIT	150.000	9.750.000	
	- Backdrop	1	UNIT	750.000	750.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	500.000	A
	- Penyusunan/penggandaan laporan	1	KEG	500.000	500.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	4.700.000	A
	- Honorarium narasumber eselon I	10	OJ	1.400.000	14.000.000	
	- Honorarium narasumber	6	OJ	900.000	5.400.000	
	- Honorarium moderator	4	OK	700.000	2.800.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	154.020.000	A
	- Paket Fullboard peserta dari luar kota Kupang [37 ORANG x 2 HARI]	74	OH	450.000	33.300.000	
	- Paket Fullday peserta dari kota Kupang [28 ORANG x 2 HARI]	56	OH	100.000	5.600.000	
	- Uang harian H-1 dan H+1 [37 ORANG x 2 HARI]	74	OH	430.000	31.820.000	
	- Penginapan H-1 dan H+1 [37 ORANG x 2 HARI]	74	OH	300.000	22.200.000	
	- Uang saku meeting dalam kota [65 ORANG x 2 HARI]	130	OH	100.000	13.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Alor	2	ORANG	1.500.000	3.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Belu	2	ORANG	600.000	1.200.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Ngada (Bajawa)	2	ORANG	2.000.000	4.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Malaka	2	ORANG	600.000	1.200.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Kupang (Camplong)	2	ORANG	200.000	400.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Ende	2	ORANG	1.500.000	3.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo)	2	ORANG	3.000.000	6.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Sikka	4	ORANG	1.500.000	6.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Kupang (Menipo)	2	ORANG	300.000	600.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bena)	2	ORANG	300.000	600.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Ngada (Riung)	2	ORANG	2.500.000	5.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Rote Ndao	3	ORANG	400.000	1.200.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Manggarai (Ruteng)	5	ORANG	3.000.000	15.000.000	
	- Transportasi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (Soe)	3	ORANG	300.000	900.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SUMBER DANA
058	Pelayanan umum dan perlengkapan	-		-	640.350.000	
A	Penatausahaan BMN	-		-	29.350.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	29.350.000	D
	- Perjalanan ke BKW I dan SKW I	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan ke BKW II dan SKW III	3	OT	5.000.000	15.000.000	
	- Perjalanan ke SKW IV	2	OT	4.175.000	8.350.000	
B	Perjalanan Pimpinan	-		-	611.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	611.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi/ koordinasi ke pusat dan provinsi lain	28	OT	13.000.000	364.000.000	
	- Perjalanan koordinasi ke UPT (koordinator UPT)	10	OT	5.200.000	52.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi SMART RBM ke Timor	26	OT	2.500.000	65.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi SMART RBM ke Flores/ Alor	20	OT	5.100.000	102.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi SMART RBM ke Rote	8	OT	3.500.000	28.000.000	

E. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya Layanan dukungan manajemen satker pada tahun 2020.

2. OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.951) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 453.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/ Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu :

1. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format *I-account (unified budget)*;
2. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium term expenditure framework*);
3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana termuat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020 lingkup Ditjen KSDAE dalam bingkai Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2020 – 2024, perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan informasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan :

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Ditjen KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE maka diperlukan pembangunan gedung dan bangunan sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja para pegawainya.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dibidang Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka dibutuhkan sarana prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kebutuhan akan gedung yang nyaman untuk melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan demi menunjang kinerja pemerintah.

Fasilitas dan peralatan elektronik perkantoran Kantor diperlukan untuk mendukung kinerja pemerintah dalam hal ini kantor Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur khususnya dalam penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA serta pelayanan masyarakat.

B. PENERIMA MANFAAT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu tercapaian target kinerja berupa ketersediaan fasilitas dan peralatan elektronik perkantoran.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metoda pelaksanaan dilaksanakan oleh penyedia (pihak ke tiga) dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi terdiri dari Peralatan elektronik perkantoran (*pricelist* terlampir).
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran terdiri dari Meubeler kantor dan peralatan elektronik (*pricelist* terlampir) serta Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN).

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada :

Tabel III. 34 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.951)

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5419.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1	Layanan	-	453.000.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5419.951.007	Satker KSDA	-		-	453.000.000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-		-	406.100.000	
A	Peralatan elektronik perkantoran	-		-	199.700.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	199.700.000	A
	> KANTOR BALAI	-		-	199.700.000	
	- Laptop	2	UNIT	17.000.000	34.000.000	
	- Laptop	1	UNIT	26.000.000	26.000.000	
	- Dekstop	5	UNIT	15.100.000	75.500.000	
	- UPS	2	UNIT	1.600.000	3.200.000	
	- Scanner	2	UNIT	6.500.000	13.000.000	
	- Printer	5	UNIT	5.000.000	25.000.000	
	- Printer portable	2	UNIT	7.000.000	14.000.000	
	- Kamera Action	1	UNIT	9.000.000	9.000.000	
B	Pengadaan Sound System	-		-	192.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	192.000.000	A
	- Pengadaan Sound System	1	UNIT	192.000.000	192.000.000	
C	Pengadaan Pendingin Ruangan					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	14.400.000	A
	- AC	2	UNIT	7.200.000	14.400.000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-		-	46.900.000	
A	Meubeler kantor	-		-	46.900.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	46.900.000	A
	> KANTOR BALAI	-		-	46.900.000	
	- Rak penyimpanan/Bufet	1	UNIT	11.700.000	11.700.000	
	- Lemari arsip	1	UNIT	4.200.000	4.200.000	
	- Mesin potong rumput	1	UNIT	7.000.000	7.000.000	
	- Mimbar Podium	1	UNIT	5.000.000	5.000.000	
	>> KANTOR BKW II	-		-	19.000.000	
	- Televisi LED	1	UNIT	7.000.000	7.000.000	
	- Kursi Sofa	1	SET	12.000.000	12.000.000	

E. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Tercapainya Layanan internal pada tahun 2020.

3. OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.994) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 21.839.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

a. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam *foAat I-account (unified budget)*.
b. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium teA expenditure framework*).

c. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*perfoAance based budgeting*).
Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PP Nomor 90 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan, dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Bahan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan serta bahan perencanaan dan evaluasi kinerja dapat bersumber pada Statistik Ditjen dan Statistik Setditjen KSDAE. Untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sebab mutu data sangat dipengaruhi oleh prosedur/tatacara pengumpulan data, kelengkapan dokumen, konsistensi dalam pelaporan serta jadwal pelaporan yang tepat.

Saat ini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas, akibat ketiadaan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu output dalam melaksanakan evaluasi kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan dokumen perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana terdapat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020 lingkup Ditjen KSDAE dalam bingkai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan informasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan :

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Layanan Perkantoran didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya.

Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE maka diperlukan pembangunan gedung dan bangunan sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja para pegawainya.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya seluruh pegawai Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.
2. Masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE.
3. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan pada umumnya dan konservasi pada khususnya.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan output Layanan Perkantoran dilaksanakan setiap bulan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Kegiatan yang direncanakan yaitu :

a. Gaji dan Tunjangan

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor terdiri dari :

- Keperluan Sehari-Hari Perkantoran
- Langganan Daya dan Jasa
- Pemeliharaan Sarana Kantor
- Pemeliharaan Sarana Gedung/Kantor
- Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
- Pembuatan Kartu Pas Bandara dan Sewa Ruangan
- Perjalanan Pimpinan
- Sewa Rumah Dinas Eselon III dan IV
- Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)
- Proses PBB dan BMN Satker
- Sewa Perahu Untuk Operasional SM Harlu, TB Pulau Ndana, TWAL Gugus Teluk Maumere dan Alor
- Operasional Resort atau Pos Badan Pelabuhan (Resort Unggulan)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu yaitu :

Kode	Aktivitas	Bulan pada tahun 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
002	Operasional perkantoran												

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada tabel :

Tabel III. 35 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TEA OF REFERENCE OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.994)

KODE	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	SD
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	-		-	21.839.000.000	
5419.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1	Layanan	-	21.839.000.000	
001	Gaji dan Tunjangan	-		-	17.179.000.000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-		-	17.179.000.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	-		-	6.933.968.000	A
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1	TAHUN	5.961.321.520	5.961.321.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	972.647.000	972.647.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-		-	171.000	A
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	TAHUN	161.026	161.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13 dan 14) [1 BULAN x 10688 10688]	1	BULAN	10.688	10.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-		-	705.110.000	A
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	TAHUN	633.791.510	633.791.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	71.319.490	71.319.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	-		-	217.247.000	A
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1	TAHUN	195.688.076	195.688.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	21.559.922	21.559.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	-		-	208.715.000	A
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1	TAHUN	191.325.000	191.325.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	17.390.000	17.390.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	-		-	343.665.000	A
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	TAHUN	296.205.000	296.205.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	47.460.000	47.460.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	-		-	21.343.000	A
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1	TAHUN	18.566.380	18.566.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	2.777.620	2.777.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	-		-	541.400.000	A
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1	TAHUN	541.400.000	541.400.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS	-		-	1.111.400.000	A
	- Belanja Uang Makan PNS	1	TAHUN	1.111.400.000	1.111.400.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	-		-	327.675.000	A
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	TAHUN	295.960.000	295.960.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	31.715.000	31.715.000	

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	-		-	6.768.306.000	A
	- Tunjangan Kinerja PNS	1	TAHUN	6.768.306.768	6.768.306.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-		-	4.660.000.000	
A	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	-		-	578.490.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-		-	220.990.000	A
	> BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	-		-	220.990.000	
	- Fotocopy, surat kabar/ majalah, dan bahan konsumsi [154 PEG x 1 TAHUN]	154	OT	1.435.000	220.990.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	242.000.000	A
	> KEGIATAN KORWIL	-		-	242.000.000	
	- Rapat internal dan rapat koordinasi antar UPT Kemen LHK Wilayah NTT	30	KEG	2.500.000	75.000.000	
	- Biaya minuman dan makanan kecil untuk menjamu tamu pimpinan	1	TAHUN	50.000.000	50.000.000	
	- Biaya kegiatan hari kemerdekaan, hari besar lingkungan hidup dan kebutuhan	1	TAHUN	30.000.000	30.000.000	
	- Rapat RKW dengan unsur 3 pilar (Pemerintah, Agama dan Adat)	87	KEG	1.000.000	87.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-		-	115.500.000	A
	> BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	-		-	115.500.000	
	- ATK, bahan cetakan dan alat rumah tangga [154 PEG x 1 TAHUN]	154	OT	750.000	115.500.000	
B	Langganan Daya dan Jasa	-		-	476.500.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-		-	84.500.000	A
	- Pengiriman surat dinas Kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	60.000.000	60.000.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Bidang KSDA Wilayah I	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	10.100.000	10.100.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah I	1	TAHUN	2.400.000	2.400.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah II	1	TAHUN	1.500.000	1.500.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah III	1	TAHUN	2.000.000	2.000.000	
	- Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah IV	1	TAHUN	2.500.000	2.500.000	
522111	Belanja Langganan Listrik	-		-	167.600.000	A
	- Langganan listrik kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	110.000.000	110.000.000	
	- Langganan listrik kantor Bidang KSDA Wilayah I	12	BULAN	400.000	4.800.000	
	- Langganan listrik kantor Bidang KSDA Wilayah II	12	BULAN	400.000	4.800.000	
	- Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah I	12	BULAN	300.000	6.000.000	
	- Langganan listrik kantor Seksi	12	BULAN	300.000	3.600.000	

	Konservasi Wilayah II					
	- Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah III	12	BULAN	300.000	3.600.000	
	- Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	12	BULAN	350.000	4.200.000	
	- Langganan listrik kantor Resort Konservasi pada Bidang KSDA Wilayah I	12	BULAN	350.000	6.600.000	
	- Langganan listrik kantor Resort Konservasi pada Bidang KSDA Wilayah II	12	BULAN	1.000.000	12.000.000	
	- Langganan listrik ruangan pengawasan peredaran TSL Bandara El Tari Kupang	12	BULAN	1.000.000	12.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon	-		-	165.600.000	A
	- Langganan telepon/internet kantor Balai Besar KSDA NTT	12	BULAN	6.000.000	72.000.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Bidang KSDA Wilayah I	12	BULAN	1.800.000	21.600.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Bidang KSDA Wilayah II	12	BULAN	1.000.000	12.000.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah I	12	BULAN	1.700.000	20.400.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah II	12	BULAN	900.000	10.800.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah III	12	BULAN	1.000.000	12.000.000	
	- Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	12	BULAN	1.000.000	12.000.000	
	- Langganan telepon/internet kantor RKW Bidang KSDA Wilayah I	12	BULAN	200.000	2.400.000	
	- Langganan telepon/internet kantor RKW Bidang KSDA Wilayah II	12	BULAN	200.000	2.400.000	
522113	Belanja Langganan Air	-		-	58.800.000	A
	- Langganan air kantor Balai Besar KSDA NTT	12	BULAN	2.000.000	24.000.000	
	- Langganan air kantor Bidang KSDA Wilayah I	12	BULAN	500.000	6.000.000	
	- Langganan air kantor Bidang KSDA Wilayah II	12	BULAN	250.000	3.000.000	
	- Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah I	12	BULAN	500.000	6.000.000	
	- Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah II	12	BULAN	800.000	9.600.000	
	- Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah III	12	BULAN	100.000	1.200.000	
	- Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	12	BULAN	250.000	3.000.000	
	- Langganan air kantor RKW pada BKW I	12	BULAN	250.000	3.000.000	
	- Langganan air kantor RKW pada BKW II	12	BULAN	250.000	3.000.000	
C	Pemeliharaan Sarana Kantor	-		-	1.246.830.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-		-	1.246.830.000	A
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer/PC Unit/Desktop	24	UNIT	600.000	14.400.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan	45	UNIT	600.000	27.000.000	

	Operasional Laptop					
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split	43	UNIT	550.000	23.650.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Standing	2	UNIT	1.000.000	2.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Printer	43	UNIT	500.000	21.500.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset lebih kecil dari 1 Kva	3	UNIT	500.000	1.500.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II	2	UNIT	37.980.000	75.960.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	10	UNIT	30.000.000	300.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (double gardan)	8	UNIT	32.000.000	256.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	45	UNIT	3.000.000	135.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 3	1	UNIT	3.000.000	3.000.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speedboat	2	UNIT	20.240.000	40.480.000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Perahu Motor	3	UNIT	18.000.000	54.000.000	
	- Pemeliharaan inventaris kantor lainnya	1	TAHUN	292.340.000	292.340.000	
D	Pemeliharaan Sarana Gedung/Kantor	-		-	434.950.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-		-	329.350.000	A
	> KANTOR BALAI	-		-	91.200.000	
	- Pemeliharaan Gedung I Kantor Balai (Aula)	238	M2	75.000	17.850.000	
	- Pemeliharaan Gedung II Kantor Balai (Eks Spore)	120	M2	75.000	9.000.000	
	- Pemeliharaan Gedung III Kantor Balai (Gedung Utama)	400	M2	75.000	30.000.000	
	- Pemeliharaan Gedung IV Kantor Balai (Bidang Teknis)	200	M2	75.000	15.000.000	
	- Pemeliharaan pagar kantor BBKSDA NTT	200	M	75.000	15.000.000	
	- Pemeliharaan garasi kendaraan BBKSDA NTT	58	M2	75.000	4.350.000	
	> BKW I	-		-	37.925.000	
	- Pemeliharaan kantor BKW I	70	M2	75.000	5.250.000	
	- Pemeliharaan kantor SKW II	70	M2	75.000	5.250.000	
	- Pemeliharaan pos jaga resort SM Kateri, CA Maubesi, CA Mutis, TWA Menipo, TB Bena, TWAL Teluk Kupang [6 UNIT x 24 M2]	144	M2	75.000	10.800.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas BKW I	70	M2	75.000	5.250.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas SKW I	45	M2	75.000	3.375.000	
	- Pemeliharaan taman kantor BKW I	1	PAKET	8.000.000	8.000.000	
	> BKW II	-		-	200.225.000	

	- Pemeliharaan kantor BKW II (Gedung Utama) [1 UNIT x 120 M2]	120	M2	75.000	9.000.000	
	- Pemeliharaan kantor BKW II (Gedung Belakang) [2 UNIT x 70 M2]	140	M2	75.000	10.500.000	
	- Pemeliharaan Guest House BKW II [1 UNIT x 200 M2]	200	M2	75.000	15.000.000	
	- Pemeliharaan Pagar Kantor BKW II [1 UNIT x 432 M2]	432	M2	75.000	32.400.000	
	- Pemeliharaan Landscap halaman Kantor BKW II [1 UNIT x 500 M2]	500	M2	10.000	5.000.000	
	- Pemeliharaan kantor SKW III, SKW IV Maumere dan SKW IV Kalabahi [3 UNIT x 70 M2]	210	M2	75.000	15.750.000	
	- Pemeliharaan pos jaga Resort Konservasi Wilayah [5 UNIT x 36 M2]	180	M2	75.000	13.500.000	
	- Pemeliharaan pos jaga/loket karcis RKW di Riung [1 UNIT x 72 M2]	72	M2	75.000	5.400.000	
	- Pemeliharaan pondok kerja dan barak polhut RKW TWA Ruteng di Robo dan Ranamese [2 UNIT x 50 M2]	100	M2	75.000	7.500.000	
	- Pemeliharaan pondok kerja Resort Konservasi Wilayah [5 UNIT x 70 M2]	350	M2	75.000	26.250.000	
	- Pemeliharaan pondok kerja di Ranamese [1 UNIT x 210 M2]	210	M2	75.000	15.750.000	
	- Pemeliharaan visitor center di Robo dan Auditorium di Ranamese [2 UNIT x 200 M2]	400	M2	75.000	30.000.000	
	>> Pemeliharaan Kandang Satwa	-		-	14.175.000	
	- Pemeliharaan kandang satwa buaya 1	169	M2	75.000	12.675.000	
	- Pemeliharaan kandang satwa buaya 2	20	M2	75.000	1.500.000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-		-	105.600.000	A
	- Pemeliharaan rumah dinas kepala bidang di Ruteng [1 UNIT x 120 M2]	120	M2	75.000	9.000.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas di Ruteng [6 UNIT x 70 M2]	420	M2	75.000	31.500.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas di Ruteng [8 UNIT x 36 M2]	288	M2	75.000	21.600.000	
	- Pemeliharaan garasi kompleks bidang KSDA wilayah II [1 UNIT x 64 M2]	64	M2	75.000	4.800.000	
	- Pemeliharaan pagar kompleks perumahan TWA Ruteng [1 UNIT x 376 M2]	376	M2	75.000	28.200.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas kepala seksi wilayah III di Bajawa [1 UNIT x 70 M2]	70	M2	75.000	5.250.000	
	- Pemeliharaan rumah dinas kepala seksi wilayah IV di Maumere [1 UNIT x 70 M2]	70	M2	75.000	5.250.000	
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	-		-	487.080.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-		-	487.080.000	A

	> PENGELOLA KEUANGAN	-		-	267.120.000	
	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORANG x 12 BULAN]	12	BULAN	3.420.000	41.040.000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	1.320.000	15.840.000	
	- Staf Pengelola KPA [2 ORANG x 12 BULAN]	24	OB	980.000	23.520.000	
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	1.520.000	18.240.000	
	- Verifikator keuangan yang dibantu pada PPSPM (operator) [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen I [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	2.000.000	24.000.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen II [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	1.500.000	18.000.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen III [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	900.000	10.800.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen IV [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	1.270.000	15.240.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen V [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	1.700.000	20.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu I [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	980.000	11.760.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu II [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	570.000	6.840.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu III [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu IV [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	570.000	6.840.000	
	- Staf Pengelola di PPK I [2 ORANG x 12 BULAN]	24	OB	500.000	12.000.000	
	- Staf Pengelola di PPK II [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Staf Pengelola di PPK IV [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Staf Pengelola di PPK V [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Koordinator petugas pengelola administrasi belanja pegawai [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	550.000	6.600.000	
	- Operator petugas pengelola administrasi belanja pegawai [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	> PENGELOLA SAI	-		-	16.800.000	
	- Penanggung jawab (UAKPA/Barang) [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	300.000	3.600.000	
	- Koordinator/Operator (UAKPA/Barang), satker dan wilayah [2 ORANG x 12 BULAN]	24	OB	250.000	6.000.000	
	- Anggota/Petugas (UAKPA/Barang), satker dan wilayah [4 ORANG x 12 BULAN]	48	OB	150.000	7.200.000	

	> PENGELOLA BMN	-		-	18.000.000	
	- Koordinator/operator (UAKPA/Barang), satker dan wilayah [2 ORANG x 12 BULAN]	24	OB	250.000	6.000.000	
	- Anggota/Petugas (UAKPA/Barang), satker dan wilayah [4 ORANG x 12 BULAN]	48	OB	150.000	7.200.000	
	- Honor pengurus/penyimpan BMN/pengelola barang persediaan [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	250.000	3.000.000	
	> BIAYA OPERASIONAL PENYULUH KEHUTANAN	-		-	38.400.000	
	- Biaya Operasional Penyuluh [8 ORG x 12 BLN]	96	OB	400.000	38.400.000	
	> HONOR PENGADAAN BARANG/JASA	-		-	21.360.000	
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	650.000	7.800.000	
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	420.000	5.040.000	
	- Pejabat Pemeriksa/ Penerima barang [2 ORANG x 12 BULAN]	24	OB	355.000	8.520.000	
	> PENGELOLA PNBP	-		-	37.800.000	
	- Atasan Langsung Bendahara Penerima [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	500.000	6.000.000	
	- Bendahara Penerima [1 ORANG x 12 BULAN]	12	OB	450.000	5.400.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) TSL	12	OB	250.000	3.000.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWA Camplong	12	OB	250.000	3.000.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWA Menipo	12	OB	250.000	3.000.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) TWA Ruteng di Ranaka	12	OB	200.000	2.400.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) TWA Ruteng di Ranamese	12	OB	200.000	2.400.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL 17 Pulau [1 ORG x 12 BLN]	12	OB	300.000	3.600.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL 17 Pulau [2 ORG x 12 BLN]	24	OB	250.000	6.000.000	
	- Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	12	OB	250.000	3.000.000	
	> PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KANTOR	-		-	89.400.000	
	- Upah petugas kebersihan kantor balai (2 orang)	576	HOK	60.000	34.560.000	
	- Upah petugas pengaman kantor balai	288	HOK	60.000	17.280.000	
	- Upah petugas kebersihan kantor bidang II	288	HOK	60.000	17.280.000	
	- Upah petugas pengemudi kapal di TWA 17 pulau Riung	288	HOK	60.000	17.280.000	
F	Pembuatan Kartu Pas Bandara dan Sewa Ruangan	-		-	113.650.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	13.150.000	A
	- Pembuatan kartu Pas Bandara	1	KEG	10.300.000	10.300.000	

	Eltari Kupang					
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Maumere	2	ORANG	150.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Labuan Bajo	4	ORANG	150.000	600.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Ruteng	1	ORANG	300.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Atambua	2	ORANG	150.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Sumba	2	ORANG	150.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Ende	1	ORANG	300.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Bajawa	1	ORANG	300.000	300.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Larantuka	1	ORANG	150.000	150.000	
	- Pembuatan kartu Pas Bandara Alor	1	ORANG	300.000	300.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				50.000.000	A
	- Percetakan karcis MOWA	1	KEG	50.000.000	50.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	50.500.000	A
	- Sewa ruangan di Bandara Eltari untuk pengamanan peredaran TSL	1	TAHUN	45.000.000	45.000.000	
	- Sewa Tanah Kantor RKW Teluk Kupang	1	TAHUN	2.500.000	2.500.000	
	- Sewa Kantor RKW CA Mutis 2	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
G	Sewa Rumah Dinas Eselon III dan IV	-		-	120.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	117.000.000	A
	- Sewa rumah dinas eselon III di Soe	1	UNIT	17.000.000	17.000.000	
	- Sewa rumah dinas eselon IV di Kupang	5	UNIT	20.000.000	100.000.000	
H	Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)	-		-	1.092.000.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-		-	1.092.000.000	A
	- Honorarium tenaga kontrak pengemudi, pramubakti, kebersihan dan keamanan [15 ORG x 13 BLN]	195	OB	2.000.000	390.000.000	
	- Honorarium tenaga kontrak pengamanan kawasan [27 ORG x 13 BLN]	351	OB	2.000.000	702.000.000	
I	Proses HDNO (Harga Dasar Bangunan Rumah Negara)				17.500.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				17.500.000	A
	- Pengurusan IMB	1	KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Proses penghapusan BMN	1	KEG	7.500.000	7.500.000	
J	Sewa Perahu Untuk Operasional Resort Konservasi Wilayah	-		-	36.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	36.000.000	A
	- Sewa Perahu di TWAL Teluk Maumere dan CA Maubesi	2	RESORT	8.000.000	16.000.000	
	- Sewa Perahu di SM Harlu dan TB Ndana, TWA Pulau Rusa, TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang	2	RESORT	10.000.000	20.000.000	
K	Operasional Resort atau Pos Badan				60.000.000	

	Pelabuhan (Resort Unggulan)					
521211	Belanja Bahan				60.000.000	A
	- Operasional Resort Unggulan (Bandara, SM Harlu, TB Bena, TWAL 17 Pulau dan TWAL Teluk Maumere) [5 RESORT x 1 KEG]	5	KEG	12.000.000	60.000.000	

Tabel III. 36 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TEA OF REFERENCE

E. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya layanan perkantoran sebanyak 12 bulan layanan pada tahun 2020.

4. OUTPUT LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DIDALAM KAWASAN KONSERVASI (5420.002) DAN OUTPUT DOKUMEN PEMOLAAN KAWASAN KONSERVASI ALAM (5420.003) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 809.400.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai pasal 4 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam penguasaan hutan oleh negara tersebut adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Implementasi dari pengurusan tersebut meliputi kegiatan penyelenggaraan: Perencanaan kehutanan, Pengelolaan hutan, Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan Pengawasan. Salah satu bagian pokok dalam perencanaan kehutanan adalah penyusunan Rencana Pengelolaan. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi acuan pengelola dalam melaksanakan pengelolaannya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 14 – 20 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan melakukan penataan kawasan sebagai pedoman arah pengelolaan kawasan konservasi. Blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional. Penataan kawasan dimaksud diantaranya adalah pembagian kawasan kedalam zona atau blok pengelolaan.

Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 – 2019 telah ditetapkan salah satu indicator kinerja kegiatan (IKK) dari program konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 dokumen penataan zonasi taman nasional maupun penataan blok non taman nasional.

Selain dari pada itu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) skala 1:50.000. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018).

Peta zona/blok Kawasan konservasi yang tersedia pada saat ini (*eksisting*) merupakan lampiran Dokumen Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dokumen Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui tahapan antara lain : inventarisasi potensi, penyusunan rancangan zona/blok, konsultasi publik, penilaian dan pengesahan dokumen.

Selanjutnya Peta zona/blok Kawasan konservasi yang tersedia pada saat ini (*eksisting*) dikompilasi dengan Peta Batas Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yang bersumber dari Dit Pengukuhan Ditjen PKTL. Langkah terakhir adalah proses integrasi dengan Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta zona/blok yang telah diintegrasikan pada skala 1:50.000 akan dilakukan verifikasi oleh BIG.

Sampai tahun 2016 Kawasan konservasi yang ada di wilayah Indonesia dari jumlah total kawasan konservasi sebanyak 556 KK, yang telah memiliki penataan zona/blok sebanyak 171 KK. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan penyusunan Zona atau Blok guna sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi dan juga untuk memenuhi target IKK serta pelaksanaan KSP tahap I tahun 2016.

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur mengelola 28 (dua puluh) kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyediakan dokumen blok pengelolaan kawasan
2. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan KSA dan KPA

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan adalah:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
2. Pemangku kepentingan lainnya yang membidangi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem khususnya bidang pemolaan dan informasi konservasi alam
3. Balai Besar KSDA NTT
4. Pemangku kepentingan yang membidang kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di tingkat daerah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen Penataan blok pengelolaan kawasan pada Balai Besar KSDA NTT adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

- Dilakukan dengan cara pembentukan tim kerja, rapat persiapan dan pembuatan rencana kerja
2. Pengumpulan data dan analisa
Dilakukan dengan cara survey potensi kawasan untuk mengumpulkan data keperluan penataan kawasan
 3. Penyusunan Rancangan Dokumen
Menganalisa dengan metode yang sesuai dengan kawasan konservasi
 4. Konsultasi Publik
Melakukan konsultasi publik hasil rancangan dengan mengundang stakeholder terkait untuk mendapat masukan dan informasi dalam rangka penyempurnaan dokumen
 5. Pembahasan ke Pusat
Dilakukan dengan cara pembahasan dan presentasi dalam penilaian dan pengesahan dokumen.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi

Metode pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- Koordinasi awal dengan Mitra
- Melakukan pencermatan terhadap proposal pemohon
- Memproses permohonan kerjasama Mitra
- Penyusunan draft PKS
- Penandatanganan PKS setelah mendapat persetujuan dari Dirjen KSDAE
- Penyusunan RPP dan RKT
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran dari Kegiatan direncanakan mulai dari Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

No	Uraian	Jadwal											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei.	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi [Base Line]												
1	Evaluasi Kesesuaian Fungsi												
2	Pemetaan kondisi kawasan menggunakan Drone di Pulau Flores												
B	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi [Base Line]												
1	Penataan Blok Kawasan Konservasi												
2	Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi												

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Alokasi anggaran kegiatan pencapaian pada tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel III. 37 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	-		-	809.400.000	
5420.002	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi [Base Line]	21.707	Hektar	-	181.500.000	
5420.002.001	Satker KSDA	-		-	181.500.000	
053	Jumlah rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantapan fungsi KK	-		-	181.500.000	
A	Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan SM Harlu	-		-	181.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	4.675.000	A
	- Alat dan bahan	1	KEG	1.675.000	1.675.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan draft rencana kerja di UPT	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Penggandaan draft rencana kerja	20	EKS	25.000	500.000	
	- Penggandaan dokumen pasca pembahasan pusat	5	EKS	100.000	500.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI]	16	OH	50.000	800.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	1.600.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI]	16	HOK	100.000	1.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	5.600.000	A
	- Narasumber pembahasan laporan di kabupaten dan pusat	4	OJ	900.000	3.600.000	
	- Moderator pembahasan laporan di kabupaten dan pusat	4	OK	500.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	150.500.000	A
	- Perjalanan dalam rangka pengumpulan data sekunder/ koordinasi	4	OT	4.000.000	16.000.000	
	- Perjalanan dari pusat untuk kajian lapangan	2	OT	9.000.000	18.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	4	OT	5.000.000	20.000.000	
	- Perjalanan dari Bidang untuk kajian lapangan	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan dari seksi untuk kajian lapangan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	- Perjalanan dari Kabupaten (pemda dan resort) untuk kajian lapangan	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	- Perjalanan tim dari UPT untuk presentasi di Jakarta	4	OT	8.000.000	32.000.000	
	- Perjalanan tim dari UPT untuk pembahasan di kabupaten	4	OT	5.000.000	20.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi/koordinasi	2	OT	8.500.000	17.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan	3	OT	5.000.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	19.125.000	A
	- Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	35	OH	375.000	13.125.000	
	- Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
	- Uang harian fullday rapat pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
5420.003	Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi [Base Line]	1	Dokumen	-	627.900.000	
5420.003.001	Satker KSDA	-		-	627.900.000	
051	Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	-		-	530.900.000	
A	Penyusunan dokumen penataan blok pengelolaan CA Mutis	-		-	87.650.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	10.550.000	A
	> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-		-	10.550.000	
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Lapangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	OH	50.000	800.000	
	>> KONSULTASI PUBLIK	-		-	5.750.000	
	- Alat dan bahan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	- Konsumsi konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	35.000	700.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan di	20	OH	65.000	1.300.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	pusat [20 ORANG x 1 KALI]					
	- Penggandaan draft [15 EKSP x 1 KEG]	15	EKS	50.000	750.000	
	- Penggandaan final dokumen penataan blok [10 EKSP x 1 KEG]	10	EKS	200.000	2.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	1.200.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	HOK	75.000	1.200.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan konsultasi publik	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	72.500.000	A
	> > GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-		-	25.000.000	
	- Perjalanan petugas dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	4.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan petugas dari bidang/seksi [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan petugas dari resort [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	1.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	> KONSULTASI PUBLIK	-		-	47.500.000	
	- Perjalanan dari balai dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	8	OT	4.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan dari bidang/seksi dalam rangka konsultasi publik [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	1.500.000	1.500.000	
	- Perjalanan dari resort dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	1.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	>> PEMBAHASAN DI PUSAT	-		-	27.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka pembahasan [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	9.000.000	18.000.000	
	- Konsultasi/koordinasi [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	9.000.000	9.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	2.400.000	A
	- Transport peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	60.000	1.200.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Uang saku peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	60.000	1.200.000	
B	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan CA Riung	-	-	-	157.950.000	
521211	Belanja Bahan	-	-	-	12.350.000	A
	> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-	-	-	12.350.000	
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Lapangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	OH	50.000	800.000	
	>> KONSULTASI PUBLIK	-	-	-	7.550.000	
	- Alat dan bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Konsumsi konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan di pusat [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	80.000	1.600.000	
	- Penggandaan draft [15 EKSP x 1 KEG]	15	EKS	50.000	750.000	
	- Penggandaan final dokumen penataan blok [10 EKSP x 1 KEG]	10	EKS	200.000	2.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	-	-	1.600.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa	-	-	-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan konsultasi publik	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	139.000.000	A
	> > GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-	-	-	42.000.000	
	- Perjalanan petugas dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	7.000.000	21.000.000	
	- Perjalanan petugas dari bidang/seksi [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan petugas dari resort [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	1.500.000	3.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	7.000.000	14.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	> KONSULTASI PUBLIK	-		-	97.000.000	
	- Perjalanan dari balai dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	- Perjalanan dari bidang/seksi dalam rangka konsultasi publik [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dari resort dalam rangka konsultasi publik [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	500.000	1.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	6.000.000	6.000.000	
	- Biaya penginapan peserta	10	OH	600.000	6.000.000	
	>> PEMBAHASAN DI PUSAT	-		-	63.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka pembahasan [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	9.000.000	27.000.000	
	- Konsultasi/koordinasi [4 ORANG x 1 KEG]	4	OT	9.000.000	36.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	4.000.000	A
	- Transport peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
	- Uang saku peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
C	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan CA Ndeti Kelikima	-		-	126.950.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	12.350.000	A
	> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-		-	12.350.000	
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Lapangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	OH	50.000	800.000	
	>> KONSULTASI PUBLIK	-		-	7.550.000	
	- Alat dan bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Konsumsi konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	60.000	1.200.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Konsumsi rapat pembahasan di pusat [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	80.000	1.600.000	
	- Penggandaan draft [15 EKSP x 1 KEG]	15	EKS	50.000	750.000	
	- Penggandaan final dokumen penataan blok [10 EKSP x 1 KEG]	10	EKS	200.000	2.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	1.600.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan konsultasi publik	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	108.000.000	A
	> > GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-		-	43.500.000	
	- Perjalanan petugas dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	7.000.000	21.000.000	
	- Perjalanan petugas dari bidang/seksi [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan petugas dari resort [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	1.500.000	4.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	7.000.000	14.000.000	
	> KONSULTASI PUBLIK	-		-	64.500.000	
	- Perjalanan dari balai dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	- Perjalanan dari bidang/seksi dalam rangka konsultasi publik [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dari resort dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	500.000	1.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	6.000.000	6.000.000	
	>> PEMBAHASAN DI PUSAT	-		-	36.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka pembahasan [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	9.000.000	18.000.000	
	- Konsultasi/koordinasi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	9.000.000	18.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	4.000.000	A

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Transport peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
	- Uang saku peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
D	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan SM Perhatu	-	-	-	99.950.000	
521211	Belanja Bahan	-	-	-	12.350.000	A
	> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-	-	-	12.350.000	
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Perlengkapan Lapangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	OH	50.000	800.000	
	>> KONSULTASI PUBLIK	-	-	-	7.550.000	
	- Alat dan bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Konsumsi konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	60.000	1.200.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan di pusat [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	80.000	1.600.000	
	- Penggandaan draft [15 EKSP x 1 KEG]	15	EKS	50.000	750.000	
	- Penggandaan final dokumen penataan blok [10 EKSP x 1 KEG]	10	EKS	200.000	2.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-	-	-	1.600.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI x 1 KEG]	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa	-	-	-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan konsultasi publik	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	81.000.000	A
	> > GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN	-	-	-	28.500.000	
	- Perjalanan petugas dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	4.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan petugas dari bidang/seksi [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan petugas dari resort [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	1.500.000	4.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	4.000.000	8.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	> KONSULTASI PUBLIK	-		-	52.500.000	
	- Perjalanan dari balai dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	- Perjalanan dari bidang/seksi dalam rangka konsultasi publik [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dari resort dalam rangka konsultasi publik [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	500.000	1.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	>> PEMBAHASAN DI PUSAT	-		-	36.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka pembahasan [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	9.000.000	18.000.000	
	- Konsultasi/koordinasi [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	9.000.000	18.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	4.000.000	A
	- Transport peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
	- Uang saku peserta konsultasi publik [20 ORANG x 1 KALI]	20	OH	100.000	2.000.000	
E	Penandaan Batas Blok Kawasan di Pulau Timor Sepanjang 20 Km	-		-	58.400.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	14.900.000	A
	- Alat dan bahan	1	KEG	1.600.000	1.600.000	
	- Pembuatan tanda batas	400	BUAH	25.000	10.000.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan hasil penandaan batas	20	OH	35.000	700.000	
	- Penggandaan laporan penandaan batas	5	EKSPL	50.000	250.000	
	- Penggandaan peta hasil penandaan batas	5	EKSPL	50.000	250.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 15 HARI]	60	OH	35.000	2.100.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	4.500.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 15 HARI]	60	OH	75.000	4.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	39.000.000	A
	- Perjalanan supervisi dalam rangka penandaan batas	2	OT	3.000.000	6.000.000	

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Perjalanan dari Balai untuk penandaan batas	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan dari bidang/seksi untuk penandaan batas	2	OT	1.500.000	3.000.000	
	- Perjalanan dari resort untuk penandaan batas	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi/koordinasi	1	OT	10.000.000	10.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi kegiatan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
053	Kerjasama di Kawasan Konservasi	-		-	97.000.000	
A	Penyusunan dan penandatanganan PKS	-		-	36.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.000.000	D
	- Bahan dan pelaporan	2	KEG	600.000	1.200.000	
	- Konsumsi rapat [15 ORANG x 1 HARI x 2 KLPK]	30	OH	40.000	1.200.000	
	- Spanduk	2	UNIT	300.000	600.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	2.000.000	A
	- Sewa ruangan dalam penandatanganan PKS	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	24.000.000	D
	- Perjalanan dinas dari balai	2	OT	4.500.000	9.000.000	
	- Perjalanan dinas dari balai ke SKW IV	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	- Perjalanan dinas dari BKW II	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	- Perjalanan dinas dari BKW II	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dinas dari SKW III	1	OT	2.500.000	2.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-		-	3.000.000	A
	- Perjalanan dinas dari SKW IV	1	OT	1.000.000	1.000.000	
	- Perjalanan dinas dari RKW	2	OT	1.000.000	2.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	4.500.000	D
	- Uang saku peserta [15 ORANG x 2 KEG]	30	OH	75.000	2.250.000	
	- Transport peserta [15 ORANG x 2 KEG]	30	OH	75.000	2.250.000	
B	Bimbingan Teknis Kerja sama	-		-	50.450.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	800.000	D

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	800.000	800.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	9.200.000	A
	- Honor narasumber/ pembicara [5 ORANG x 2 JAM x 1 KALI]	10	OJ	600.000	6.000.000	
	- Honor moderator [2 ORANG x 2 JAM x 2 KALI]	8	OJ	400.000	3.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	16.000.000	D
	- Perjalanan tim ke pusat	2	OT	8.000.000	16.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	24.450.000	D
	- Akomodasi dan konsumsi (fullday) [20 ORANG x 2 HARI]	40	OH	350.000	14.000.000	
	- Transport peserta [20 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	40	OH	150.000	6.000.000	
	- Transport moderator pada konsultasi publik [3 ORANG x 1 KALI]	3	OH	150.000	450.000	
	- Uang saku peserta [20 ORANG x 2 HARI]	40	OH	100.000	4.000.000	
C	Evaluasi Kerja Sama	-		-	10.050.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	2.550.000	D
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	750.000	750.000	
	- Konsumsi rapat [15 ORANG x 2 KALI]	30	OH	60.000	1.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	7.500.000	D
	- Perjalanan tim UPT	3	OT	2.500.000	7.500.000	

F. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi dan target pelaksanaan kegiatan adalah:

- Evaluasi Kesesuaian fungsi SM Harlu di Kabupaten Rote Ndao
- Penyusunan dokumen penataan blok pengelolaan adalah CA Mutis di Timor Tengah Selatan.
- Penyusunan dokumen penataan blok pengelolaan adalah CA Riung di Kabupaten Ngada
- Penyusunan dokumen penataan blok pengelolaan adalah CA Ndeti Kelikima di Kabupaten Ende
- Penyusunan dokumen penataan blok pengelolaan adalah SM Perhatu di Kabupaten Kupang

5. OUTPUT LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI PERMASALAHANNYA (5421.001) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.081.103.000,-

A. GAMBARAN UMUM

Balai Besar KSDA NTT mempunyai tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah mengelola kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA NTT sejumlah 28 kawasan dengan rincian 8 cagar alam (CA), 9 taman wisata alam (TWA) dan 6 suaka margasatwa (SM), 3 Taman Buru (TB) dengan total luas 233.269 Ha.

Kawasan konservasi NTT tidak luput dari gangguan penjarahan dan perambahan dan berdampak terhadap ekosistem. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, menyatakan bahwa pemulihan ekosistem dapat dilakukan melalui mekanisme alam, rehabilitasi dan restorasi. Dengan restorasi tersebut penting artinya bagi berkembangnya populasi jenis – jenis satwa terutama jenis yang dilindungi.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sub agenda ketahanan air, salah satunya adalah melalui kegiatan pemulihan ekosistem baik di hutan konservasi maupun di hutan produksi. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menargetkan bahwa sampai tahun 2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha. Sesuai SK Dirjen KSDAE No: SK. 18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdaegradasi, BBKSDA NTT mendapat alokasi seluas 669,35 Ha yang tersebar pada 4 lokasi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan UPT Balai Besar/Balai KSDA (berupa manfaat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi yang efisien dan lestari).

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat (berupa manfaat ekonomi dan berupa sosial budaya).
3. Dunia Pendidikan/Perguruan Tinggi, Peneliti, dll (manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan).
4. Masyarakat dan stakeholder lainnya (manfaat ekonomi, ekologi dan berupa sosial budaya).

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Lokasi

- a. Kegiatan pembibitan dan penanaman pengkayaan dilaksanakan di TWA Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur seluas 130 Ha
- b. Pemulihan terumbu karang di kawasan TWAL Teluk Maumere Kabupaten Sikka
- c. Honorarium tenaga kontrak (PPNPN)

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem adalah restorasi yang ditujukan untuk mengembalikan struktur vegetasi dan populasi satwa sesuai dengan aslinya melalui kegiatan percepatan proses penanaman dan atau pengkayaan.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem (PE) sebagai berikut :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana
- Penyediaan Bibit
- Penanaman/ Pengkayaan
- Pemeliharaan
- Perlindungan dan Pengamanan

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun selama tahun 2020 – 2024. Untuk tahun 2020, tata waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang dibutuhkan untuk luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya sebesar Rp. 1.081.103.000,-

Tabel III. 38 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LUAS AREA KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI PERMASALAHNYA (5421.001)

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	-		-	3.820.103.000	
5421.001	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya [Base Line]	130	Hektar	-	1.081.103.000	
5421.001.001	Satker KSDA	-		-	1.081.103.000	
052	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa	-		-	1.081.103.000	
A	Pembibitan Untuk Pemulihan Ekosistem	-		-	80.800.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	47.700.000	A
	- Pengadaan bahan dan alat persemaian/sarpras persemaian (termasuk Pompa air, pipa, bak, penampung air., Cangkul, sekop	2	PAKET	20.000.000	40.000.000	
	- Bahan makan buruh	180	OH	40.000	7.200.000	
	- Bahan dan pelaporan	1	PAKET	500.000	500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	18.500.000	A
	- Upah pengumpulan benih dan anakan cabutan	40	OH	100.000	4.000.000	
	- Upah pengisian media tanam ke dalam polybag	80	OH	100.000	8.000.000	
	- Upah penyapihan kecambah atau penanaman bibit cabutan	20	OH	100.000	2.000.000	
	- Upah pemeliharaan bibit	6	OH	750.000	4.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	14.600.000	A
	- Uang harian pelaksana teknis dilapangan/supervisi	20	OH	430.000	8.600.000	
	- Transport lokal	12	HARI	500.000	6.000.000	
B	Penanaman Pengkayaan di TWA Ruteng	-		-	367.400.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	43.400.000	A
	- Pengadaan ajir [130 HA x 400 BTG]	52.000	BTG	200	10.400.000	
	- Pengadaan bahan/peralatan kerja	2	PAKET	2.000.000	4.000.000	
	- Uang makan buruh	800	OH	35.000	28.000.000	
	- Bahan dan pelaporan	1	PAKET	500.000	500.000	
	- Pembuatan papan nama	1	UNIT	500.000	500.000	

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	260.000.000	A
	- Upah penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam	1.000	OH	100.000	100.000.000	
	- Upah pengangkutan bibit dari tempat persemaian ke tempat transit (lokasi penanaman pengkayaan) dan ajir	800	OH	100.000	80.000.000	
	- Upah penanaman dan pemasangan ajir	800	OH	100.000	80.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	64.000.000	A
	- Uang harian pelaksana teknis di lapangan (supervisi)	160	OH	350.000	56.000.000	
	- Transport lokal	16	HARI	500.000	8.000.000	
C	Pemulihan Terumbu Karang di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	-		-	31.003.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	16.975.000	A
	- Bahan dan perlengkapan (media dan bibit tanam)	100	RAK	150.000	15.000.000	
	- Bahan dan pelaporan	1	PAKET	500.000	500.000	
	- Konsumsi buruh [5 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	25	OH	59.000	1.475.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	5.950.000	A
	- Upah buruh [5 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	25	OB	100.000	2.500.000	
	- Uang harian pelaksana teknis di lapangan [3 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	15	OB	230.000	3.450.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	8.078.000	A
	- BBM kapal ke lapangan	1	PAKET	8.078.000	8.078.000	
D	Honorarium Tenaga Kontrak (PPNP)	-		-	601.900.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-		-	601.900.000	A
	- Honorarium tenaga bakti rimbawan S1 [3 ORG x 13 BLN]	39	OB	3.100.000	120.900.000	
	- Honorarium tenaga kontrak administrasi/teknis D3 [7 ORG x 13 BLN]	91	OB	2.100.000	191.100.000	
	- Honorarium tenaga bakti rimbawan D3 [4 ORG x 13 BLN]	52	OB	2.900.000	150.800.000	
	- Honorarium tenaga bakti rimbawan SMK [1 ORG x 13 BLN]	13	OB	2.700.000	35.100.000	
	- Honorarium petugas konservasi penyu [4 ORG x 13 BLN]	52	OB	2.000.000	104.00.0	

F. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

1. Kegiatan pembibitan dan penanaman pengkayaan dilaksanakan di TWA Ruteng Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur seluas 130 Ha
2. Pemulihan terumbu karang di kawasan TWAL Teluk Maumere Kabupaten Sikka

6. OUTPUT JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (5421.002) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 877.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM PROYEK

Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah penyangganya. Pada hakikatnya, daerah penyangga kawasan konservasi mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan perubahan fungsi kawasan. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah pada PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.

Keberadaan daerah penyangga kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa-desa penyangga kawasan. Menurut data dari PIKA tahun 2015, setidaknya terdapat sekitar 6.100 desa berada di sekitar kawasan konservasi. Keberadaan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi. Untuk itu pemerintah perlu untuk melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa daerah penyangga kawasan konservasi.

Salah satu langkah yang diambil oleh Ditjen KSDAE adalah program pembinaan desa binaan pada UPT lingkup ditjen KSDAE. Desa binaan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal berjumlah 159 desa dengan 143 pendamping. Desa-desa tersebut diharapkan dilakukan pembinaan secara kontinyu dan komprehensif sampai dengan tahun 2019 dan keberhasilannya diharapkan dapat menjadi model pembinaan bagi desa-desa yang lain di sekitar kawasan konservasi.

Tujuan kegiatan kolaboratif dengan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam dikawasan konservasi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya keberadaan kawasan
- d. Memperkuat kelembagaan masyarakat
- e. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan kepentingan keberadaan kawasan konservasi
- f. Memulihkan keutuhan kawasan konservasi

Ruang Lingkup kegiatan kolaboratif dengan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi ini meliputi kegiatan kemitraan konservasi, pemulihan ekosistem.

B. PENERIMA MANFAAT

Berhasilnya kegiatan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi bersama masyarakat di kawasan konservasi adalah :

1. Pengelola kawasan konservasi yakni berkurangnya interaksi negatif masyarakat terhadap kawasan konservasi.
2. Masyarakat sekitar daerah penyangga kawasan konservasi

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi sebagai berikut :

Komponen	Keterangan
Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK	Dilakukan dengan tahapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi 2. Pembentukan kelompok kemitraan 3. Penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan 4. Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)
Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Dilakukan dengan tahapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan keterampilan dan pendampingan desa binaan di Timor dan Flores 2. Peningkatan Kapasitas 3. Konsultasi/Koordinasi Tupoksi

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun selama tahun 2020 – 2024. Untuk tahun 2020, tata waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

I. Pembentukan Kelompok Kemitraan

Bidang Wilayah I

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan pembentukan kelompok kemitraan yaitu :

- a. Persiapan tim
- b. Koordinasi dengan pihak terkait
- c. Pemberian materi tentang konservasi dan Balai Besar KSDA NTT dengan metode wawancara
- d. *Focus Group Discussion* (FGD)
- e. Pembahasan hasil dan penyusunan laporan

2. Rencana Pelaksanaan

Tata Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Bulan ke)			
			4	5	6	7
1.	Pembentukan kelompok kemitraan	UPT				

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang berjumlah 2 orang yang berasal dari Bidang KSDA Wilayah I dan Seksi Konservasi Wilayah I yaitu :

- Yusuf Gunawan, S.Hut.
- Rumiko Rivando, S.Hut.

Untuk perjalanan supervisi akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah I atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah I.

Bidang Wilayah II

1. Metode Pelaksanaan

Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar dan atau di dalam kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA.

- b. Kemitraan konservasi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, membangun kesadaran kolektif masyarakat desa setempat yang berada di dalam atau di sekitar KSA dan KPA dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.
- c. Desa mempunyai peranan dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan konservasi
- d. Dalam hal anggota kemitraan konservasi lintas desa maka berasal dari desa lain maka diperlukan surat keterangan dari desa asal dan diketahui
- e. Peran desa dalam kemitraan konservasi

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh petugas teknis dari Balai/Bidang/Seksi/Resort yang dibantu oleh tenaga lapangan yang dibentuk serta para pihak terkait termasuk masyarakat sekitar.

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan di daerah penyangga kawasan konservasi oleh 2 s/d 6 orang petugas teknis selama 2 s/d 14 hari. (Juna Mardani, Koko Suwandi, Beatrix L Wisang, Arakib, Afridus Alang, Paul Pambut).

Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi Kelompok Masyarakat Adat (Mitra Konservasi) berbasis Tiga Pilar												
2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat Adat (Mitra Konservasi) berbasis Tiga Pilar												
3	Pembentukan Krida Reksa - Saka Wanabakti												
4	Monitoring/Evaluasi Kemitraan Konservasi												

Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan kegiatan di Bidang Kemitraan Konservasi pada Kawasan Konservasi lingkup Bidang KSDA Wilayah II, membutuhkan renten waktu sepanjang tahun.

II. Penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan

Bidang Wilayah I

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan dengan skema kemitraan yaitu :

- Persiapan tim
- Koordinasi dengan pihak terkait
- Focus Group Discussion* (FGD)
- Penandatanganan dokumen PKS

2. Rencana Pelaksanaan

Tata Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Kegiatan

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Bulan ke)			
			4	5	6	7
1.	Penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan	UPT				

Kegiatan penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan ini akan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu :

- Dari Balai Besar : Saturnino Xavier, S.P., M.Si. dan Kriswoyo, SE.
- Dari Bidang : Yusuf Gunawan, S.Hut.
- Dari Seksi Konservasi Wilayah I : Ida Mustikaningrum, S.Hut.
- Dari Resort Konservasi Wilayah : Melianariskus Banamtuan, SH. dan Sofyan Tuanany

Untuk kegiatan supervisi akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah I atau Kepala Seksi Konservasi Wilayah I.

Bidang Wilayah II

III. Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Bagi Desa Binaan di Timor dan Flores

1. Metode Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan untuk kegiatan ini yaitu :

- Persiapan tim
- Koordinasi dengan pihak terkait
- Pemberian materi pelatihan
- Pemberian bantuan ekonomi produktif
- Evaluasi dan pendampingan kelompok

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keterampilan dan pendampingan adalah ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2. Rencana Pelaksanaan Tata Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Bulan ke)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pelatihan Keterampilan	UPT												
2.	Penggandaan Laporan	UPT												
3.	Honor Tenaga Pendamping	UPT												
4.	Bantuan Ekonomi Produktif	UPT												

Kegiatan Pelatihan Keterampilan akan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu :

- Dari Balai : Dr. Elisa Iswandono, S.Hut., M.P. dan Dewi Indriasari, S.Hut.
- Dari Bidang KSDA Wilayah I : Yusuf Gunawan, S.Hut. dan Sri Ngatini, S.Hut.
- Dari Seksi Konservasi Wilayah II : Samrenta Sianturi, S.Hut. dan Jamres U. S. Benu
- Dari Bidang Wilayah II : Juna Mardani, Koko Suwandi, Beatrix L Wisang, Arakib, Afridus Alang, Paul Pambut.

E. BIAYA PELAKSANAAN PROYEK

Usulan anggaran output kegiatan pada tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel :

Tabel III. 39 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN AKSES PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF I (5421.002)

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5421.002	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	35	Desa	-	877.000.000	
5421.002.001	Satker KSDA	-		-	877.000.000	
051	Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK	-		-	203.000.000	
A	Inventarisasi dan Verifikasi	-			69.400.000	

	Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi			-		
521211	Belanja Bahan	-		-	3.000.000	A
	- Bahan dan pelaporan	2	KEG	750.000	1.500.000	
	- Konsumsi rapat dengan masyarakat [15 ORANG x 2 LKS]	30	OH	50.000	1.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	25.200.000	A
	- Operasional personil resort [5 ORANG x 7 HARI x 2 KEG]	70	HARI	360.000	25.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	41.200.000	A
	- Perjalanan tenaga teknis balai [1 ORANG x 2 KEG]	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	- Perjalanan tenaga teknis bidang/seksi [1 ORANG x 2 KEG]	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan supervisi dari balai [2 ORANG x 2 KEG]	4	OT	4.000.000	16.000.000	
	- Perjalanan konsultasi ke pusat	1	OT	9.200.000	9.200.000	
B	Pembentukan kelompok kemitraan	-		-	33.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.000.000	A
	- Bahan dan pelaporan	2	KEG	750.000	1.500.000	
	- Konsumsi [15 ORANG x 2 LKS]	30	OH	50.000	1.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	5.000.000	A
	- Pembuatan dan pemasangan papan nama kelompok	2	UNIT	2.500.000	5.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	1.000.000	A
	- Honor narasumber pemerintah setempat	2	OJ	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2	OT	-	24.000.000	A
	- Perjalanan fasilitator dari perguruan tinggi/LSM [1 ORANG x 2 KEG]	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	- Perjalanan panitia dalam pembentukan kelompok [1 ORANG x 2 KEG]	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan pelaksana kegiatan dari bidang/seksi/ resort [1 ORANG x 2 KEG]	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan supervisi	1	OT	4.000.000	4.000.000	
C	Penandatanganan PKS dalam	-			48.600.000	

	rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan			-		
521211	Belanja Bahan	-		-	3.600.000	A
	- Bahan dan pelaporan	2	KEG	750.000	1.500.000	
	- Konsumsi [15 ORANG x 2 LKS]	30	OH	50.000	1.500.000	
	- Spanduk	2	UNIT	300.000	600.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	2.000.000	A
	- Sewa ruangan dalam rangka penandatanganan PKS	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	1.000.000	A
	- Honor narasumber pemerintah dan tokoh masyarakat	2	OJ	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	42.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka penandananagan PKS dari balai [2 ORANG x 2 KEG]	4	OT	4.000.000	16.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka penandananagan PKS dari bidang/seksi [2 ORANG x 2 KEG]	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka penandananagan PKS dari RKW [2 ORANG x 2 KEG]	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	- Perjalanan supervisi	2	OT	4.000.000	8.000.000	
D	Honorarium Tenaga Kontrak (PPNP)	-		-	52.000.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-		-	52.000.000	A
	- Honorarium driver/pengelola speedboad [1 ORG x 13 BLN]	13	OB	2.000.000	26.000.000	
	- Honorarium nakhoda/pengelola speedboad kapal wisata [1 ORG x 4 BLN]	4	OB	5.000.000	20.000.000	
	- Honorarium ABK/kebersihan speedboad kapal wisata [1 ORG x 4 BLN]	4	OB	1.500.000	6.000.000	
052	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	-		-	674.000.000	
A	Pelatihan keterampilan dan pendampingan desa binaan di Timor dan Flores	-		-	591.200.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	47.500.000	A
	- Bahan pelatihan	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
	- Pembuatan buku pelatihan	2	KEG	10.000.000	20.000.000	
	- Konsumsi peserta [30 ORG	240	OH	50.000	12.000.000	

	x 2 HARI x 2 LOKAS x 2 KEG]					
	- Personal use	90	UNIT	150.000	13.500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	25.200.000	A
	- Honor tenaga pendamping [3 ORG x 12 BLN x 2 KEG]	72	OB	350.000	25.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	50.000.000	A
	- Pembuatan video/film Meni dan Fon	1	KEG	50.000.000	50.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	45.500.000	A
	- Perjalanan narasumber pelatihan ke Timor	3	OT	2.500.000	7.500.000	
	- Perjalanan narasumber pelatihan ke Flores	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	- Perjalanan panitia bidang/seksi di Timor	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	- Perjalanan panitia bidang/seksi di Flores	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	- Perjalanan panitia dari balai di Timor	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan panitia dari balai di Flores	2	OT	5.000.000	10.000.000	
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-		-	423.000.000	A
	- Bantuan ekonomi produktif di Timor (Menipo)	1	KEG	223.000.000	223.000.000	
	- Bantuan ekonomi produktif di Flores (TWA Ruteng/Tumbuhan Obat)	1	KEG	200.000.000	200.000.000	
B	Peningkatan Kapasitas	-		-	52.800.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	10.800.000	D
	- Alat dan bahan	4	KEG	900.000	3.600.000	
	- Konsumsi [30 ORANG x 4 KEG]	120	OH	60.000	7.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	42.000.000	D
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi dari balai	4	OT	3.500.000	14.000.000	
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi dari bidang	4	OT	2.000.000	8.000.000	
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi dari seksi	4	OT	2.500.000	10.000.000	
	- Perjalanan koordinasi dan konsultasi ke Kupang	4	OT	2.500.000	10.000.000	
C	Konsultasi/Koordinasi Tupoksi	-		-	30.000.000	

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	30.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi dan koordinasi	4	OT	7.500.000	30.000.000	

F. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Tercapainya Pengelolaan Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi pada wilayah Pulau Timor dan Flores pada tahun 2020.

7. OUTPUT JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA (5421.003) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.862.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Kawasan TN dikelola oleh Balai Besar/ Balai Taman Nasional, sedangkan kawasan CA, SM, TWA dan TB dikelola oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Khusus Taman Hutan Raya (TAHURA), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, TAHURA dikelola oleh pemerintah propinsi. Berdasarkan data yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode tahun 2015 – 2019 bahwa luasan kawasan konservasi adalah 27.190.992 Ha terdiri dari 527 unit berupa 50 unit Taman Nasional, 118 Taman Wisata Alam, 22 Taman Hutan Raya, 14 Taman Buru, 248 Cagar Alam, dan 75 Suaka Margasatwa.

Saat ini, kawasan hutan di Indonesia, termasuk kawasan hutan konservasi mengalami kerusakan hutan yang cukup besar. Dirjen Planologi Kehutanan, (2013) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2011 kerusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan seluas 41,17 juta ha yang terbagi menjadi kerusakan hutan di kawasan hutan konservasi seluas 5,25 juta ha, kerusakan hutan di kawasan hutan lindung seluas 7,45 juta ha, dan kerusakan hutan di kawasan hutan produksi seluas 28,47 juta ha. Lebih lanjut, Dirjen Planologi, (2013) menyebutkan bahwa laju deforestasi di kawasan hutan periode 2009- 2011 adalah sebesar 330.193,8 ha/tahun yang terbagi menjadi laju deforestasi di kawasan hutan konservasi sebesar 9.634,5 ha/tahun, laju deforestasi di kawasan hutan lindung sebesar 20.895,2 ha/tahun, dan laju deforestasi di kawasan hutan produksi sebesar 299.664,1 ha/tahun.

Sementara itu, berdasarkan data Ditjen PHKA, (2012) menyebutkan bahwa kerusakan kawasan konservasi berdasarkan laporan yang masuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah (Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional) mencapai 770.189 ha. Adapun kerusakan kawasan konservasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: kerusakan kawasan taman buru mencapai 536,5 ha, kerusakan kawasan taman wisata alam mencapai 4.210,3 ha, dan kerusakan kawasan taman nasional mencapai 765.442,29 ha.

Berdasarkan data tersebut dan fakta di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar kawasan hutan konservasi di Indonesia kini mengalami kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti: perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal mining), kebakaran hutan, dan perburuan satwaliar serta daya-daya alam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan

upaya-upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang lebih bersifat preventif dan preemtif.

A. PENERIMA MANFAAT

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan UPT Balai Besar/Balai KSDA (berupa manfaat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi yang efisien dan lestari).
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat (berupa manfaat ekonomi dan sosial budaya).
3. Dunia Pendidikan/Perguruan Tinggi, Peneliti, dll (manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan).
4. Pihak Swasta (manfaat dalam peluang melakukan investasi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata, tumbuhan obat, dll).
5. Masyarakat dan stakeholder lainnya (manfaat ekonomi, ekologi dan berupa sosial budaya).

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Beberapa metode / cara yang akan digunakan untuk pencapaian target kegiatan ini dengan melakukan kegiatan :

Komponen	Keterangan
Perencanaan Kelola Kawasan Konservasi	Dilakukan dengan tahapan : 4. Rencana Pengelolaan SM Kateri 5. Rencana Pengelolaan TWA Bipolo 6. Rencana Pengelolaan CA Wolo Tado
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Dilakukan dengan tahapan : 1. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah I 2. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah II 3. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah III 4. Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah IV 5. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 6. Pengurusan Administrasi Penggunaan Senjata Api 7. Peningkatan Kapasitas Polhut (Menembak)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan di kawasan konservasi pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sepanjang tahun dengan kegiatan patroli yang sifatnya insidental maupun telah terencana sebelumnya.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Usulan anggaran output kegiatan pada tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel :

Tabel III. 40 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DITINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAANNYA (5421.003)

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5421.003	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1	Unit KK	-	1.862.000.000	
5421.003.001	Satker KSDA	-		-	1.862.000.000	
051	Perencanaan kelola Kawasan Konservasi	-		-	146.000.000	
A	Penyusunan RPJP SM Kateri	-		-	51.910.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	2.160.000	A
	- Alat dan Bahan	1	KEG	750.000	750.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan draft rencana kerja di UPT	10	OH	35.000	350.000	
	- Penggandaan draft RPJP	10	EKS	25.000	250.000	
	- Penggandaan dokumen RPJP	5	EKS	50.000	250.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI]	16	OH	35.000	560.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	800.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI]	16	HOK	50.000	800.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	750.000	A
	- Sewa ruangan	1	KEG	750.000	750.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	1.700.000	A
	- Narasumber pembahasan laporan di pusat	1	OJ	500.000	500.000	
	- Narasumber pembahasan laporan di kabupaten	1	OJ	500.000	500.000	
	- Moderator pembahasan laporan di	2	OK	350.000	700.000	

	kabupaten dan pusat					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	17.000.000	A
	- Perjalanan dari pusat untuk kajian lapangan	1	OT	8.500.000	8.500.000	
	- Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	1	OT	1.000.000	1.000.000	
	- Perjalanan dari Resort untuk kajian lapangan	3	OT	500.000	1.500.000	
	- Perjalanan tim dari balai untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka pengumpulan data sekunder/koordinasi	1	OT	3.000.000	3.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	27.000.000	D
	- Perjalanan dari Bidang dalam rangka pengumpulan data sekunder/ koordinasi	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dari Bapedda untuk kajian lapangan	1	OT	1.000.000	1.000.000	
	- Perjalanan dari seksi untuk kajian lapangan	1	OT	1.000.000	1.000.000	
	- Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi/koordinasi	2	OT	8.000.000	16.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	2.500.000	A
	- Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	150.000	1.500.000	
	- Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	10	OH	50.000	500.000	
	- Uang harian fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	50.000	500.000	
B	Penyusunan RPJP TWA Bipolo	-		-	44.110.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	2.110.000	A
	- Alat dan Bahan	1	KEG	750.000	750.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan draft rencana kerja di UPT	10	OH	35.000	350.000	
	- Penggandaan draft RPJP	10	EKS	20.000	200.000	
	- Penggandaan dokumen pasca RPJP	5	EKS	50.000	250.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI]	16	OH	35.000	560.000	

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	800.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI]	16	HOK	50.000	800.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	1.700.000	A
	- Narasumber pembahasan laporan di kabupaten dan pusat	1	OJ	500.000	500.000	
	- Narasumber pembahasan laporan di kabupaten	1	OJ	500.000	500.000	
	- Moderator pembahasan laporan di kabupaten dan pusat	2	OK	350.000	700.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	36.000.000	A
	- Perjalanan dari Bidang dalam rangka pengumpulan data sekunder/ koordinasi	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan dari pusat untuk kajian lapangan	1	OT	9.000.000	9.000.000	
	- Perjalanan dari bapedda untuk kajian lapangan	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan tim dari Balai untuk presentasi di Jakarta	1	OT	8.000.000	8.000.000	
	- Perjalanan tim dari UPT untuk pembahasan di kabupaten	1	OT	3.000.000	3.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	2.500.000	A
	- Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	150.000	1.500.000	
	- Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	10	OH	50.000	500.000	
	- Uang harian fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	50.000	500.000	
C	Penyusunan RPJP CA Wolo Tado	-		-	49.980.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	2.480.000	A
	- Alat dan Bahan	1	KEG	1.120.000	1.120.000	

	- Konsumsi rapat pembahasan draft rencana kerja di UPT	10	OH	35.000	350.000	
	- Penggandaan draft RPJP	10	EKS	20.000	200.000	
	- Penggandaan dokumen RPJP	5	EKS	50.000	250.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 4 HARI]	16	OH	35.000	560.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	800.000	A
	- Upah buruh pembantu lapangan [4 ORANG x 4 HARI]	16	HOK	50.000	800.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	1.000.000	A
	- Sewa ruangan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	1.700.000	A
	- Narasumber pembahasan laporan di pusat	1	OJ	500.000	500.000	
	- Narasumber pembahasan laporan di kabupaten	1	OJ	500.000	500.000	
	- Moderator pembahasan laporan di kabupaten dan pusat	2	OK	350.000	700.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	41.500.000	A
	- Perjalanan dari bidang dalam rangka pengumpulan data sekunder/koordinasi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	- Perjalanan dari pusat untuk kajian lapangan	1	OT	8.500.000	7.500.000	
	- Perjalanan dari Bappeda untuk kajian lapangan	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	- Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	1.500.000	3.000.000	
	- Perjalanan tim dari balai untuk presentasi di Jakarta	1	OT	10.000.000	10.000.000	
	- Perjalanan tim dari balai untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	1.500.000	3.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	2.500.000	A
	- Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	150.000	1.500.000	
	- Bantuan transport peserta pembahasan di	10	OH	50.000	500.000	

	kabupaten					
	- Uang harian fullday rapat pembahasan di kabupaten	10	OH	50.000	500.000	
052	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	-		-	1.716.000.000	
A	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah I	-		-	102.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	102.000.000	A
	- Biaya operasional tim [5 RESOR x 4 BULAN]	20	BULAN	300.000	6.000.000	
	- Biaya operasional petugas [24 ORANG x 4 HARI x 4 BULAN]	384	OH	250.000	96.000.000	
B	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) di Seksi Konservasi Wilayah II	-		-	152.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	152.800.000	A
	- Biaya operasional tim TWA Menipo, TWA Camplong, TWAL Teluk Kupang, TWA Baumata [4 RESOR x 4 BULAN]	16	BULAN	300.000	4.800.000	
	- Biaya operasional tim RKW SM Harlu dan TB Pulau Ndana [1 RESOR x 4 BULAN]	4	BULAN	1.000.000	4.000.000	
	- Biaya operasional petugas [36 ORANG x 4 HARI x 4 BULAN]	576	OH	250.000	144.000.000	
C	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) di Seksi Konservasi Wilayah III	-		-	246.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	246.000.000	A
	- Biaya operasional tim Resort CA Wae Wuul, Resort CA Watu Ata, Resort Ende [3 RESOR x 4 BULAN]	12	BULAN	300.000	3.600.000	
	- Biaya operasional petugas [40 ORANG x 4 HARI x 4 BULAN]	640	OH	250.000	160.000.000	
	- Biaya operasional tim khusus RKW TWA 17 Pulau, CA Wolo Tadho dan CA Riung SKW III [1	4	BULAN	800.000	3.200.000	

	RESOR x 4 BULAN]					
	- Biaya operasional petugas khusus RKW TWA 17 Pulau, CA Wolo Tadho dan CA Riung [5 ORANG x 4 HARI x 4 BULAN]	80	OH	250.000	20.000.000	
	- Biaya operasional tim RKW pada TWA Ruteng [4 RESOR x 4 BULAN]	16	OH	500.000	8.000.000	
	- Biaya operasional tim terkait 3 pilar di TWA Ruteng [4 ORANG x 4 RESOR x 4 HARI x 4 BULAN]	256	OH	200.000	51.200.000	
D	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) di Seksi Konservasi Wilayah IV	-		-	109.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	109.200.000	A
	- Biaya operasional tim RKW SM Egon Ilemedo [1 RESOR x 4 BULAN]	4	BULAN	300.000	1.200.000	
	- Biaya operasional tim RKW TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere [1 RESOR x 4 BULAN]	4	BULAN	3.000.000	12.000.000	
	- Biaya operasional tim Resort Alor [1 RESOR x 4 BULAN]	4	BULAN	4.000.000	16.000.000	
	- Biaya operasional petugas [20 ORANG x 4 HARI x 4 BULAN]	320	OH	250.000	80.000.000	
E	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	-		-	69.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	108.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait di SKW I dan II	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait di SKW I dan II	2	OT	1.400.000	2.800.000	
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait di SKW III dan IV	3	OT	1.500.000	4.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi dan	3	OT	5.000.000	15.000.000	

	koordinasi pengamanan di Flores					
	- Perjalanan dalam rangka supervisi dan koordinasi pengamanan di Timor	3	OT	2.500.000	15.000.000	
	- Perjalanan konsultasi dalam rangka pengamanan kawasan	4	OT	8.900.000	35.600.000	
F	Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan bersama MMP	-		-	724.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	724.800.000	A
	- Biaya operasional petugas dalam rangka patroli bersama masyarakat [4 BULAN x 24 KEG x 4 ORANG x 4 HARI]	1.536	OH	200.000	307.200.000	
	- Upah kegiatan pengamanan bagi anggota MMP [4 BULAN x 24 KEG x 10 ORANG x 4 HARI]	3.840	OH	100.000	384.000.000	
	- Biaya operasional Tim [24 KEG x 4 BULAN]	96	KEG	350.000	33.600.000	
G	Pengurusan Administrasi Penggunaan Senjata Api	-		-	83.400.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	38.300.000	A
	- Alat dan bahan	1	KEG	1.850.000	1.850.000	
	- Kartu izin penguasaan pinjam pakai senjata api	30	ORANG	150.000	4.500.000	
	- Personal Use	1	PAKET	4.000.000	4.000.000	
	- Test kesehatan	30	ORANG	100.000	3.000.000	
	- Test psikologi	30	ORG	300.000	9.000.000	
	- Koordinasi dan pengendalian	3	KEG	1.000.000	3.000.000	
	- Perpanjangan Buku Pas Senpi tahunan	29	PUCUK	150.000	4.350.000	
	- Pemeliharaan senjata api	29	PUCUK	200.000	5.800.000	
	- Koordinasi dalam rangka pengurusan administrasi senpi	1	PAKET	1.000.000	1.000.000	
	- Konsumsi test kesehatan dan psikologi [30 ORG x 2 KALI]	60	OH	30.000	1.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	45.100.000	A
	- Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Labuan Bajo	6	OT	3.600.000	21.600.000	

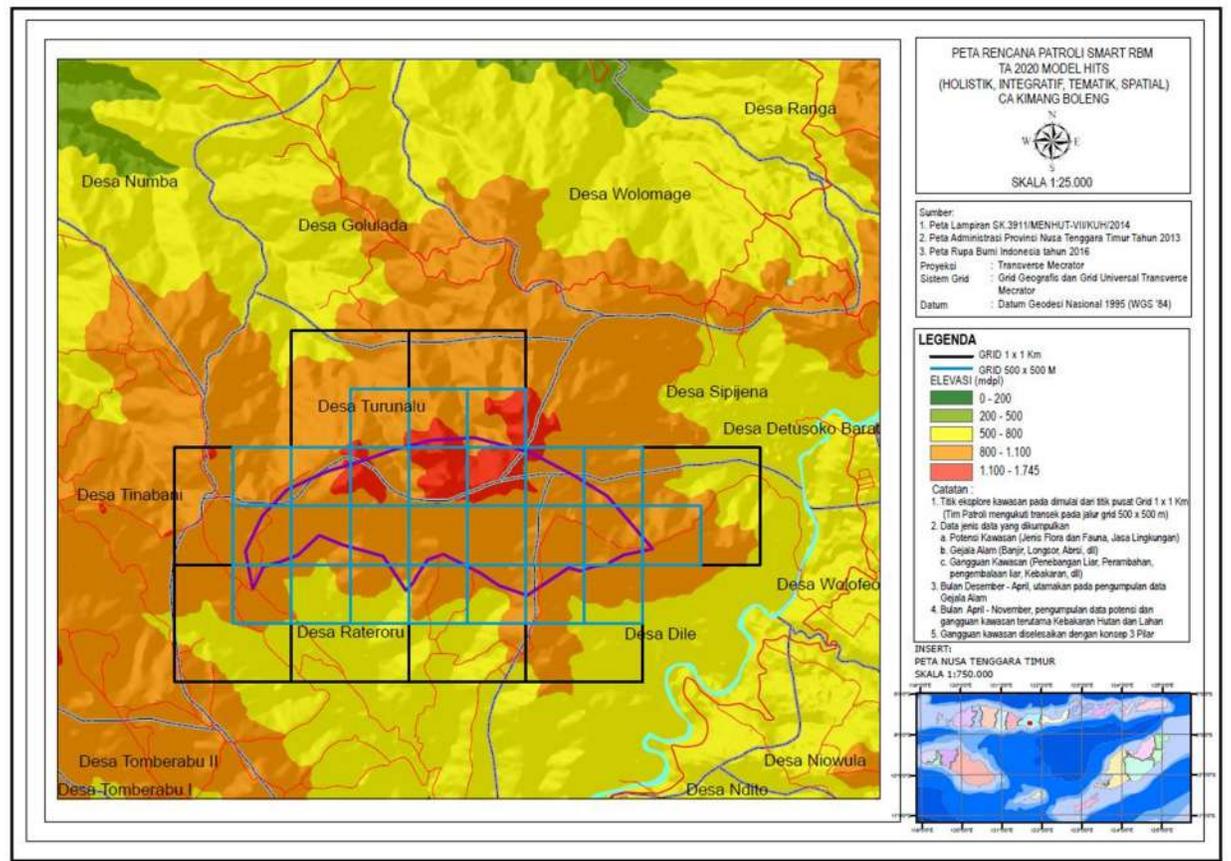
	Ruteng, Bajawa					
	- Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Maumere, Ende, Alor	5	OT	3.200.000	16.000.000	
	- Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Belu dan Soe	6	OT	1.000.000	6.000.000	
	- Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Kupang	15	OT	100.000	1.500.000	
H	Operasi Gabungan Peredaran TSL				14.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				14.400.000	
	- Biaya operasional tim [2 TIM x 4 KALI]	8	BULAN	300.000	2.400.000	
	- Biaya operasional petugas [6 ORANG x 2 TIM x 4 KALI]	48	OH	250.000	12.000.000	
J	Peningkatan Kapasitas Polhut (Menembak)	-		-	214.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	89.950.000	A
	- Alat dan bahan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	
	- Personal use	40	ORANG	200.000	8.000.000	
	- Amunisi laras pendek [40 ORG x 40 BTR]	1.600	BTR	23.000	36.800.000	
	- Amunisi laras panjang [40 ORG x 40 BTR]	1.600	BTR	20.000	32.000.000	
	- Sertifikat menembak	35	ORG	25.000	875.000	
	- Alin alongin (sasaran tembak)	1	PAKET	5.815.000	5.815.000	
	- Konsumsi [40 ORANG x 2 KALI]	80	OH	62.000	4.960.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	900.000	A
	- Honor panitia	3	ORG	300.000	900.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	8.600.000	A
	- Sewa lapangan tembak	1	KEG	6.600.000	6.600.000	
	- Sewa ruangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi	-		-	64.800.000	A
	- Honor narasumber /instruktur [6 ORANG x 12 JPL]	72	OJ	900.000	64.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	49.750.000	A
	- Perjalanan peserta dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa	6	OT	4.000.000	24.000.000	

	- Perjalanan peserta dari Ende, Maumere, Alor	5	OT	3.500.000	17.500.000	
	- Perjalanan peserta dari daratan Timor	6	OT	1.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan peserta dari Kupang	15	OT	150.000	2.250.000	

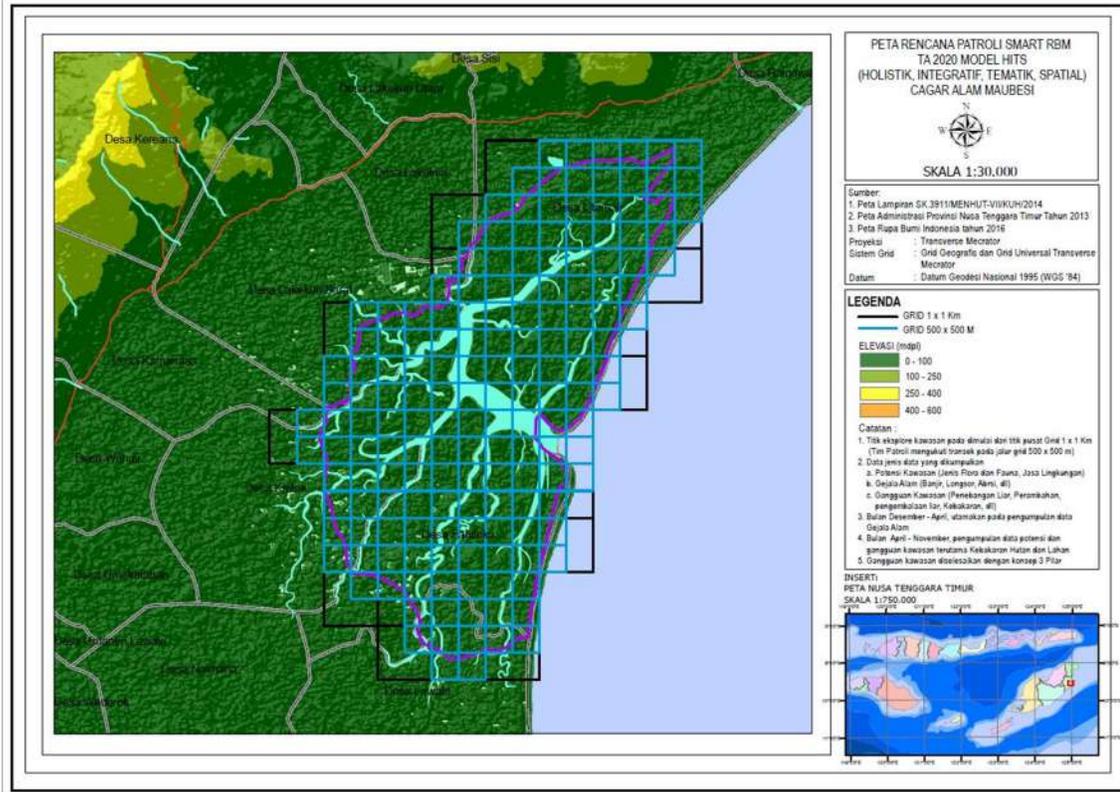
E. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Lokasi kegiatan berada di Pulau Flores dan Timor pada 28 kawasan konservasi dengan target tercapainya Pengelolaan Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa di Kawasan Konservasi pada tahun 2020.

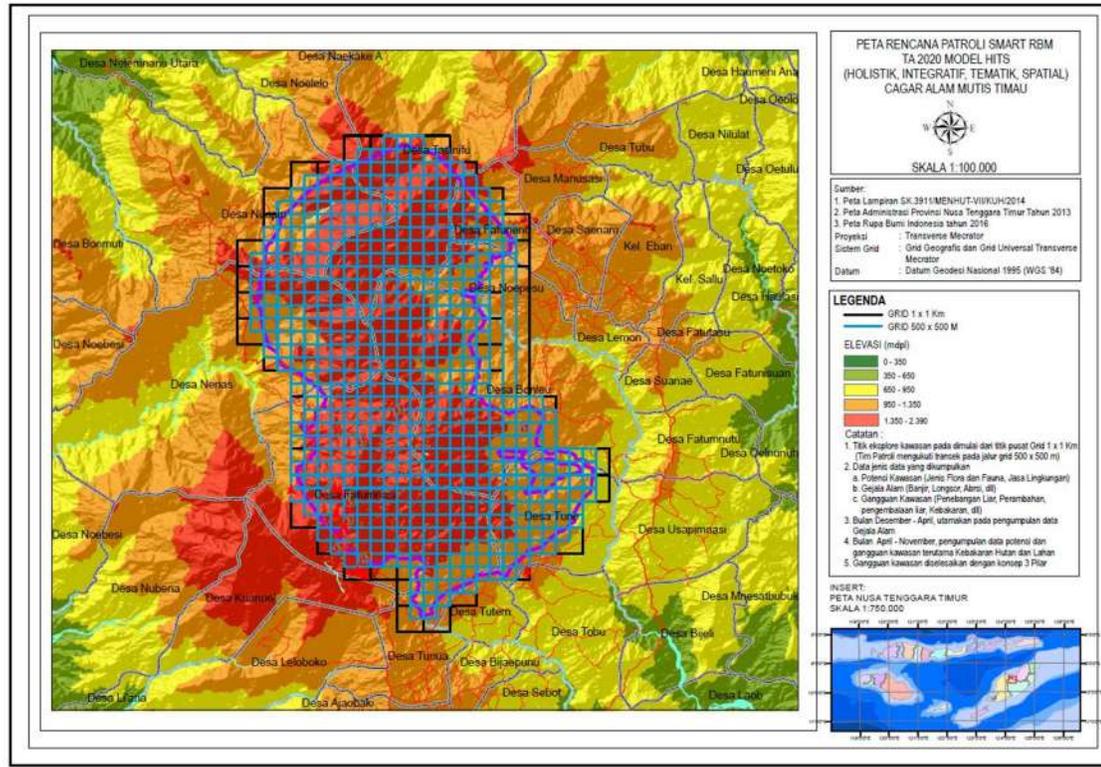
Gambar III. 10 Peta Rencana Patroli CA Kimang Boleng



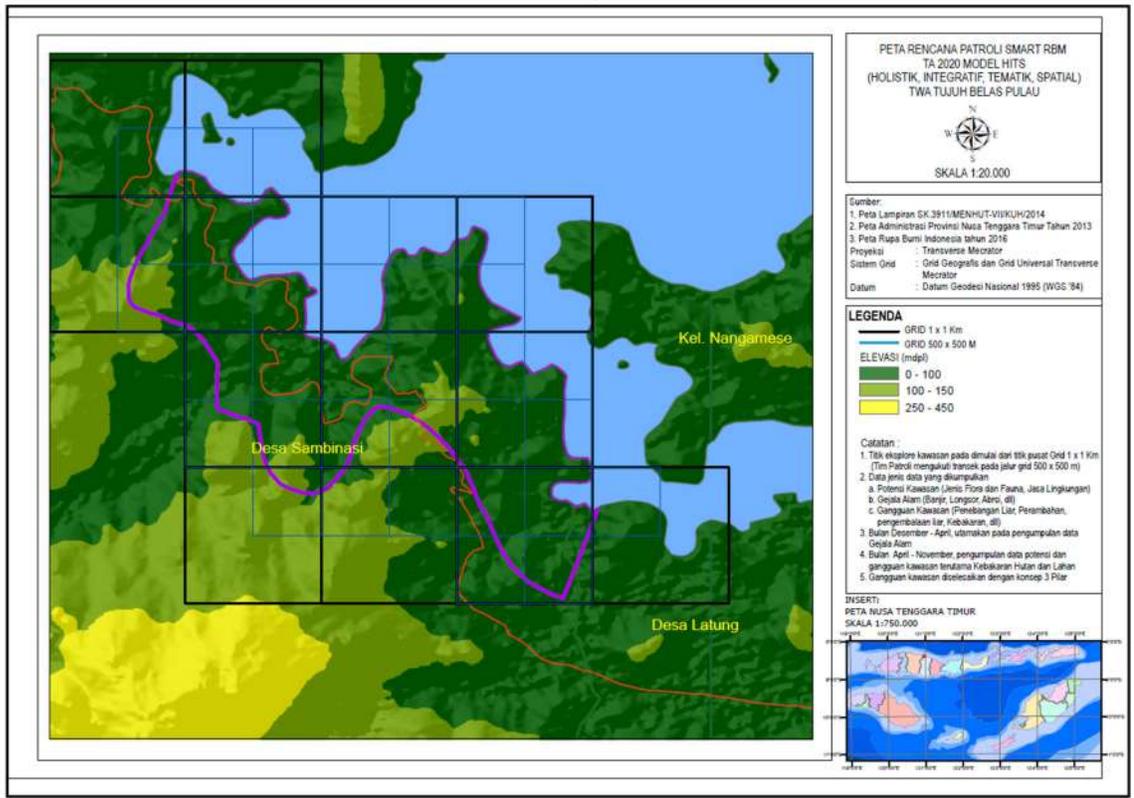
Gambar III. 11 **Peta Rencana Patroli CA Maubesi**



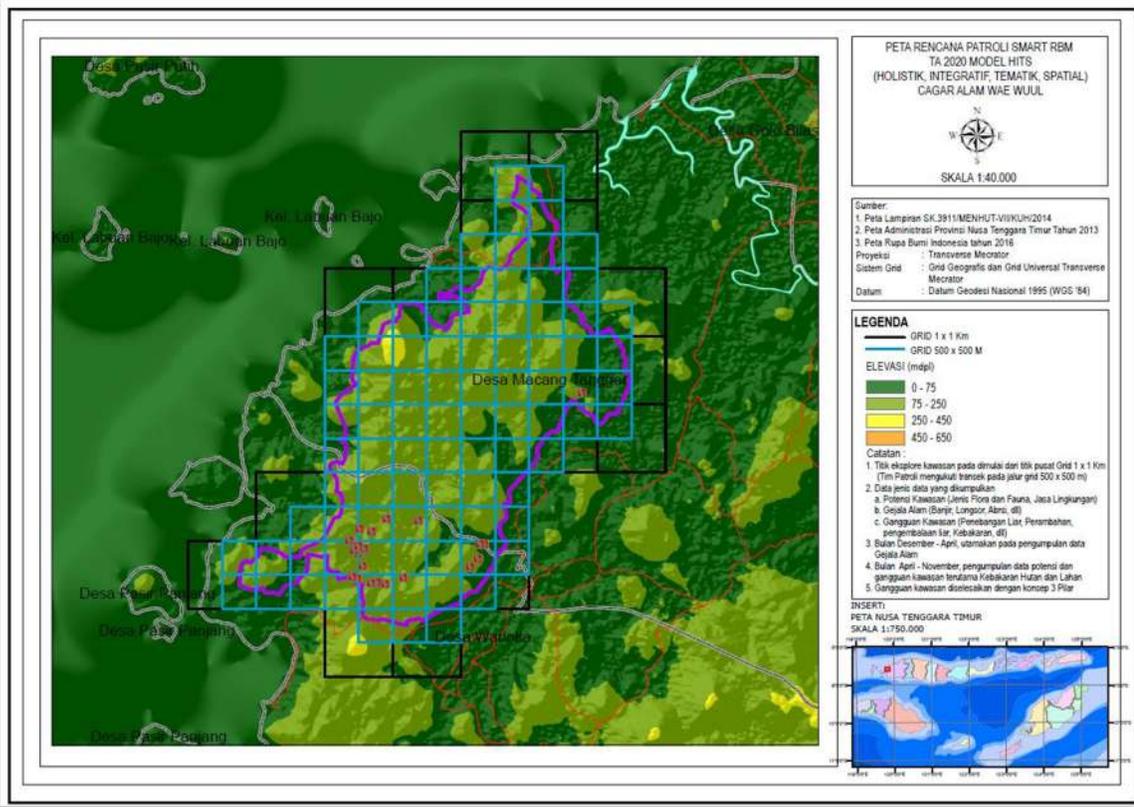
Gambar III. 12 **Peta Rencana Patroli CA Mutis Timau**



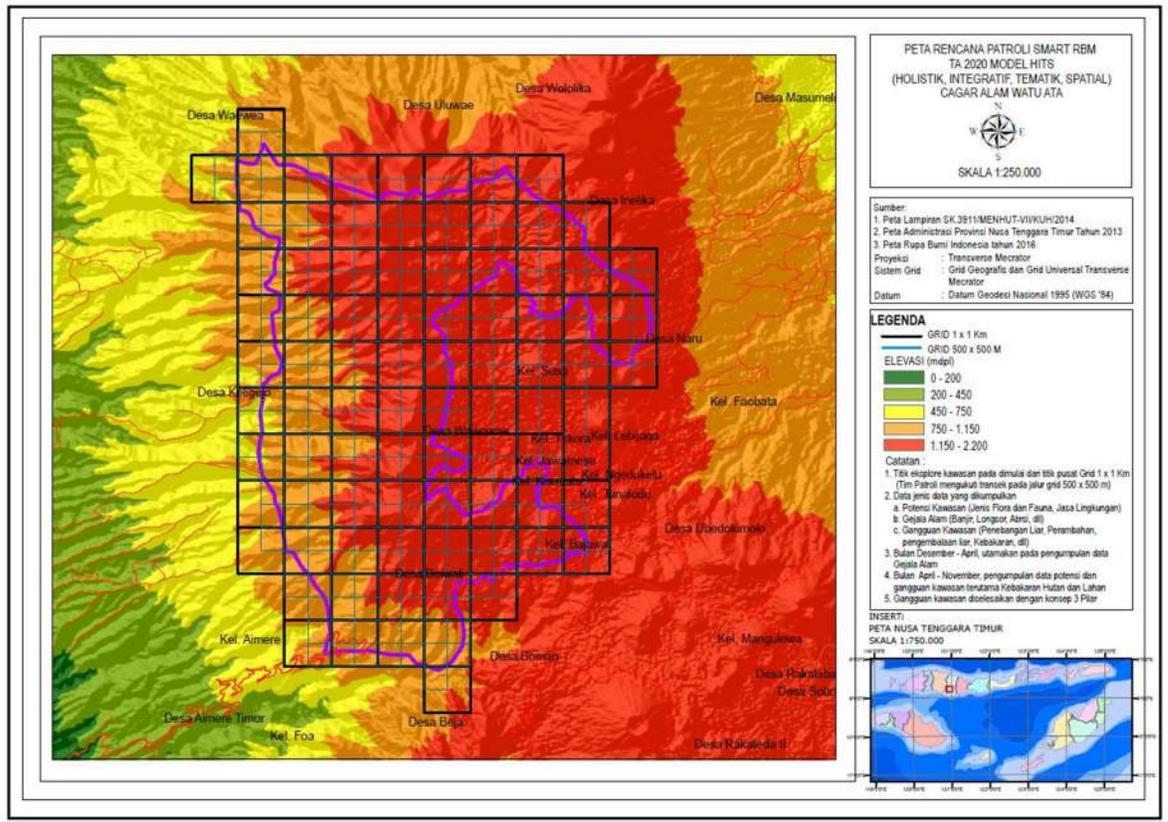
Gambar III. 13 Peta Rencana Patroli CA Riung



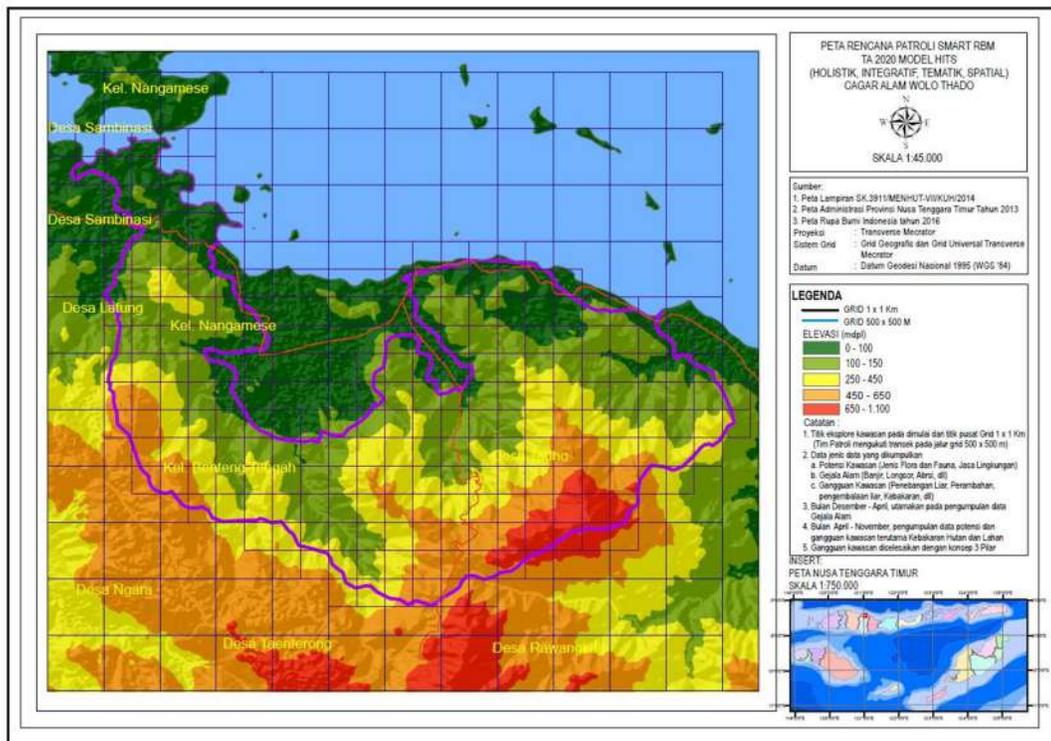
Gambar III. 14 Peta Rencana Patroli CA Wae Wuul



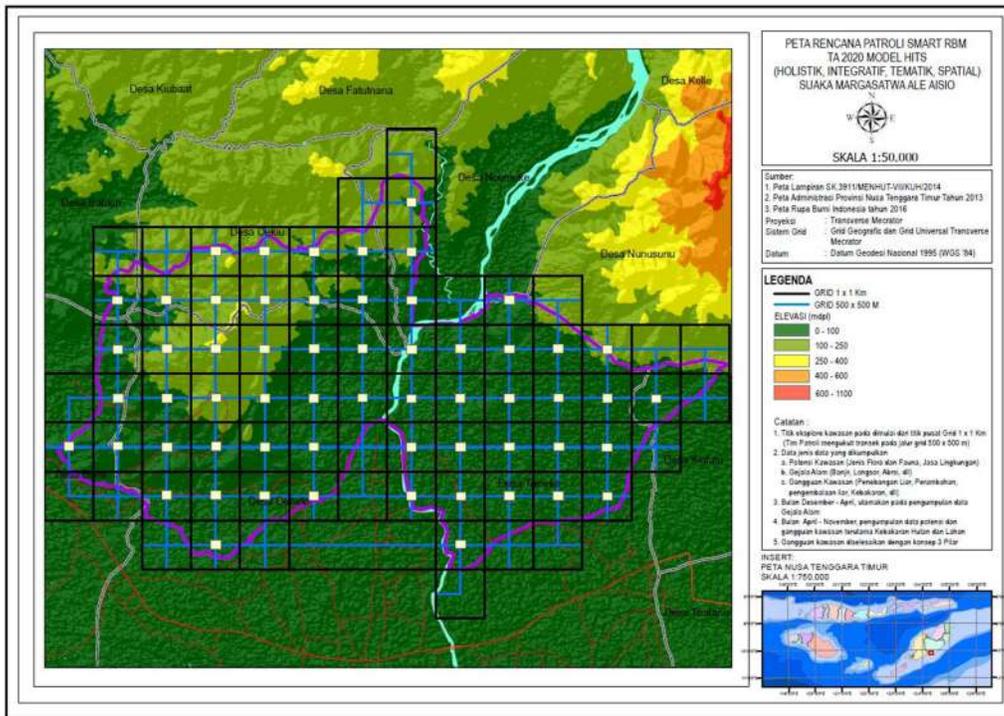
Gambar III. 15 Peta Rencana Patroli CA Watu Ata



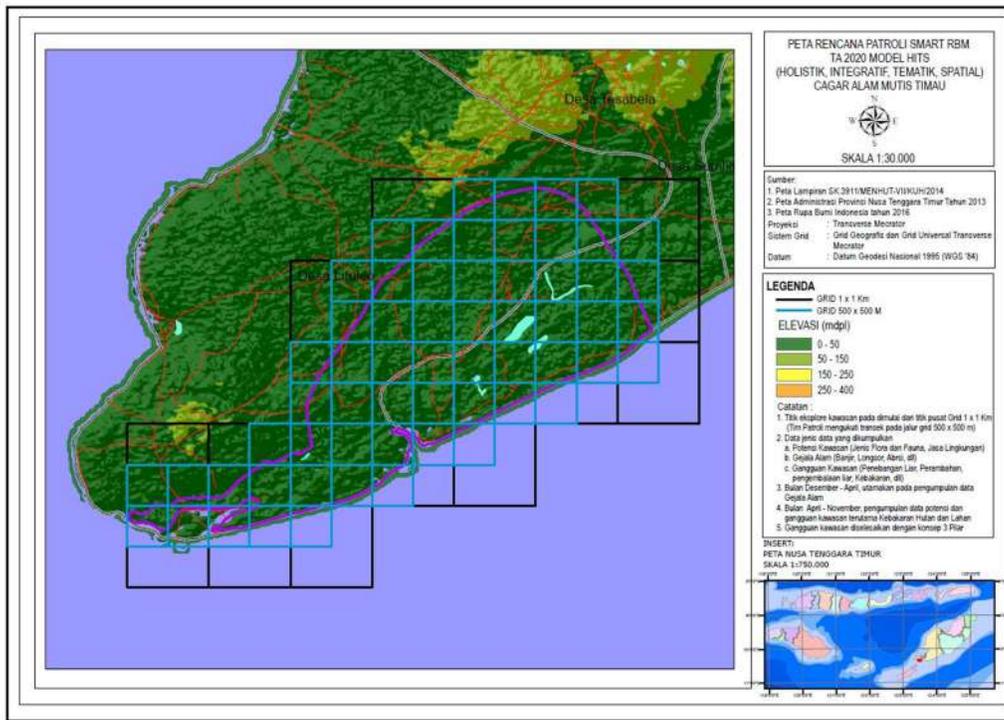
Gambar III. 16 Peta Rencana Patroli CA Wolo Tadho



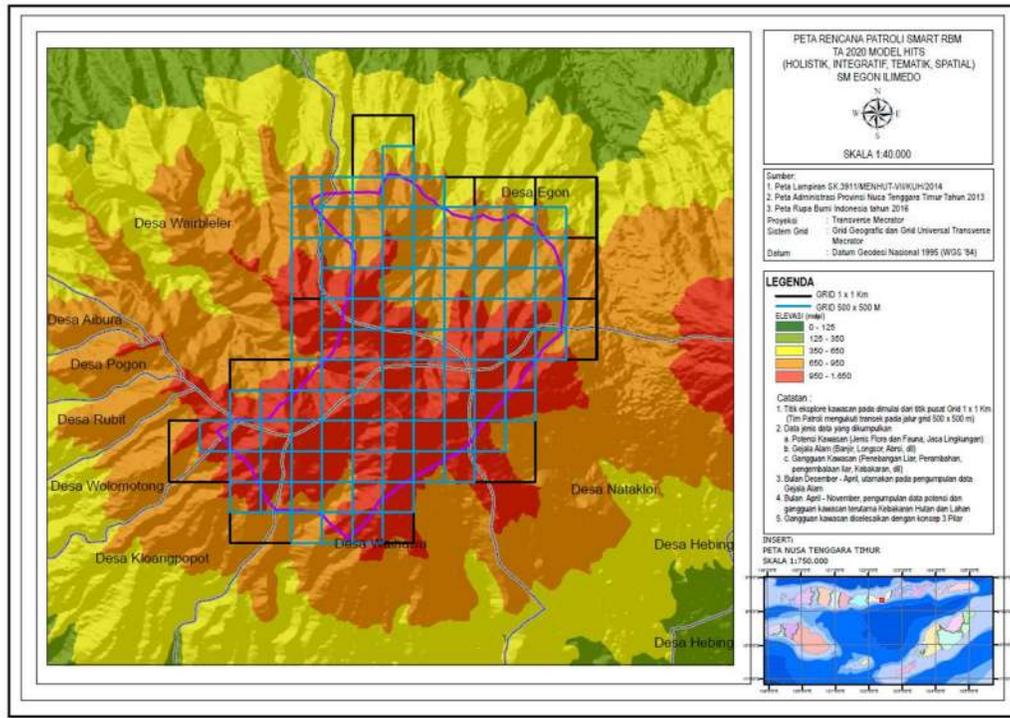
Gambar III. 17 Peta Rencana Patroli SM Ale Aisio



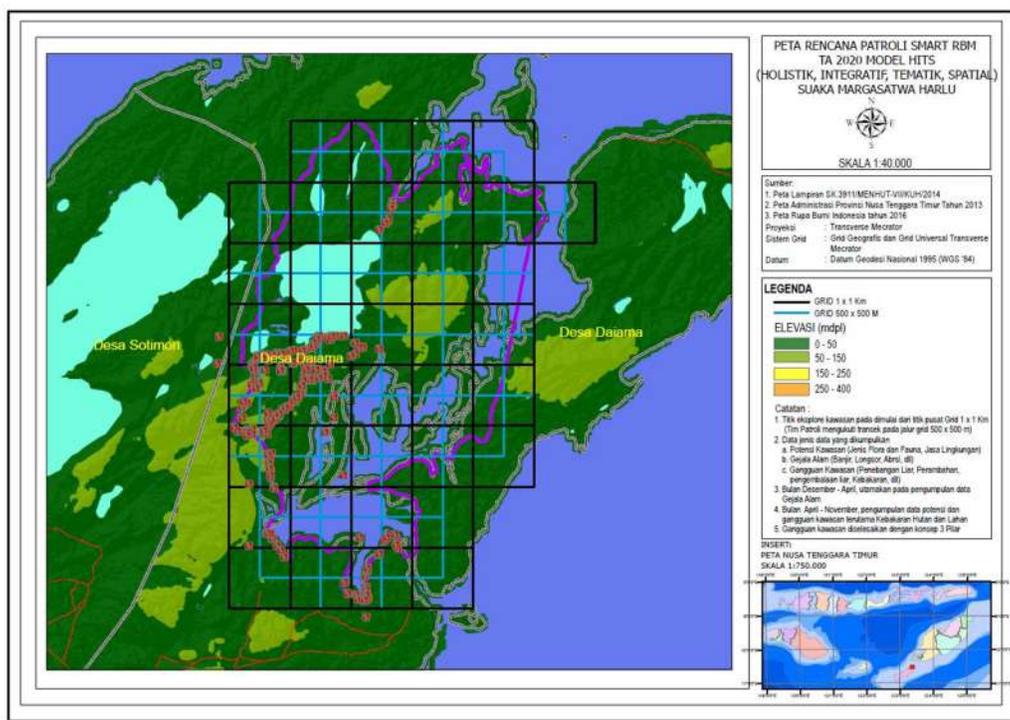
Gambar III. 18 Peta Rencana Patroli SM Ale Aisio



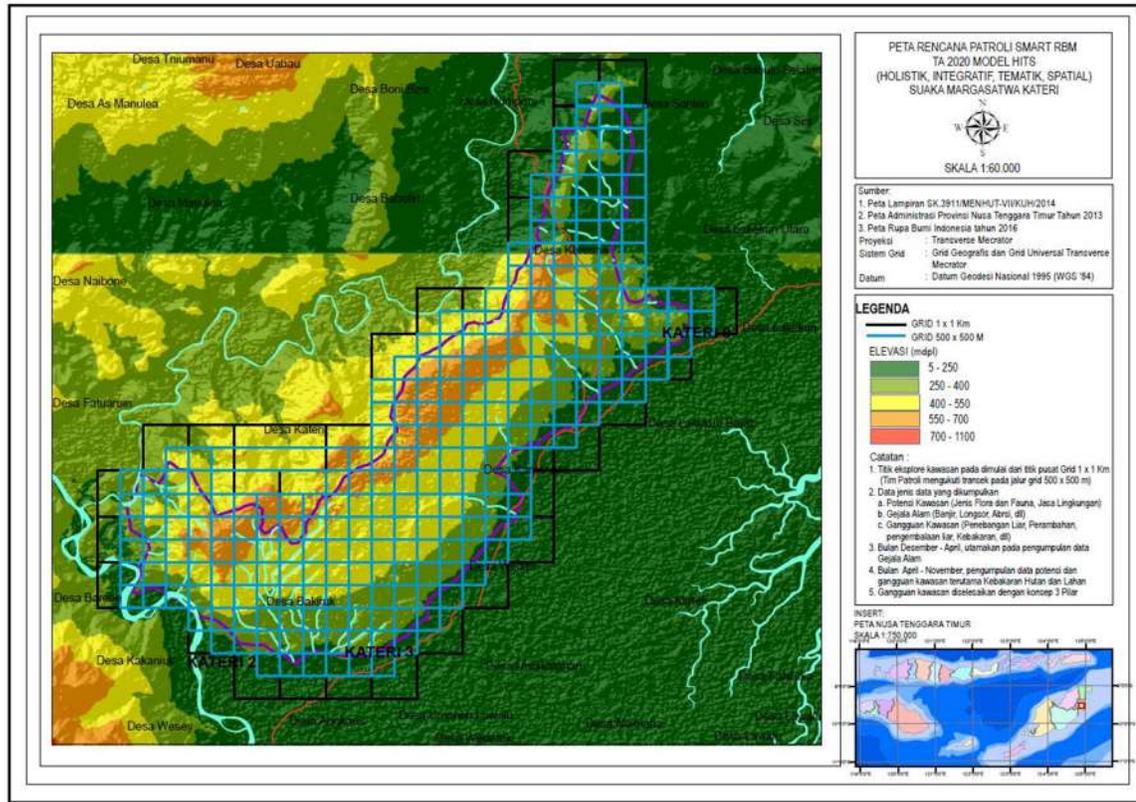
Gambar III. 19 Peta Rencana Patroli SM Egon Ilimedo



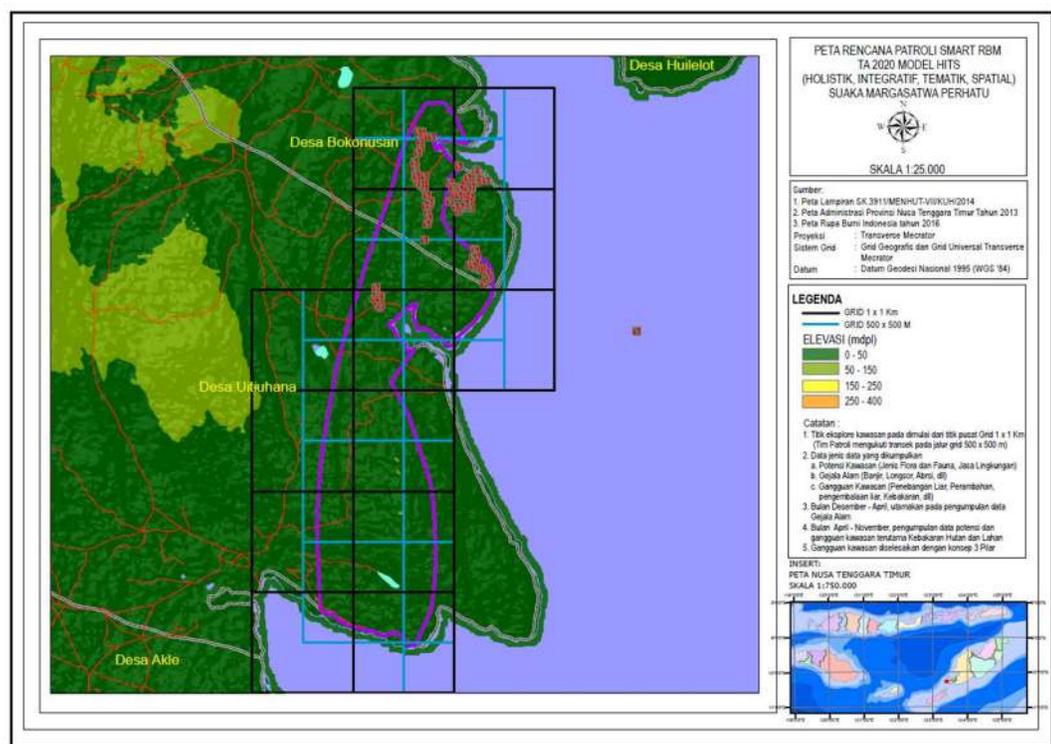
Gambar III. 20 Peta Rencana Patroli SM Harlu



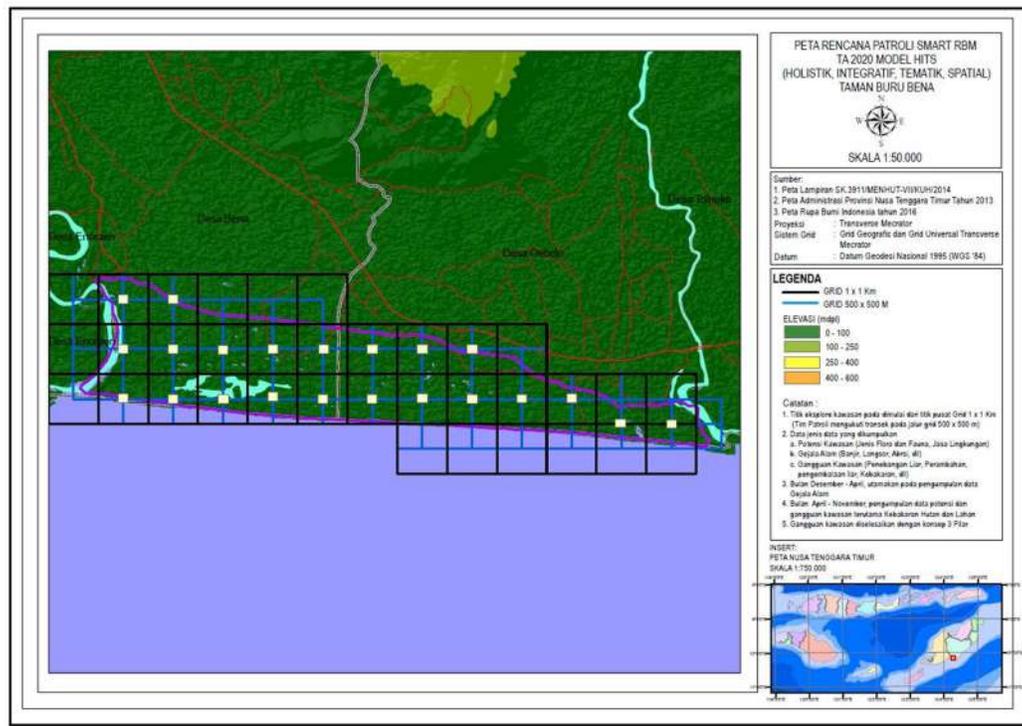
Gambar III. 21 Peta Rencana Patroli SM Kateri



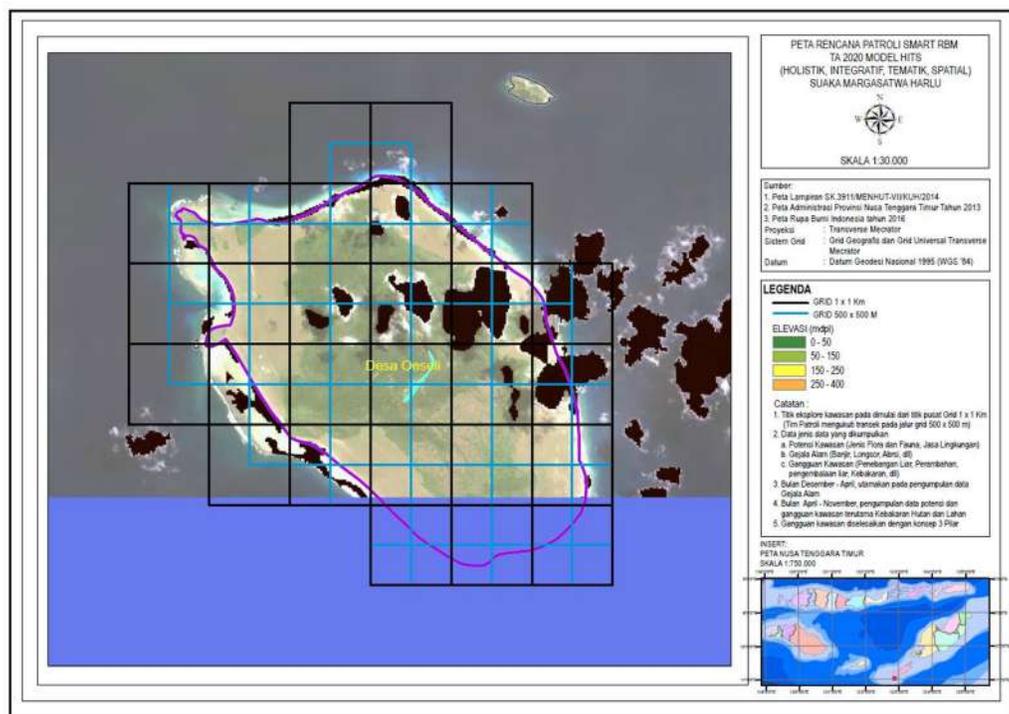
Gambar III. 22 Peta Rencana Patroli SM Perhatu



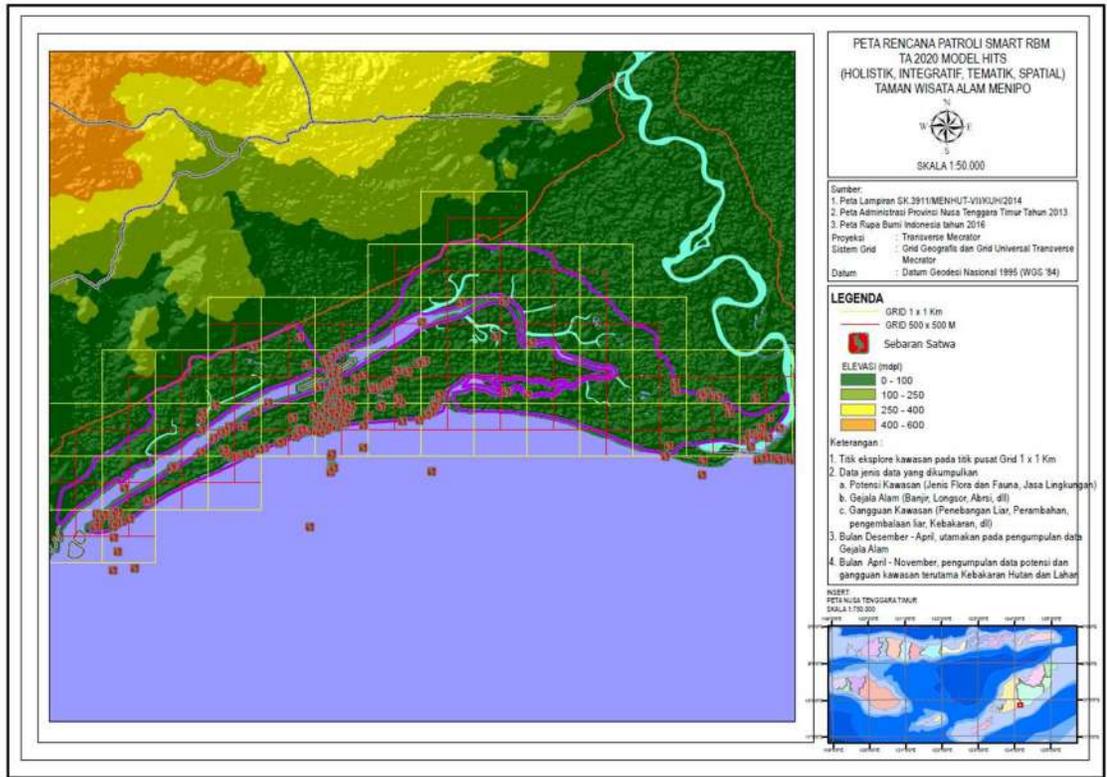
Gambar III. 23 Peta Rencana Patroli TB Bena



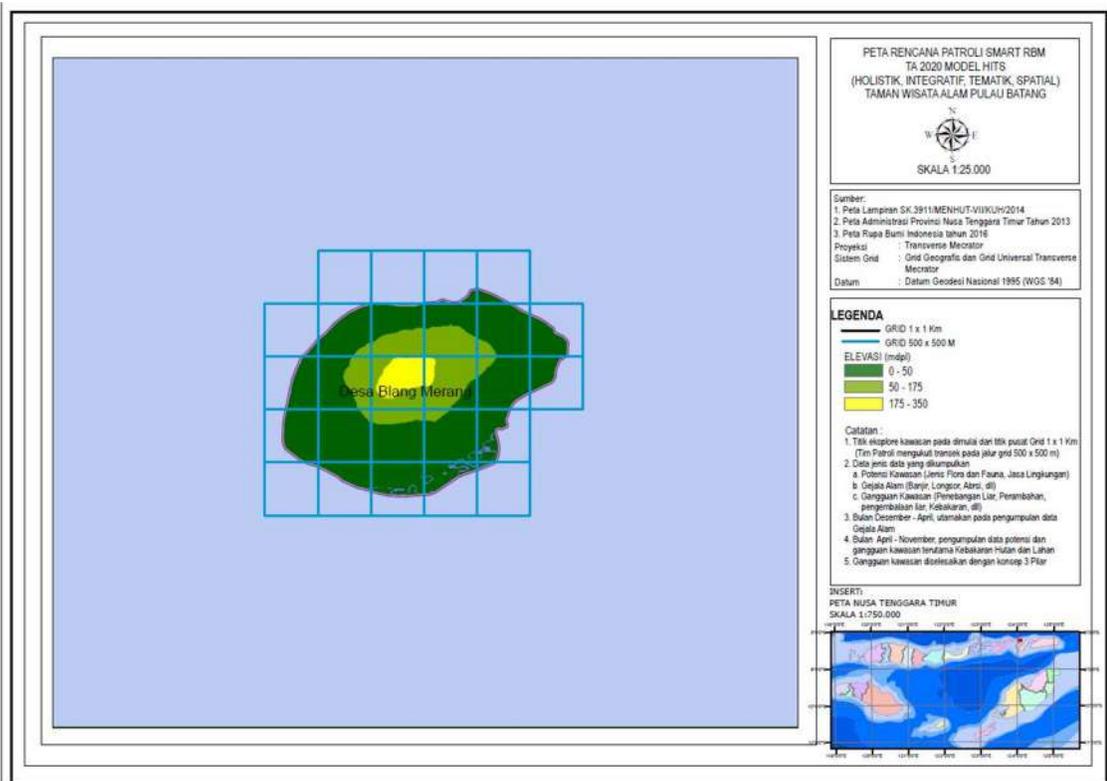
Gambar III. 24 Peta Rencana Patroli TB Pulau Ndana



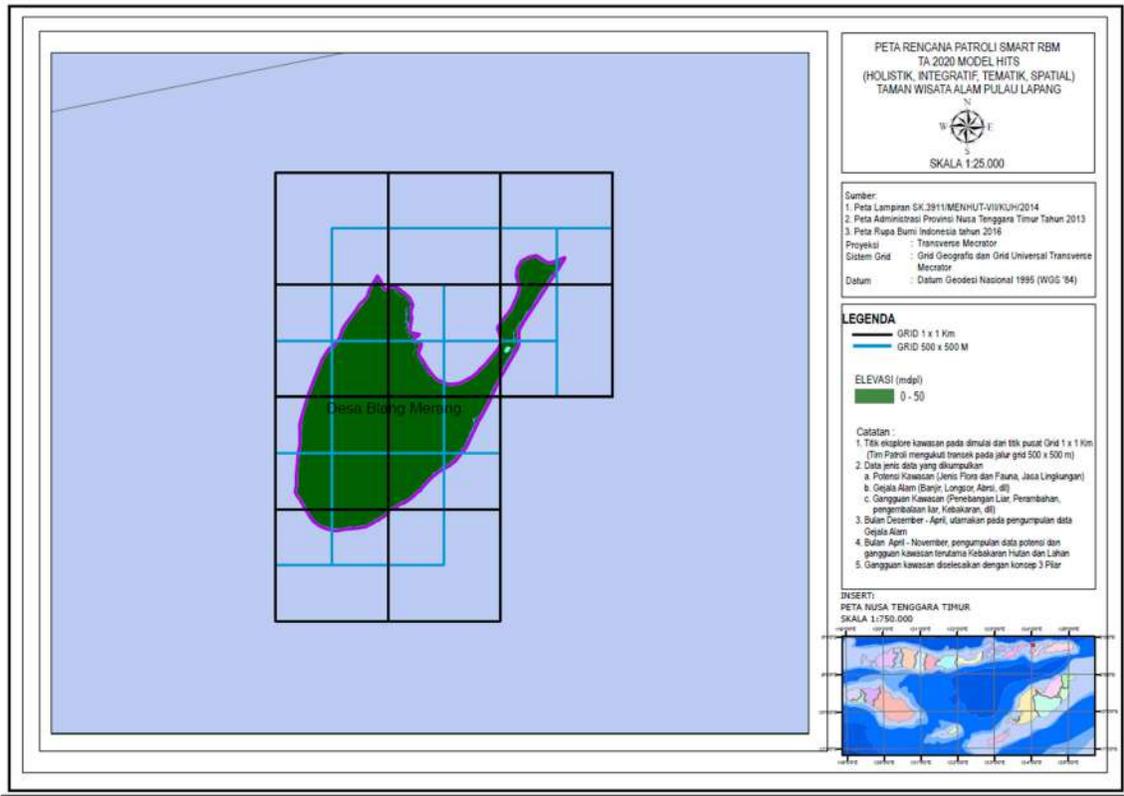
Gambar III. 25 Peta Rencana Patroli TWA Menipo



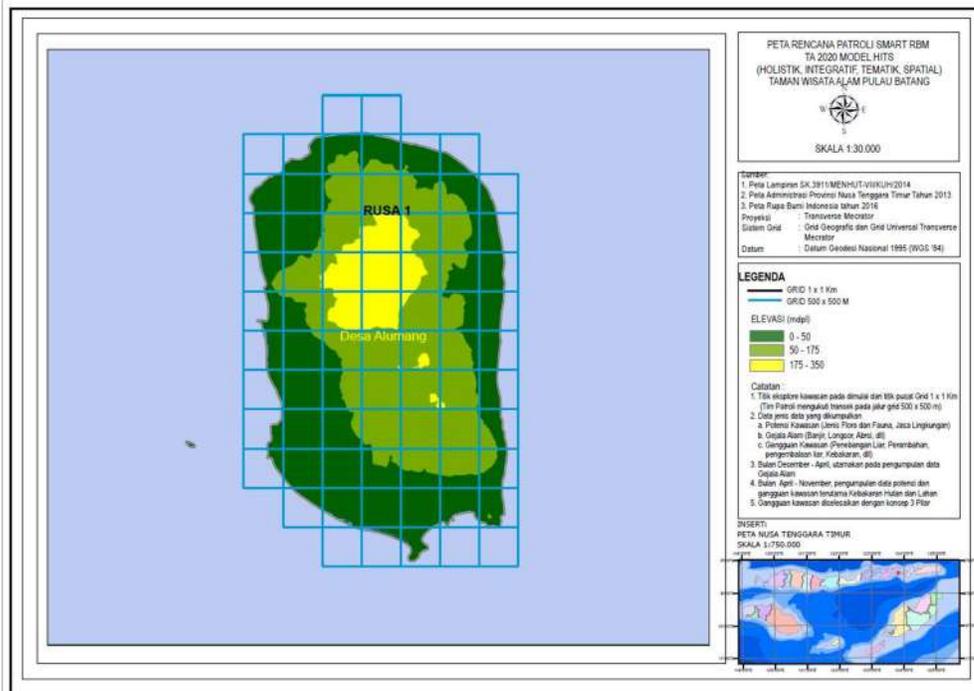
Gambar III. 26 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Batang



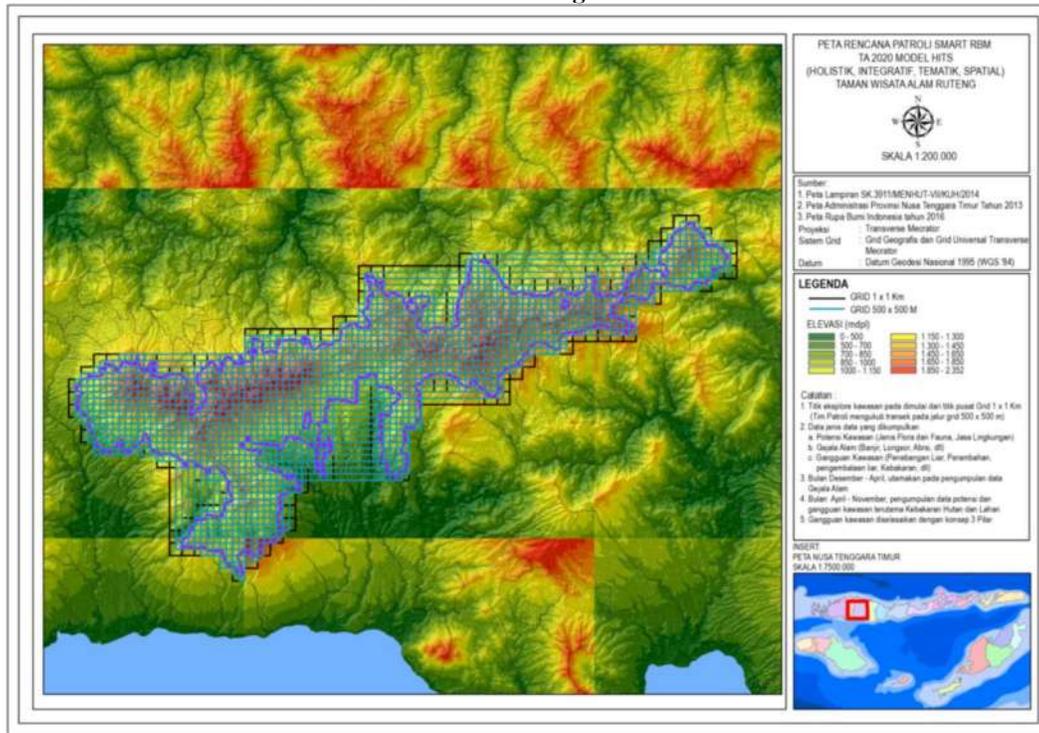
Gambar III. 27 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Lapang



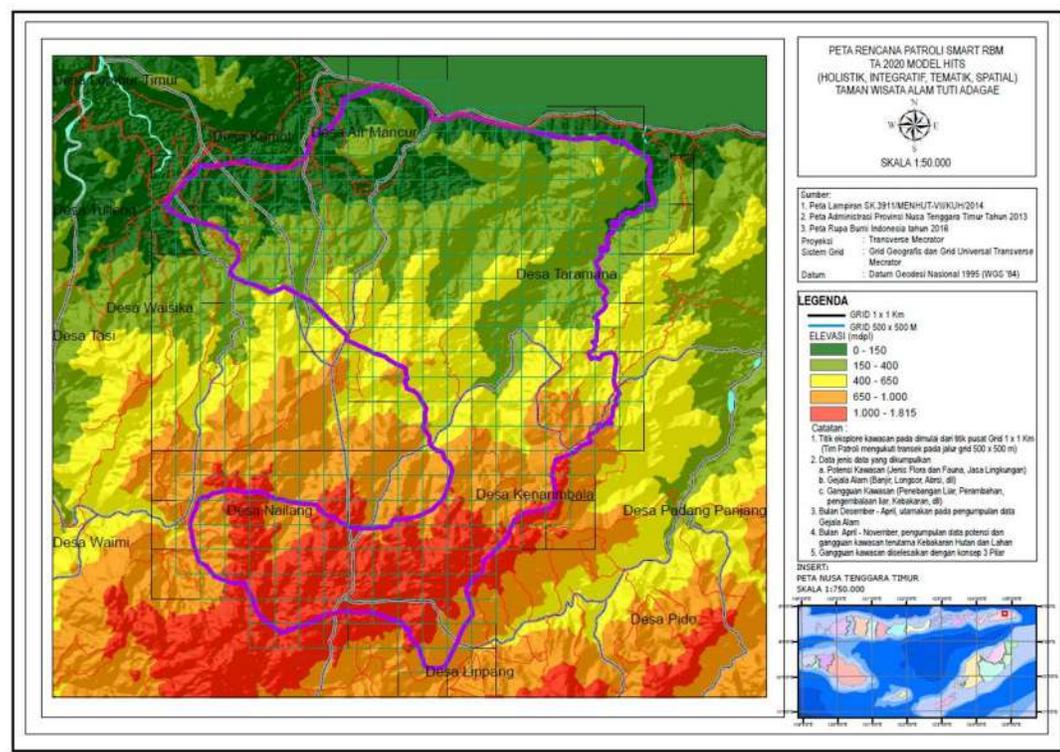
Gambar III. 28 Peta Rencana Patroli TWA Pulau Rusa



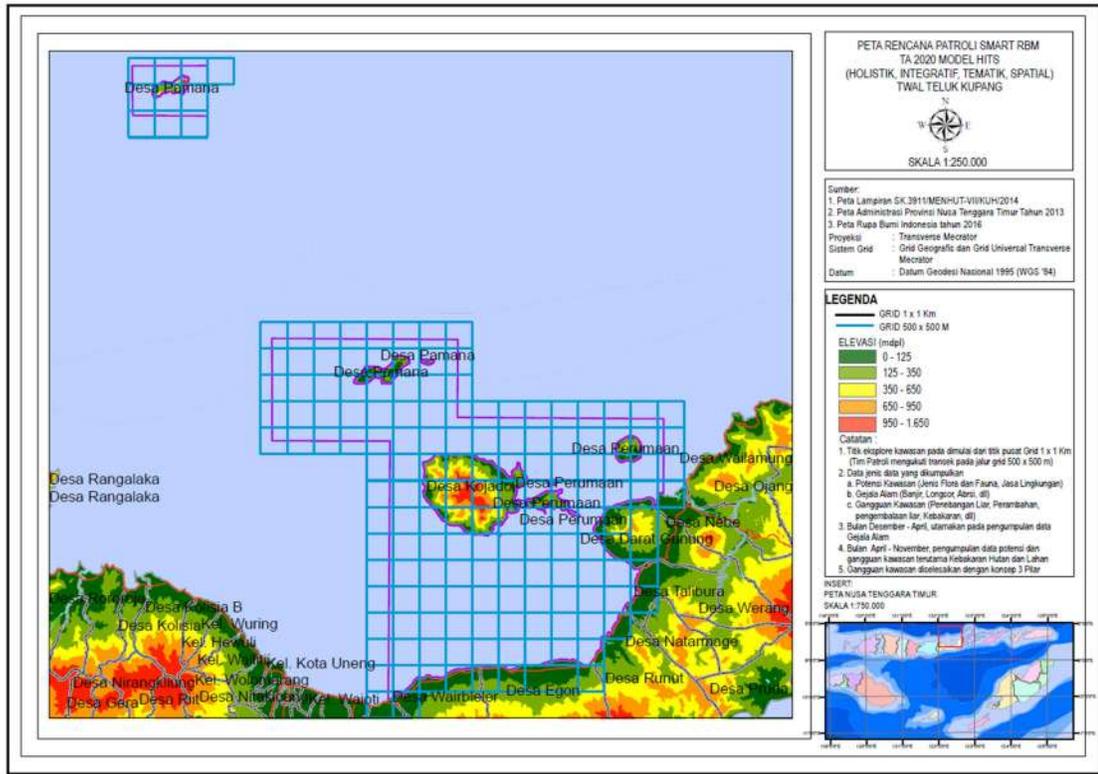
Gambar III. 29 Peta Rencana Patroli TWA Ruteng



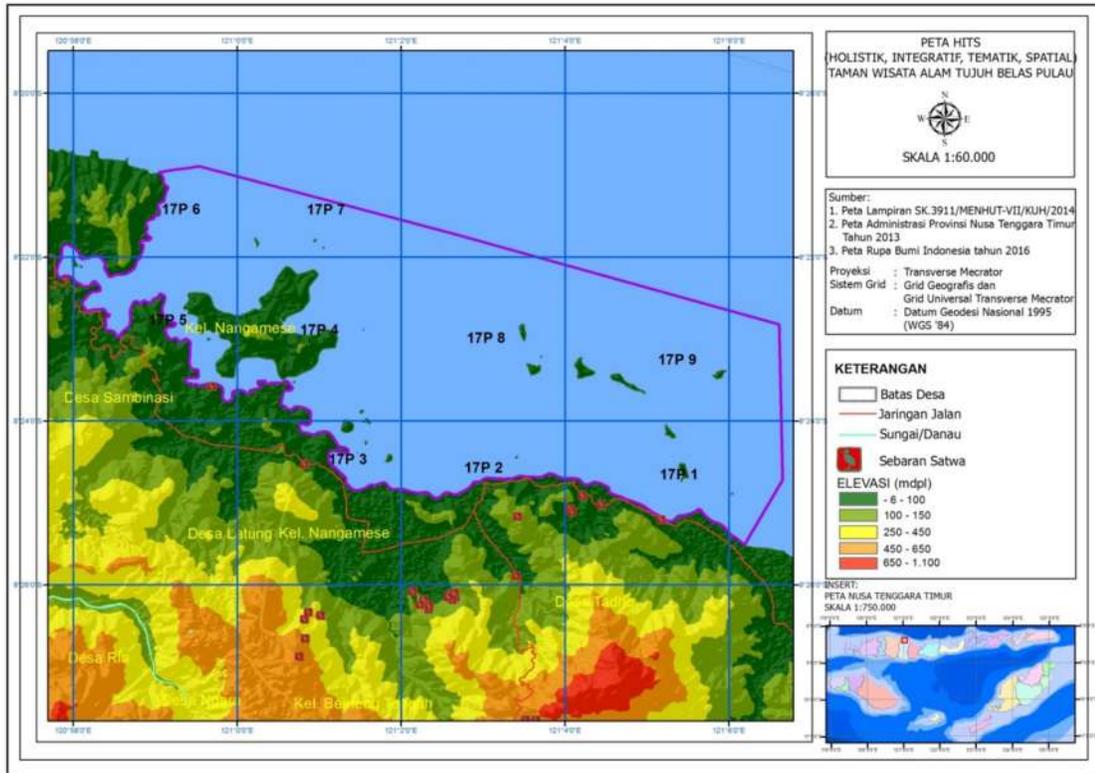
Gambar III. 30 Peta Rencana Patroli TWA Tuti Adagae



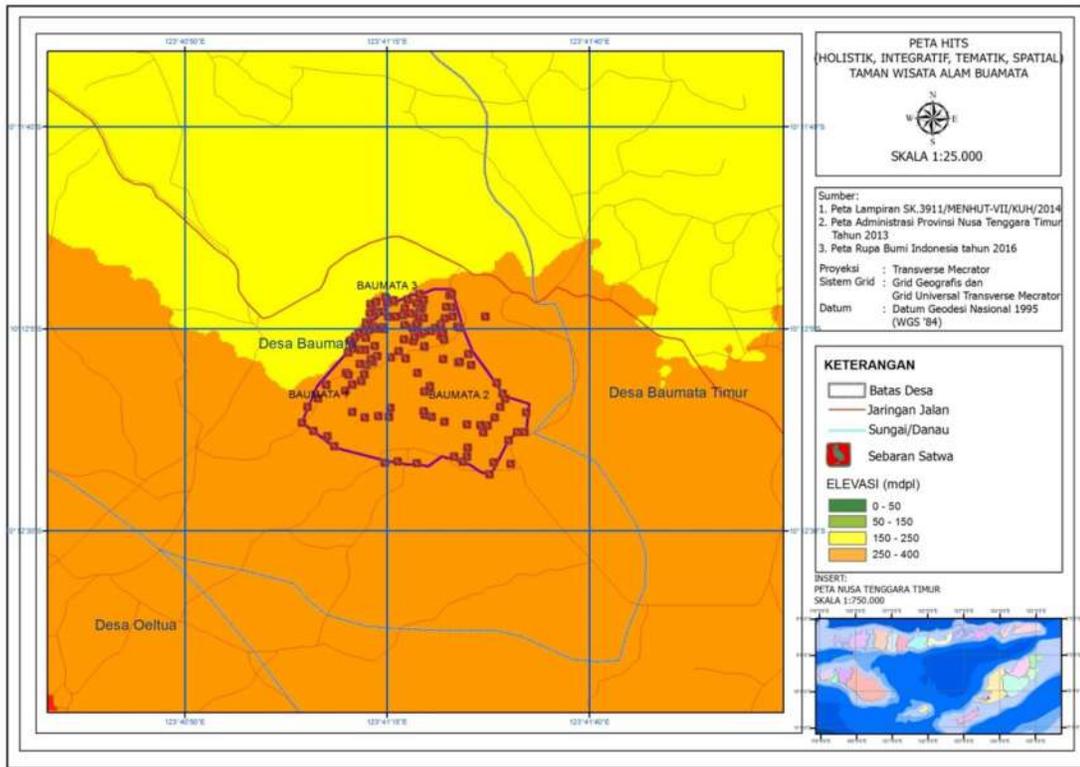
Gambar III. 31 Peta Rencana Patroli TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere



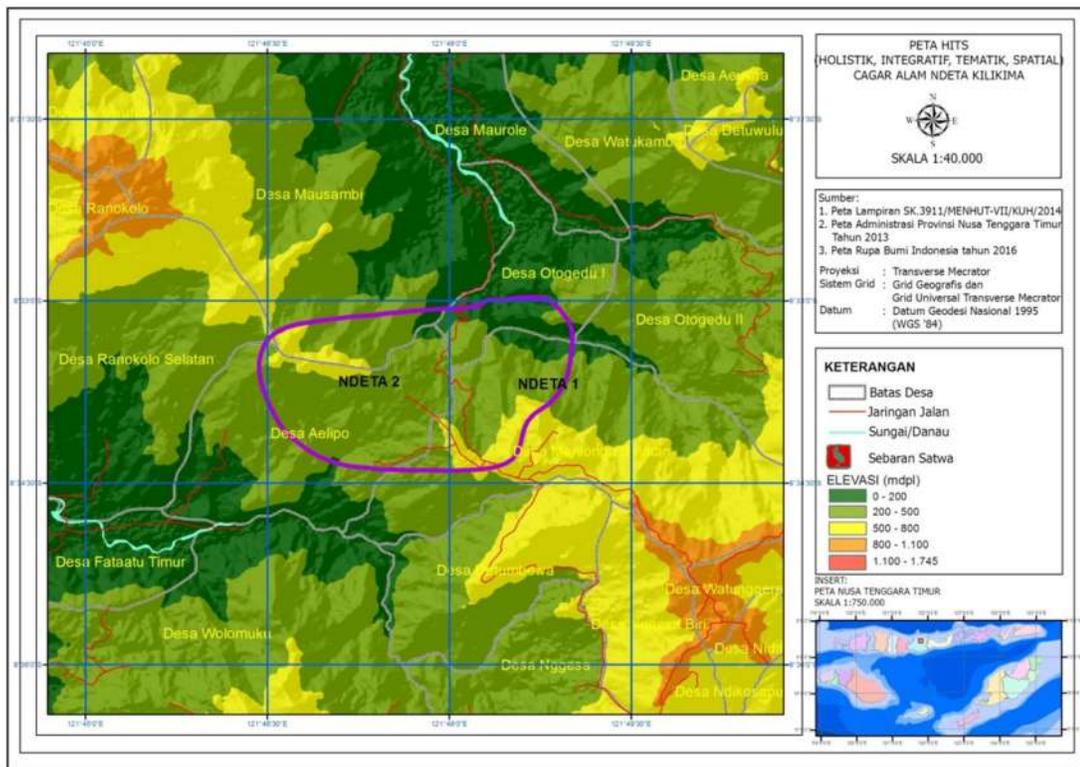
Gambar III. 32 Peta Rencana Patroli TWA 17 Pulau



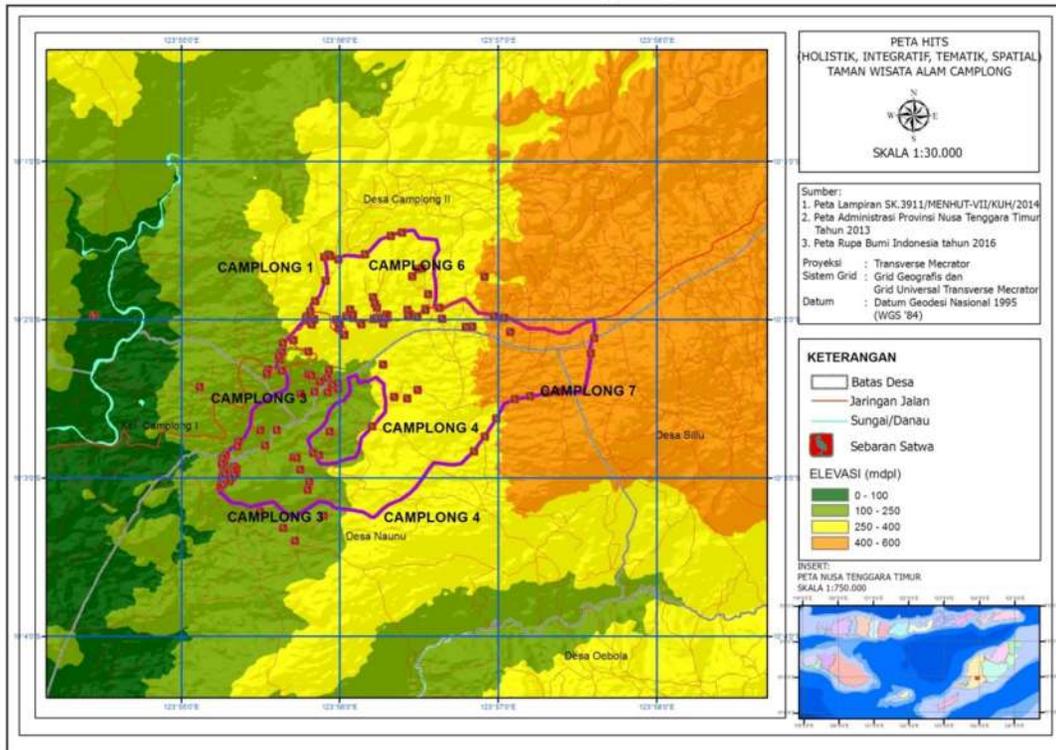
Gambar III. 33 Peta Rencana Patroli TWA Baumata



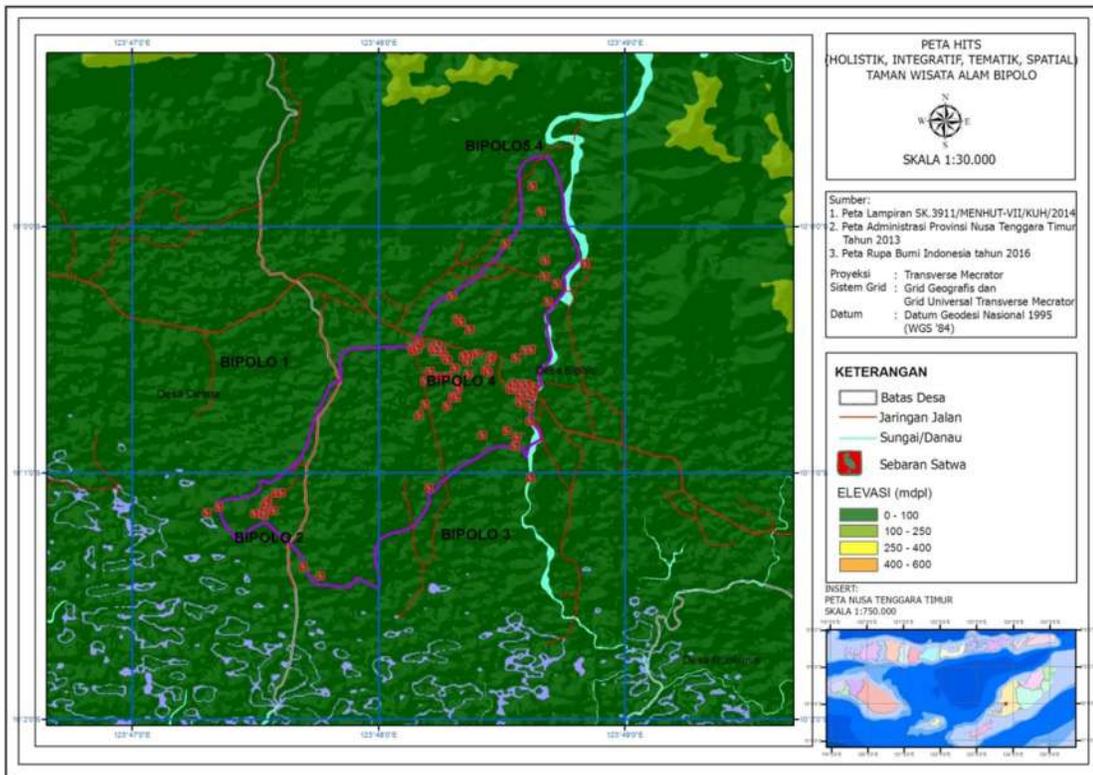
Gambar III. 34 Peta Rencana Patroli CA Ndetak Kelikima



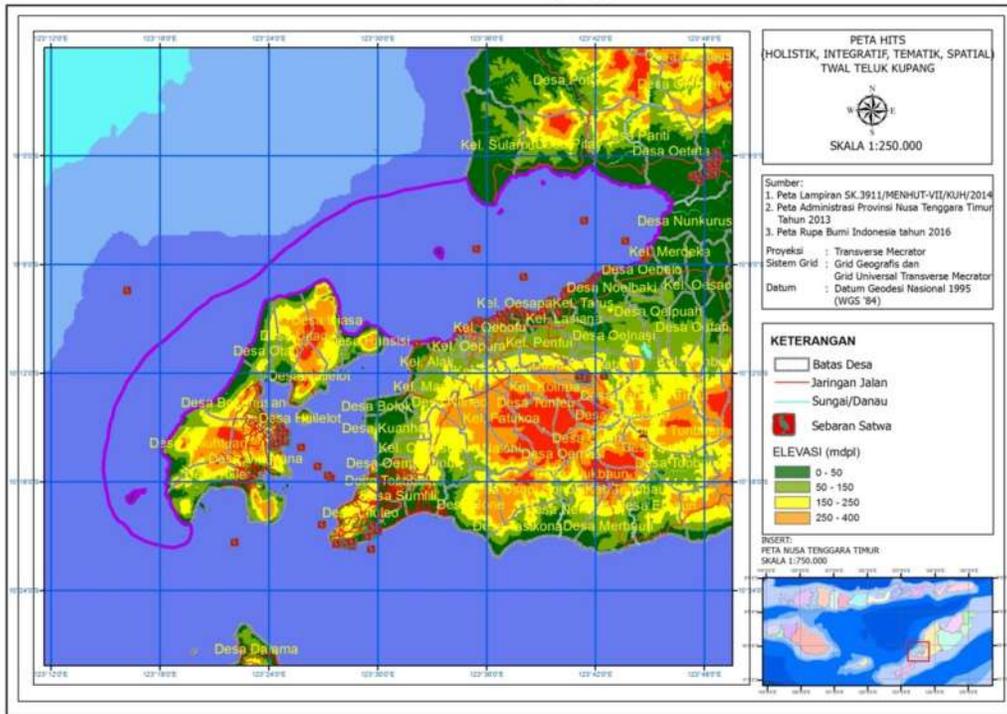
Gambar III. 35 Peta Rencana Patroli TWA Camplong



Gambar III. 36 Peta Rencana Patroli TWA Bipolo



Gambar III. 37 Peta Rencana Patroli TWAL Teluk Kupang



8. OUTPUT LUAS KAWASAN YANG DIVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL (5422.001) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.419.670.000,00

A. GAMBARAN UMUM

Kawasan TN dikelola oleh Balai Besar/ Balai Taman Nasional, sedangkan kawasan CA, SM, TWA dan TB dikelola oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Khusus Taman Hutan Raya (TAHURA), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, TAHURA dikelola oleh pemerintah propinsi. Berdasarkan data yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode tahun 2015 – 2019 bahwa luasan kawasan konservasi adalah 27.190.992 Ha terdiri dari 527 unit berupa 50 unit Taman Nasional, 118 Taman Wisata Alam, 22 Taman Hutan Raya, 14 Taman Buru, 248 Cagar Alam, dan 75 Suaka Margasatwa.

Saat ini, kawasan hutan di Indonesia, termasuk kawasan hutan konservasi mengalami kerusakan hutan yang cukup besar. Dirjen Planologi Kehutanan, (2013) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2011 kerusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan seluas 41,17 juta ha yang terbagi menjadi kerusakan hutan di kawasan hutan konservasi seluas 5,25 juta ha, kerusakan hutan di kawasan hutan lindung seluas 7,45 juta ha, dan kerusakan hutan di kawasan hutan produksi seluas 28,47 juta ha. Lebih lanjut, Dirjen Planologi, (2013) menyebutkan bahwa laju deforestasi di kawasan hutan periode 2009- 2011 adalah sebesar 330.193,8 ha/tahun yang terbagi menjadi laju deforestasi di kawasan hutan konservasi sebesar 9.634,5 ha/tahun, laju deforestasi di kawasan hutan lindung sebesar 20.895,2 ha/tahun, dan laju deforestasi di kawasan hutan produksi sebesar 299.664,1 ha/tahun.

Sementara itu, berdasarkan data Ditjen PHKA, (2012) menyebutkan bahwa kerusakan kawasan konservasi berdasarkan laporan yang masuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah (Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional) mencapai 770.189 ha. Adapun kerusakan kawasan konservasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: kerusakan kawasan taman buru mencapai 536,5 ha, kerusakan kawasan taman wisata alam mencapai 4.210,3 ha, dan kerusakan kawasan taman nasional mencapai 765.442,29 ha.

Berdasarkan data tersebut dan fakta di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar kawasan hutan konservasi di Indonesia kini mengalami kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti: perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal mining), kebakaran hutan, dan perburuan satwaliar serta daya-daya alam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang lebih bersifat preventif dan preemtif.

Dalam RENSTRA KSDAE 2015-2019 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Propinsi menjadi salah satu dari 7 (tujuh) IKK Direktorat Kawasan Konservasi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan UPT Balai Besar/Balai KSDA (berupa manfaat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi yang efisien dan lestari).
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat (berupa manfaat ekonomi dan berupa sosial budaya).
3. Dunia Pendidikan/Perguruan Tinggi, Peneliti, dll (manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan).
4. Pihak Swasta (manfaat dalam peluang melakukan investasi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata, tumbuhan obat, dll).
5. Masyarakat dan stakeholder lainnya (manfaat ekonomi, ekologi dan berupa sosial budaya).

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Beberapa metode atau cara yang akan digunakan untuk membantu tercapainya hasil pada output kegiatan ini adalah :

- a. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi terdiri dari :
 - Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK)
 - Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeta Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Maumere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng
 - Monitoring Populasi Buaya di Teluk Kupang, TWA Menipo dan CA Maubesi Konservasi Penyu di TB Bena
 - Konservasi Penyu di TWA Menipo
 - Inventarisasi Rusa di TWA Menipo, TB Ndana, SM Harlu, CA Wae Wuul
 - Monitoring Sponge (Anti Kanker) di TWAL Teluk Kupang.
- 1) Inventarisasi Rusa di TWA Menipo, TB Ndana, SM Harlu, CA Wae Wuul

Metode pelaksanaan yang akan digunakan pada kegiatan inventarisasi populasi rusa di TWA Menipo, TB.Ndana dan SM.Harlu adalah Concentration Count Methode. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan tim pengamat pada tempat-tempat berkumpulnya satwa yang relatif bersamaan. Untuk waktu pengamatan yang tepat adalah pada saat satwa sedang melakukan aktivitas seperti

makan dan beristirahat yaitu pagi pada pukul 05.00 s/d 09.00 dan sore pada pukul 15.00 s/d 18.00.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dengan Concentration Count Methode adalah sebagai berikut :

- a. Lakukan survey pendahuluan untuk mencari informasi yang akurat tentang pola penggunaan ruang dan waktu oleh satwa yang akan dihitung
- b. Menentukan titik koordinat pada tempat pengamatan dan gambarkan titik koordinat pada peta kerja.
- c. Susun tim pengamat (maksimal 3 orang) dan tempakan pada titik yang telah ditentukan.
- d. Sepakati waktu mulai dan berakhirnya kegiatan, lakukan pengamatan secara serentak diseluruh wilayah pengamatan dengan waktu yang bersamaan.
- e. Pada setiap perjumpaan dicatat ; waktu perjumpaan, jumlah individu, jenis kelamin, kelas umur, lokasi perjumpaan, perilaku satwa, arah pergerakan, dan posisi spatiasl satwa serta kondisi umum lokasi pengamatan yang mencakup kodisi vegetasi, sumber pakan, kondisi cuaca, dan angin.
- f. Perlu diingat dalam thaley sheet harus ditulis satwa masuk dan satwa keluar pada masing-masing plot pengamatan.

Sesudah dilakukan pengambilan data tersebut, untuk mengetahui jumlah satwa populasi diwilayah pengamatan menggunakan persamaan dengan rumus :

$$D_i = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$D = \sum D_i$$

Sedangkan untuk pendugaan variasi kepadatan populasi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan :

$$S^2_p = \frac{\sum D_i^2 - (\sum D_i)^2 / c}{c-1}$$

$$D \pm t_{a/2; db} / [\sqrt{S^2_p / c}]$$

- D_i : Ukuran populasi pada lokasi pengamatan ke-1
 X_i : Jumlah individu yang dijumpai pada pengamatan ke-1
 D : Total populasi pada seluruh pengamatan
 c : Jumlah seluruh lokasi pengamatan yang diamati
 n : luas areal pengamatan (Km^2/Ha)
 S^2_p : Variasi kepadatan populasi pada lokasi pengamatan

Tata Waktu Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Nama kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Inventaisari Rusa di TWA Menipo												
2.	Inventaisari Rusa di TB.Ndana												
3	Inventaisari Rusa di SM.Harlu												

Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh petugas teknis dari Balai, Bidang I /Seksi/Resort sebanyak 21 (dua puluh satu) orang untuk 3 (tiga) kawasan selama @ 5 (lima) hari.

Tim inventarisasi di TWA Menipo

1. Anis Timba
2. Hasnia
3. Dita Adiati, S.Si.
4. Jamres U. S. Benu
5. Gabriel Nino

Tim inventarisasi di SM Harlu

1. Vinsen Fahik
2. Marlina Chrismiawati, S.Hut.
3. Herniwati
4. Susana E. B. Koli, A.Md.
5. Satria H. Belleh, A.Md.
6. Siska Amelia Kuscentari, S.Si.
7. Yermi Pah
8. Nurkhalif, S.Hut.

Tim inventarisasi di TB Ndana

1. Aty Nuban
2. Nickson L. Awang
3. Sulistyanto, S.Hut.
4. Rani Fatma Sari, S.Hut.
5. Samrenta Sianturi, S.Hut.
6. Sindi Nursiamdin, S.Hut.
7. Jeremias F.
8. Paulus Suek

2) Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK)

3. Metode Pelaksanaan

Inventarisasi ini menggunakan metode *concentration count* yang merupakan metode penghitungan sensus pada lokasi-lokasi yang memiliki intensitas perjumpaan dengan satwa yang tinggi. Kelemahan dari metode ini sebagian satwa kemungkinan tidak terhitung karena keterbatasan pengamatan dalam mengamati satwa, misalnya karena satwa bersembunyi di balik daun atau batang pohon yang tidak terlihat pengamat. Penghitungan ganda yang disebabkan jarak antar pengamat berdekatan sedangkan burung bergerak dengan cepat. Solusi untuk mengurangi dampak kelemahan metode ini adalah melakukan penghitungan terkonsentrasi pada beberapa wilayah penghitungan secara serempak (simultan) dan pada jarak yang berjauhan yang dapat mencakup pembagian keseluruhan wilayah hitung. Pengamatan dilakukan pada 3 (tiga) tempat yang strategis secara simultan (serempak) pada pagi (04.30 s/d 07.30 WITA) dan sore (15.00 s/d 17.30 WITA) dengan bantuan teropong binokuler dan kamera tele sehingga dapat mengamati jumlah kakatua, jalur terbang dan habitat sekitar kakatua. Jumlah tiga tempat ini ditentukan berdasarkan jumlah optimal sesuai wilayah yang diamati dan jumlah pengamat. Penentuan titik lokasi ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*), yaitu lokasi pengamatan berada di jalur terbang kakatua. Kakatua kecil jambul kuning hidup berpasangan dan berkumpul menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga *metode concentration count* ini sesuai dengan sifat spesies kakatua ini. Titik pengamatan ditentukan pada peta lokasi dan dicari koordinatnya menggunakan GPS. Pengamatan ini dimungkinkan karena kakatua memiliki pola terbang yang tetap serta perilaku terbang berkelompok yang mudah dikenali dan diamati dari jauh. Kakatua memiliki pola terbang yang tetap sehingga dapat ditentukan lokasi yang tepat untuk pengamatan. Lokasi yang dipilih adalah pada jalur terbang kakatua pada pagi dan sore hari. Pengamatan perilaku kakatua dilakukan dengan mendeskripsikan perilaku yang teramati meliputi perilaku terbang, makan dan istirahat. Komponen habitat utama yang diamati adalah vegetasi yang digunakan untuk makan dan beristirahat pada siang hari.

4. Rencana Pelaksanaan

a. Tatawaktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu yaitu :

No	Aktivitas	Bulan pada tahun 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring Kakatua di TWA Menipo												
2	Monitoring Kakatua di SM Harlu												

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dari bidang, seksi dan resort dengan rincian sebagai berikut :

1. Tim Monitoring Kakatua di TWA Menipo

- Sindi Nursiamdini, S.Hut.
- Samrenta Sianturi, S.Hut.
- Rani Fatma Sari, S.Hut.
- Jamres U.S. Benu
- Gabriel Nino

2. Tim Monitoring Kakatua di SM Harlu

- Yusuf Gunawan, S.Hut.
- Sri Ngatini, S.Hut.
- Siska Amelia Kuscintari, S.Si.
- Yermi Pah
- Alvreth Rili

Sedangkan Tim Supervisi berjumlah 6 (enam) orang dari Balai. 3 (tiga) orang melakukan supervisi kegiatan di TWA Menipo dan 3 (tiga) orang supervisi kegiatan di SM Harlu.

3) Konservasi Penyu di TWA Menipo

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Konservasi penyu yang direncanakan yaitu :

- Melakukan survey
- Mengumpulkan data pendaratan penyu
- Melakukan patroli
- Melakukan pengamatan
- Melakukan pendataan
- Pembenahan kandang penetasan penyu

Rencana Pelaksanaan

Tatawaktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu yaitu :

Kode	Aktivitas	Bulan pada tahun 2020											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
002	Konservasi Penyu di TB Bena dan TWA Menipo												

Pelaksana kegiatan Konservasi Penyu di TB Bena dan TWA Menipo adalah staf masing-masing RKW TB Bena & SM Ale Aisio dan RKW TWA Menipo.

TB Bena : Yunedi Hailitik, Herry Ote Selan, Amnon Aila Bell, A.Md, Arni Imenuel Tualaka, Apris Asbanu.

TWA Menipo : Jamres Benu, Apdon Amponi, Alexander Teuf, Yerubeam Talan.

4) Monitoring Sponge (Anti Kanker) di TWAL Teluk Kupang

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Bioprospeksi biota laut sponge sebagai bahan bioaktif obat kanker rencananya dilakukan pada Tahun 2020. Sampel sponge dikoleksi dari perairan wilayah Nusa Tenggara Timur pada wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT. Pemeriksaan kandungan senyawa bioaktif sampel dilakukan pada laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.

Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah petugas Balai Besar KSDA NTT (Mugi Kurniawan, Elisa Iswandono, Sulistyanto) dan Tim FPIK Universitas Diponegoro. Contact Person untuk pelaksanaan kegiatan dari Tim FPIK Universitas Diponegoro adalah:

Dr. Agus Trianto, ST.,M.Sc

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan

Email: agustrianto@undip.ac.id; agustrianto.undip@gmail.com

Sampling dan Stock Asesment SpongeTarget

Pengambilan sampel menggunakan cara snorkeling, skin diving pada kedalaman sampai 1-3 meter dan SCUBA Diving pada kedalaman sampai dengan 30 meter. Sampel akan dibagi menjadi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai sumber mikrobasimbiont, untuk trasplantasi, untuk voucher (identifikasi sponge) dan sebagai sumber senyawa bioaktif. Sampel untuk bahan bioaktif akan disimpan dalam freezer setelah dilakukan ekstraksi dan sampel kering dengan cara kering angin. Pengambilan sampel sponge

dilakukan secara bersama-sama antara petugas Balai Besar KSDA NTT dan Tim FPIK Universitas Diponegoro.

Stock assesment terhadap sponge target akan dilakukan dengan *modified line intersect transect (mLIT)* pada kedalaman 5 dan 10 m untuk sponge *Acanthostrongylophora*. Sementara mLIT sponge *Candidaspongia* akan dilakukan pada kedalaman 15 dan 20 m.

Ekstraksi

Sampel dibersihkan dari pengotor yang menempel dan dipotong-potong kecil-kecil kemudian diekstrak dengan metanol sebanyak 3 kali. Proses pemekatan dilakukan dengan Rotary Evaporator.

Kultur sponge

Sponge *Acanthostrongylophora* sp. dan *Candidaspongia* sp. akan dikultur secara in situ di TWL Teluk Kupang sebagai upaya asesmen untuk produksi bahan bioaktif langsung dari biota laut secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Sponge hasil kultur akan diekstraksi dan diuji kandungan bahan bioaktifnya.

Uji Anti Kanker

Uji anti kanker dilakukan pada Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Uji anti kanker dilakukan dengan menentukan nilai IC50 yaitu nilai yang menunjukkan konsentrasi ekstrak atau isolat yang dibutuhkan untuk menghambat 50% pertumbuhan sel selama pertumbuhan linier sel. Uji ini digunakan sebagai pemandu (*Bioassay Guide Fractionation*) dalam proses isolasi dan purifikasi senyawa bioaktif.

Analisis kandungan senyawa Manzamine.

Analisis senyawa manzamine akan dilakukan dengan metoda kromatografi dan spectroscopy. Pada tahap awal akan dilakukan uji dengan HPLC, selanjutnya setelah memperoleh pola senyawa, uji kandungan senyawa manzamine akan dilakukan dengan metoda TLC.

Isolasi dan Kultur Mikroba simbion

Kegiatan ini dilakukan di laboratorium Tropical Marine Biotechnology, FPIK UNDIP. Bakteri simbion sponge diisolasi dengan teknik pengenceran bertingkat. Sampel sponge dibersihkan dengan air laut steril, kemudian dimasukkan ke dalam air laut steril dan dihancurkan, sehingga diperoleh pengenceran sampel 10^0 . Selanjutnya diencerkan menjadi 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , dan 10^{-4} . Hasil pengenceran tersebut disebarakan pada cawan

Petri berisi medium NA dan diinkubasi pada suhu 26°C selama 24 jam. Koloni yang tumbuh selanjutnya dimurnikan dengan teknik goresan.

Jamur simbion sponge diisolasi dengan menggunakan teknik tempel. Permukaan luar sampel sponge dibersihkan dengan air laut steril dan dipotong dan bagian dalam sampel ditempelkan di atas permukaan medium MEA steril. Selanjutnya diinkubasi hingga koloni jamur simbion tumbuh. Setelah tumbuh, koloni jamur simbion dimurnikan dengan pemilahan berdasarkan morfologi.

- 5) Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeti Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Maumere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng.

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan sarang Elang Flores merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas ppelestarian satwa Elang Flores khusus di wilayah kerja lingkup Bidang KSDA Wilayah II. Metode yang digunakan dalam kegiatan pembaharuan data dan informasi yaitu dengan pemantauan kondisi bersarang yang diperoleh secara langsung dilapangan. Biaya operasional petugas dalam rangka pengumpulan dan *updating* data lapangan serta kelengkapan bahan dalam rangka kebutuhan pembaharuan data dan informasi mutlak diperlukan sebagai media pengelolaan lebih lanjut.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh petugas teknis dari Balai/Bidang/Seksi/Resort yang dibantu oleh tenaga lapangan yang dibentuk serta para pihak terkait termasuk masyarakat sekitar.

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan di Site Pulau Flores wilayah kerja lingkup Bidang KSDA Wilayah II oleh 2 s/d 6 orang petugas teknis selama 2 s/d 7 hari.

Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inventarisasi Tanaman Obat di Sekitar TWA Ruteng												

3. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pemantauan sarang Elang Flores ini membutuhkan rentan waktu 5 s/d 10 hari pada bulan Mei tahun berjalan

b. Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konsevasi terdiri dari :

- 1) Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan
Metode pengumpulan data kegiatan survey potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan diawali dengan :
 - a. Pengumpulan data sekunder melalui buku teks, laporan, makalah, jurnal sebagai sumber pustaka atau referensi, wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi survey baik itu penangkap atau agen maupun sub agen penjual TSL. Data sekunder bermanfaat untuk memberi gambaran keberadaan TSL baik di alam maupun peredaran dan pemanfaatannya oleh masyarakat.
 - b. Pengumpulan data primer dilakukan pada lokasi yang diduga sebagai habitat TSL khususnya TSL yang diperdagangkan. Jenis data yang diambil pada kegiatan survey ini terdiri dari data primer yang merupakan data biologi dan ekologi TSL yaitu nama jenis, jumlah individu tiap jenis, jenis kelamin, ukuran TSL (berat, panjang, lebar), waktu perjumpaan, aktivitas, posisi horizontal dan vertikal dalam jalur pengamatan. Data habitat yang diambil yaitu kondisi cuaca, sumber pakan, kelembaban udara dan kondisi umum lokasi survei.
 - c. Cara pengambilan data yaitu dengan metode *Visual Encounter Survey* (VES) pada jalur akuatik (perairan) dan terestrial (darat), pengamatan di luar plot sejauh jarak pandang normal. Langkah-langkah pengambilan data yaitu :
 1. Survei pendahuluan
Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lapangan, karakteristik habitat agar memudahkan penentuan lokasi pengamatan/survei sehingga peluang perjumpaan besar.
 2. Survey TSL
Survey TSL dilakukan pada pagi hari mulai jam 07.30-11.00 dan sore hari pada jam 15.00-18.30 dilakukan 3 kali pengulangan pada setiap lokasi dengan fokus pada tempat yang diperkirakan menjadi sarang, ranting pohon, akar lapuk, celah batu, lubang dalam tanah, tumpukan serasah di tepi sungai. Petugas pengamatan sebanyak 5 orang dilakukan secara acak pada lokasi yang telah ditentukan. Data hasil survei dicatat pada buku lapangan yang disediakan untuk selanjutnya dilakukan analisis, pembahasan dan rekomendasi.

Waktu, Personil dan Tempat Pelaksanaan Pencapaian Keluaran

Kegiatan survey dilaksanakan oleh personil di kantor Balai (Mugi Kurniawan, Elisa Iswandono, Okto Sene, Sulistyanto, Irvan Stevanus) Bidang KSDA Wilayah I dan Bidang KSDA Wilayah II dalam kurun waktu selama 12 bulan. Sedangkan tempat pelaksanaan survey yaitu di luar kawasan konservasi di Pulau Timor, Flores, Sumba, Rote dan Alor.

c. Penanganan Satwa Transit dan Konflik terdiri dari :

Lokasi

Kegiatan penanganan konflik oleh Unit Penanganan Satwa Balai Besar KSDA NTT dilaksanakan diseluruh wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT yang mempunyai potensi terjadi konflik satwa liar dengan manusia.

Jenis kegiatan dan Waktu Pelaksanaan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Unit Penanganan Satwa Balai Besar KSDA NTT dalam Tahun 2020 adalah :

1. Pelatihan penanggulangan konflik manusia dan buaya di pulau Timor dan Flores
2. Penguatan Kapasitas Unit Penanganan Satwa
3. Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik satwa
4. Penanganan Barang Bukti TSL
5. Operasional pemeliharaan satwa di kandang penampungan

Rencana jadwal/waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Vol. Keg	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Keterangan	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Pelatihan penanggulangan konflik manusia dan buaya di pulau Timor dan Flores	2 kali														Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif
2.	Penguatan Kapasitas Unit Penanganan Satwa : Asuransi Kecelakaan	19 orang														Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif
	Penguatan Kapasitas Unit Penanganan Satwa : Pembuatan Papan Informasi	25 Unit														
3.	Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik satwa	20 kali														Waktu pelaksanaan Respon Konflik bersifat insidental (d disesuaikan dengan laporan/informasi),

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Alokasi anggaran kegiatan pencapaian pada tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel III. 41 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT LUAS KAWASAN YANG DIVERIFIKASI SEBAGAI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN SPESIES DAN GENETIK TSL (5422.001)

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	-		-	1.419.670.000	
5422.001	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL [Base Line]	12	Hektar	-	1.419.670.000	
5422.001.001	Satker KSDA	-		-	1.419.670.000	
051	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi	-		-	491.170.000	
A	Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK)	-		-	74.300.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	9.800.000	A
	- Alat dan bahan	2	KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan hasil [20 ORANG x 2 KEG]	40	OH	60.000	2.400.000	
	- Bahan makan pembantu lapangan [4 ORANG x 5 HARI x 2 KEG]	40	OH	60.000	2.400.000	
	- Penggandaan laporan [10 LAPOR x 2 KEG]	20	BUKU	50.000	1.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	4.000.000	A
	- Upah tenaga pembantu lapangan [4 ORANG x 5 HARI x 2 KEG]	40	OH	100.000	4.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	4.000.000	A
	- Sewa perahu di SM Harlu	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Sewa kendaraan roda 4	1	KEG	1.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	56.500.000	A
	- Perjalanan Petugas dari bidang/seksi [3 ORANG x 2 KEG]	6	OT	4.500.000	27.000.000	
	- Perjalanan Petugas dari resort [2 ORANG x 2 KEG]	4	OT	2.500.000	10.000.000	

	- Perjalanan dalam rangka supervisi dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	2.500.000	7.500.000	
	- Perjalanan dalam rangka supervisi dari balai [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	4.000.000	12.000.000	
B	Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeta Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Maumere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng	-		-	118.450.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	13.650.000	A
	- Alat dan bahan	6	KEG	1.000.000	6.000.000	
	- Konsumsi buruh pembantu lapangan [2 ORANG x 4 HARI x 6 KEG]	48	OH	50.000	2.400.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan hasil [20 ORANG x 6 KEG]	120	OH	35.000	4.200.000	
	- Penggandaan laporan [5 EKSPLO x 6 KEG]	30	EKPLR	35.000	1.050.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	4.800.000	A
	- Upah tenaga pembantu lapangan [2 ORANG x 4 HARI x 6 KEG]	48	OH	100.000	4.800.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	4.000.000	A
	- Sewa perahu	2	KEG	2.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	96.000.000	A
	- Perjalanan dinas dari BKW II ke Maumere [2 ORANG x 1 KEG]	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	- Perjalanan dinas dari BKW II [2 ORANG x 5 KEG]	10	OT	3.000.000	30.000.000	
	- Perjalanan dinas dari SKW III [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	- Perjalanan dinas dari SKW III [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dinas dari SKW IV [1 ORANG x 1 KEG]	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	- Perjalanan dinas dari RKW [2 ORANG x 6 KEG]	12	OT	2.000.000	24.000.000	
	- Perjalanan dinas para pihak [1 ORANG x 6 KEG]	6	OT	2.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan supervisi bidang/seksi [1 ORANG x 6 KEG]	6	OT	2.500.000	15.000.000	
C	Monitoring Populasi Buaya di Teluk Kupang, TWA Menipo dan CA Maubesi	-		-	93.250.000	

521211	Belanja Bahan	-		-	7.350.000	A
	- Alat dan bahan	3	KEG	1.500.000	4.500.000	
	- Bahan makan pembantu lapangan [2 ORANG x 5 HARI x 3 KEG]	30	HOK	60.000	1.800.000	
	- Penggandaan laporan [10 LAPOR x 3 KEG]	30	LAPOR	35.000	1.050.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	2.400.000	A
	- Upah tenaga pembantu lapangan [2 ORANG x 4 HARI x 3 KEG]	24	OH	100.000	2.400.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	2.000.000	A
	- Sewa perahu	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	81.500.000	A
	- Perjalanan Petugas dari Balai [8 ORANG x 1 KEG]	8	OT	3.000.000	24.000.000	
	- Perjalanan Petugas dari Bidang [7 ORANG x 2 KEG]	14	OT	2.500.000	35.000.000	
	- Perjalanan Petugas dari resort [5 ORANG x 3 KEG]	15	OT	1.500.000	22.500.000	
D	Konservasi Penyu di Pulau Timor	-		-	46.620.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	46.620.000	A
	- Alat dan bahan kegiatan konservasi penyu di TB Bena dan TWA Menipo	2	KEG	7.000.000	14.000.000	
	- Alat bahan dalam rangka identifikasi lokasi pendaratan penyu di CA Maubesi	1	KEG	7.000.000	7.000.000	
	- Pemeliharaan kandang penetasan penyu di TWA Menipo	1	TAHUN	1.000.000	1.000.000	
	- Kaos konservasi penyu BBKSDA NTT	1	PAKET	24.620.000	24.620.000	
E	Konservasi Penyu di TWAL Teluk Maumere	-		-	7.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	7.000.000	A
	- Alat bahan dalam rangka identifikasi lokasi pendaratan penyu di TWAL Teluk Maumere	1	KEG	7.000.000	7.000.000	
F	Inventarisasi Rusa di TWA Menipo, TB Ndana, SM Harlu, CA Wae Wuul	-		-	134.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	10.000.000	A
	- Bahan dan pelaporan	4	KEG	1.000.000	4.000.000	
	- Perlengkapan lapangan	4	KEG	500.000	2.000.000	
	- Obat-Obatan	4	KEG	500.000	2.000.000	
	- Bahan makan buruh [2 ORANG x 5 HARI x 4 KEG]	40	OH	50.000	2.000.000	

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	4.000.000	A
	- Upah buruh [2 ORANG x 5 HARI x 4 KEG]	40	OH	100.000	4.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	4.000.000	A
	- Sewa kendaraan/perahu	2	KEG	2.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	116.500.000	A
	- Biaya perjalanan tim dari balai ke rote [3 ORANG x 2 KEG]	6	OT	5.000.000	30.000.000	
	- Biaya perjalanan tim dari balai ke flores [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	- Biaya perjalanan tim dari balai ke Menipo [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	3.500.000	10.500.000	
	- Biaya perjalanan tim bidang/seksi ke Rote [3 ORANG x 2 KEG]	6	OT	5.000.000	30.000.000	
	- Biaya perjalanan tim bidang/seksi ke Wae Wuul [3 ORANG x 1 KEG]	3	OT	4.000.000	12.000.000	
	- Biaya perjalanan petugas resort [2 ORANG x 4 KEG]	8	OT	2.000.000	16.000.000	
G	Monitoring Sponge (Anti Kanker) di TWAL Teluk Kupang	-		-	17.050.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.250.000	A
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.250.000	1.250.000	
	- Bahan makan buruh [4 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	20	HOK	100.000	2.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	2.000.000	A
	- Upah buruh [4 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	20	HOK	100.000	2.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	5.000.000	A
	- Bahan bakar minyak	1	KEG	5.000.000	5.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	6.800.000	A
	- Uang harian pelaksana teknis di lapangan [8 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	40	OH	170.000	6.800.000	
052	Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konsevasi	-		-	100.000.000	
A	Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan	-		-	50.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	1.800.000	A
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	- Personal use	4	ORANG	200.000	800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	3.200.000	A

	- Pembuatan peta hasil	1	PETA	200.000	200.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	50	OH	60.000	3.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	45.000.000	A
	- Perjalanan dalam rangka survei potensi TSL di Pulau Timor, Flores, Sumba, Rote, Alor	9	OT	5.000.000	45.000.000	
B	Koordinasi dan Konsultasi TSL (Pimpinan)	-		-	50.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	50.000.000	A
	- Koordinasi dan konsultasi terkait TSL (Pimpinan)	5		10.000.000	50.000.000	
053	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	-		-	828.500.000	
A	Pelatihan penanggulangan konflik satwa bersama masyarakat di Pulau Timor dan Flores	-		-	58.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	9.500.000	D
	- ATK	2	KALI	500.000	1.000.000	
	- Penggandaan Materi [10 ORANG x 2 LOKAS]	20	EKSP	25.000	500.000	
	- Personal use peserta [10 ORANG x 2 LOKAS]	20	ORANG	200.000	4.000.000	
	- Konsumsi peserta [10 ORANG x 2 LOKAS x 2 HARI]	40	OH	100.000	4.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	49.000.000	A
	- Perjalanan pelatih/narasumber dan panitia	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	- Perjalanan pelatih/narasumber dan panitia	6	OT	4.500.000	27.000.000	
	- Uang saku peserta rapat [10 ORANG x 2 LKS]	20	OH	100.000	2.000.000	
	- Uang transport peserta rapat [10 ORANG x 2 LKS]	20	OH	100.000	2.000.000	
B	Penguatan kapasitas Unit Penanganan Satwa	-		-	68.200.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	7.500.000	A
	- Pembuatan papan informasi	3	UNIT	2.500.000	7.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	60.700.000	D
	- Asuransi Kecelakaan	19	ORANG	300.000	5.700.000	
	- Pembuatan papan informasi	22	UNIT	2.500.000	55.000.000	
C	Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik Satwa	-		-	580.468.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	51.468.000	D

	- Konsumsi, sosialisasi, briefing, perencanaan, evaluasi operasi dan pelatihan kesamaptaaan	10	KALI	1.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi rapat dalam pembuatan leaflet	5	KALI	1.000.000	5.000.000	
	- Konsumsi rapat dalam pembuatan video	5	KALI	1.000.000	5.000.000	
	- Bahan perlengkapan patroli/operasi penanganan/ penangkapan	1	TAHUN	13.968.000	13.968.000	
	- Pencetakan leaflet respons konflik satwa	1	PAKET	7.000.000	7.000.000	
	- Pembuatan video respons konflik satwa	1	PAKET	10.500.000	10.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	270.000.000	D
	- Uang operasional petugas	675	OH	400.000	270.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-		-	7.500.000	A
	- Pemeliharaan perangkat buaya dan peralatan lainnya	3	KALI	2.500.000	7.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	224.000.000	D
	- Transport tim pulau timor dan sekitarnya	20	KALI	1.500.000	30.000.000	
	- Transport tim pulau rote dan sekitarnya	4	KALI	5.000.000	20.000.000	
	- Transport tim pulau flores, sumba dan sekitarnya	4	KALI	6.000.000	24.000.000	
	- Perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan respon konflik	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan respon konflik	4	OT	6.500.000	26.000.000	
	- Perjalanan koordinasi/ konsultasi ke luar provinsi	4	OT	10.000.000	40.000.000	
	- Perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi/konsultasi ke Pusat	6	OT	12.000.000	72.000.000	
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	-		-	27.500.000	D
	- Santunan korban konflik	11	KALI	2.500.000	27.500.000	
D	Penanganan Barang Bukti TSL	-		-	27.500.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	27.500.000	A
	- Penanganan TSL hasil temuan	10	KEG	2.750.000	27.500.000	
E	Operasional pemeliharaan satwa di penampungan	-		-	93.832.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	86.432.000	D

	- Pembelian alat-alat kesehatan satwa dan obat-obatan	1	KEG	11.432.000	11.432.000	
	- Pemeriksaan kesehatan satwa	6	KALI	2.500.000	15.000.000	
	- Biaya pemeliharaan satwa di penampungan	12	BULAN	5.000.000	60.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	7.400.000	A
	- Pengadaan genset untuk patroli konflik satwa	1	UNIT	7.400.000	7.400.000	

E. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN

Lokasi dan target pelaksanaan kegiatan adalah di 28 kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur dan di luar kawasan konservasi.

9. OUTPUT JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM YANG DISIAPKAN SEBAGAI LOKASI KUNJUNGAN (5423.001) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.355.000.000,00

A. GAMBARAN UMUM PROYEK

Rencana pembangunan bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati tahun 2018 mengacu pada beberapa pendekatan yaitu: 1) Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*; 2) Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan, Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, Perkuatan integrasi sumber pendanaan. Perkuatan Implementasi *Money Follow Program* dalam RKP 2018 meliputi 3 hal yaitu menajamkan prioritas nasional, memastikan pelaksanaan program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan. Tema RKP Tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Rancangan RKP tahun 2018 terdiri dari 10 Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan dalam 30 Program Prioritas (PP) Tahun 2018. Kesepuluh PN tersebut yaitu pendidikan; kesehatan; perumahan dan permukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; pembangunan wilayah; dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Dari 10 PN tersebut yang terkait dengan program KSDAE sebanyak 5 PN yaitu pengembangan dunia usaha dan pariwisata; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; ketahanan energi; pembangunan wilayah; dan pembangunan kesehatan. Diantara 5 PN tersebut, terdapat 3 PN yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Salah satunya adalah PN Pengembangan dunia Usaha dan Pariwisata.

Sektor pariwisata nasional pada tahun 2014 telah menghasilkan devisa sebesar Rp 120 triliun atau berkontribusi sebesar 4,2% terhadap PDB nasional. Target devisa sektor pariwisata pada 5 tahun mendatang (2015-2019) adalah 240 triliun atau berkontribusi sebesar 8% terhadap PDB nasional. Sektor pariwisata juga telah berkontribusi terhadap penyerapan kesempatan kerja sebesar 11 juta tenaga kerja pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 ditargetkan jumlah kontribusi tersebut meningkat menjadi 13 juta tenaga kerja. Berdasarkan *World Economic Forum (WEF)*, Indek daya saing kepariwisataan Indonesia juga meningkat pada tahun 2014 menjadi peringkat 70, dan pada tahun 2019 ditargetkan menjadi peringkat 30. Indonesia mempunyai kekuatan pariwisata pada tiga unsur yakni *nature*, *culture*, dan *manmade*. Enam puluh persen (60%) kekuatan utama pariwisata alam Indonesia terletak pada potensi alam yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya berada pada kawasan konservasi yang terdiri dari 52 Taman Nasional, 118 Taman Wisata Alam dan 11 Taman Buru.

Tujuan penyusunan TOR ini adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan output pengembangan destinasi wisata alam prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mendukung destinasi pariwisata prioritas, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan destinasi wisata alam prioritas yang mendukung destinasi pariwisata prioritas, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional untuk tahun anggaran 2020 adalah :

1. Pemerintah pusat dan daerah terutama Pemerintah Daerah (Pemprov dan PemKab/Pemkot) dalam bentuk PNBP dan penerimaan lain dari multiplier effect dari kegiatan pariwisata antara lain pajak hotel dan restoran dan lapangan pekerjaan
2. Swasta berupa kesempatan berinvestasi
3. Masyarakat lokal berupa kesempatan membuka usaha di berbagai sektor wisata alam (antara lain homestay, porter, jasa informasi pariwisata, jasa pramu wisata (interpreter dan pemandu), jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman dan jasa cinderamata)
4. Masyarakat umum sebagai pengunjung/wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengembangan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang mendukung Destinasi pariwisata Prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagai berikut :

Komponen	Keterangan
Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	Dilakukan dengan tahapan : 1. Pengadaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau 2. Pembangunan Front Office Ticketing TWAL 17 Pulau (DED terlampir)
Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Dilakukan dengan tahapan : 1. Penerbitan buletin BBKSDA NTT 2. Pembinaan Sakawanabakti 3. Pameran Konservasi Tingkat Provinsi 4. Pameran Konservasi Tingkat Kabupaten 5. Penyelenggaraan Kegiatan HKAN dan Lingkungan Hidup 6. Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN) 7. Operasional Duta Konservasi

--	--

Tata waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	2020			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam				
2.	Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam				

D. ANALISIS KELAYAKAN

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/RPJM	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam yang layak dan memadai di TWA dan sangat signifikan dengan RKP tahun 2018 dalam rangka mendukung Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
Bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administratif/operasional	Bangunan sarana prasarana wisata alam mempunyai umur teknis tertentu, sehingga tidak pengerjaan suatu sarpras tidak dilakukan berulang untuk jenis sarpras yang sama.
Sesuai dengan Tusi & Kewenangan	Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2011 Jo PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-Set/2011 jo P.5/IV-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dilaksanakan oleh pengelola kawasan. Sedangkan NSPK

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
	terkait pembangunan sarpras wisata alam merupakan kewenangan pusat.
Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan-pelaksanaan-monev	Tahapan-tahapan dalam Pembangunan sarana dan prasarana wisata adalah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka waktu sangat pendek (satu titik)	Tahapan-tahapan dalam pembangunan sarana dan prasaran wisata alam membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun.

E. ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI DI TAHUN 2020

- 1) Untuk Proyek yang Bersifat Fisik/Konstruksi
Tidak terdapat proyek yang bersifat fisik/konstruksi pada tahun 2020
- 2) Untuk Proyek yang Bersifat Non Fisik

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
Masyarakat	- Masyarakat adat sangat mendukung adanya pengelolaan wisata alam di TWAL 17 Pulau dan TWAL Teluk Maumere
Pemerintah Daerah	- Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata
PNBP	- Telah dilaksanakan pemungutan masuk objek wisata alam di TWAL 17 Pulau dan TWAL Teluk Maumere

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel :

Tabel III. 42 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE OUTPUT JUMLAH DESTINASI WISATA ALAM YANG DISIAPKAN SEBAGAI LOKASI KUNJUNGAN (5423.001)

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	-		-	2.355.000.000	
5423.001	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan [Base Line]	1	Destinasi	-	2.355.000.000	

5423.001.001	Satker KSDA	-		-	2.355.000.000	
053	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam	-		-	2.000.000.000	
A	Pengadaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau	-		-	1.658.160.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	28.000.000	A
	- Perjalanan petugas dalam rangka survey harga	4	OT	7.000.000	28.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	1.508.340.000	A
	- Biaya pengadaan kapal patroli 10 Meter	1	UNIT	1.508.340.000	1.508.340.000	
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	-		-	121.920.000	A
	- Biaya perencanaan	1	UNIT	49.610.000	49.610.000	
	- Biaya pengawasan	1	UNIT	44.860.000	44.860.000	
	- Honorarium tenaga ahli	1	OB	21.000.000	21.000.000	
	- Honorarium kelompok kerja ULP	5	OP	1.270.000	6.350.000	
B	Pembangunan Front Office Ticketing dan tambatan perahu di TWAL 17 Pulau	-		-	341.840.000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		-	311.840.000	A
	- Pembangunan Front Office Ticketing TWAL 17 Pulau	1	PAKET	311.840.000	311.840.000	
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-		-	30.000.000	A
	- Perencanaan Pembangunan	1	PAKET	18.000.000	18.000.000	
	- Pengawasan Pembangunan	1	PAKET	12.000.000	12.000.000	
054	Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	-		-	355.000.000	
A	Penerbitan buletin BBKSDA NTT	-		-	21.660.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-		-	3.000.000	A
	- Biaya pengiriman	200	EKSPL	10.000	2.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	540.000	D
	- Alat dan bahan	2	EDISI	270.000	540.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	14.660.000	D
	- Honor Pengarah Kegiatan	2	OTER	200.000	400.000	
	- Honor penanggungjawab	2	OTER	150.000	300.000	
	- Honor redaktur	2	OTER	150.000	300.000	
	- Honor editor	4	OTER	120.000	480.000	
	- Honor desain grafis	2	OTER	120.000	240.000	
	- Honor sekertariat	4	OTER	100.000	400.000	
	- Honor pembuat artikel [50 HAL x 2 EDISI]	100	HAL	100.000	10.000.000	

521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-		-	7.000.000	D
	- Pencetakan buletin	200	EKSPL	35.000	7.000.000	
B	Pembinaan Sakawanabakti	-		-	25.300.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	300.000	A
	- Perjalanan dalam rangka mengikuti Pertikawan di Provinsi lain	1	PAKET	300.000	300.000	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	-		-	25.000.000	D
	- Perjalanan dalam rangka mengikuti Pertikawan di Provinsi lain	1	PAKET	25.000.000	25.000.000	
C	Pameran Konservasi Tingkat Provinsi	-		-	19.620.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	4.620.000	D
	- ATK	1	KEG	370.000	370.000	
	- Bahan pameran	1	KEG	4.000.000	4.000.000	
	- Penggandaan Laporan	10	EKSP	25.000	250.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	9.000.000	D
	- Honor pemandu dan penjaga stand [3 ORANG x 10 HARI x 2 SHIFT]	60	OH	150.000	9.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	2.000.000	D
	- Upah buruh pembuatan stand [4 ORANG x 5 HARI x 1 KEG]	20	OH	100.000	2.000.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	4.000.000	D
	- Sewa stand pameran	1	KEG	4.000.000	4.000.000	
D	Pameran Konservasi Tingkat Kabupaten	-		-	15.520.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	7.320.000	D
	- Bahan Pameran	2	KEG	980.000	1.960.000	
	- Bahan pembuatan stand	2	KEG	2.000.000	4.000.000	
	- Konsumsi pembuatan materi [2 ORANG x 2 HARI x 2 KEG]	8	OH	50.000	400.000	
	- Konsumsi pemandu stand [2 ORANG x 4 HARI x 2 KEG]	16	OH	60.000	960.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	2.400.000	D
	- Honor pemandu stand [2 ORANG x 4 HARI x 2 KEG]	8	OH	100.000	800.000	
	- Honor pembuatan materi [2 ORANG x 2 HARI x 2 KEG]	16	OH	100.000	1.600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	5.800.000	A
	- Upah buruh pembuatan stand [4 ORANG x 2 HARI x 2 KEG]	16	HOK	50.000	800.000	

	- Biaya dekorasi stand pameran	2	KEG	2.500.000	5.000.000	
E	Penyelenggaraan Kegiatan HKAN dan Lingkungan Hidup	-		-	22.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	22.500.000	A
	- Perjalanan dalam rangka menghadiri kegiatan HKAN	3	OT	7.500.000	22.500.000	
F	Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)	-		-	171.600.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-		-	171.600.000	D
	- Honorarium tenaga administrasi/teknis S1 [6 ORG x 13 BLN]	78	OB	2.200.000	171.600.000	
G	Operasional Duta Konservasi	-		-	3.600.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	3.600.000	A
	- Operasional Duta Konservasi	12	KALI	300.000	3.600.000	
H	Promosi Penangkaran Rusa di Rumah Dinas Gubernur NTT	-		-	30.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	30.000.000	D
	- Alat dan bahan untuk Penangkaran Rusa di Rumah Dinas Gubernur NTT	1	PAKET	30.000.000	30.000.000	
I	Promosi Penangkaran Rusa di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT	-		-	20.000.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	20.000.000	D
	- Alat dan bahan untuk Penangkaran Rusa di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT	1	PAKET	20.000.000	20.000.000	
J	Promosi Wisata	-		-	25.200.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	25.200.000	D
	- Promosi Wisata	1	PAKET	25.200.000	25.200.000	

G. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah kawasan konservasi khususnya di TWAL 17 Pulau Riung dan GP Maumere dan wilayah kerja BBKSDA NTT

10. OUTPUT LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DI LUAR KAWASAN KONSERVASI (5424.001) TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp 170.800.000,00

A. GAMBARAN UMUM PROYEK

Kegiatan konservasi sumber daya alam tidak hanya dilakukan di kawasan yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hal ini karena realitas menunjukkan terdapat kekayaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya yang terletak di luar kawasan konservasi memerlukan upaya-upaya konservasi dalam rangka mempertahankan keberadaannya, peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat khususnya masyarakat lokal setempat.

Untuk itu Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2020 merencanakan melaksanakan kegiatan konservasi di luar kawasan konservasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini sangat penting karena saat ini pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur sedang berlangsung secara massif yang terkadang mengancam keberadaan kekayaan sumber daya alam hayati. Untuk itu diperlukan upaya konservasi di wilayah-wilayah yang dianggap penting untuk dipertahankan keberadaan keanekaragaman hayatinya untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Bentuk kegiatan di tahun 2020 adalah penyediaan data dan informasi terkait keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang akan dikonservasi. Kegiatan ini meliputi inventarisasi potensi keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan ini direncanakan di Kabupaten Manggarai Timur, Rote Ndao dan Kabupaten Kupang, karena kabupaten ini dianggap memiliki beberapa spesies yang perlu dilakukan upaya konservasi dalam rangka mempertahankan keberadaannya.

Tujuan kegiatan penyediaan data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi adalah :

- a. Tersedianya data base dan informasi terkait sumber daya alam hayati di luar kawasan konservasi.
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam hayati di luar kawasan konservasi

Ruang Lingkup kegiatan penyediaan data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi meliputi kegiatan konservasi sumber daya alam hayati di luar kawasan konservasi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari hasil kegiatan penyediaan data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi adalah :

1. Internal Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur berupa tersedianya data base dan informasi terkait sumber daya alam hayati di luar kawasan konservasi dan tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi.
2. Eksternal Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur berupa tersedianya data base dan informasi terkait sumber daya alam hayati di luar kawasan konservasi yang dapat diperoleh dari Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penyediaan data, informasi dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi yaitu :

- a. Persiapan tim
- b. Koordinasi dengan pihak terkait
- c. Pelaksanaan pengumpulan data berupa potensi ekologi, Sosial ekonomi masyarakat, Potensi ancaman terhadap kehati, Potensi pengembangan wilayah, Kebijakan pembangunan wilayah, Isu strategis wilayah dan Pemetaan para pihak.
- d. Pembahasan hasil dan penyusunan laporan

2. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan	Penanggung jawab	Rencana Pelaksanaan (Bulan ke)			
			1	2	3	4
1.	Identifikasi dan Survey Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Darat/Perairan	UPT				
2.	Koordinasi dan Konsultasi Tupoksi	UPT				

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel III. 43 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LUAS KAWASAN SEBAGAI PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN RENCANA KONSERVASI NASIONAL DI LUAR KAWASAN KONSERVASI (5424.001)

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	-		-	170.800.000	
5424.001	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi [Base Line]	333.203	Hektar	-	170.800.000	
5424.001.001	Satker KSDA atau TN	-		-	170.800.000	
051	Inventarisasi potensi keanekaragaman hayati	-		-	170.800.000	
A	Identifikasi dan Survey Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Darat/Perairan	-		-	140.800.000	
521211	Belanja Bahan	-		-	13.150.000	A
	- Bahan dan pelaporan	3	KEG	983.500	2.950.000	
	- Perlengkapan lapangan [5 ORANG x 3 KEG]	15	ORANG	200.000	3.000.000	
	- Bahan makanan buruh lapangan [2 ORANG x 5 HARI x 3 KEG]	30	OH	45.000	1.350.000	
	- Konsumsi rapat persiapan [15 ORANG x 3 KEG x 1 HARI]	45	OH	50.000	2.250.000	
	- Konsumsi rapat pembahasan [20 ORANG x 3 KEG x 1 HARI]	60	OH	50.000	3.000.000	
	- Pengandaan peta [4 EKSPL x 3 KEG]	12	OH	50.000	600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-		-	4.050.000	A
	- Upah Buruh pembantu kegiatan [2 ORANG x 5 HARI x 3 KEG]	30	OH	100.000	3.000.000	
	- Upah pembuatan peta [1 JUDUL x 3 KEG]	3	OH	350.000	1.050.000	
522141	Belanja Sewa	-		-	6.000.000	A
	- Sewa kendaraan	3	KEG	2.000.000	6.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	111.600.000	A
	- Perjalanan dari balai [3 ORG x 3 LKS]	9	OT	4.500.000	40.500.000	
	- Perjalanan dari bidang [3 ORG x 3 LKS]	9	OT	3.700.000	33.300.000	
	- Perjalanan dari seksi [3 ORG x 3 LKS]	9	OT	4.000.000	36.000.000	
	- Perjalanan dari resort [3 ORG x 3 LKS]	9	OT	200.000	1.800.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-	6.000.000	
	- Transport peserta rapat [20 ORG x 3 KEG x 1 HARI]	60	OT	100.000	6.000.000	
B	Koordinasi dan Konsultasi Tupoksi	-		-	30.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	30.000.000	D

	- Perjalanan dinas Kordinasi dan Konsultasi Tupoksi	5	OT	6.000.000	30.000.000	
--	---	---	----	-----------	------------	--

E. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Lokasi dan target pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi yaitu :

1. Identifikasi dan Survey Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Darat/Perairan di Pulau Timor dan Flores
2. Koordinasi dan Konsultasi Tupoksi di lingkup UPT.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2020 di seluruh unit kerja lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 bagi seluruh unit kerja di lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, apabila sekiranya diperlukan penyempurnaan dikarenakan adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 serta Rancangan APBN Tahun 2020, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.



TWA Menipo



**BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. SK Lerik, Kelapa Lima, Kupang ; Kode Pos 85228

bbksdantt.menlhk.go.id



@BbksdaNtt



0811 3810 4999



Bbksda Ntt



bbksda_ntt